

# **LAKIP INTERIM**

## **BALAI BESAR**

### **PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

#### **DI BANJARMASIN**



**Triwulan I (satu)**  
**2022**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

*Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Triwulan I Tahun 2021 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh instansi pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024, dan tahun kedua pelaksanaan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran melalui program/kegiatan tahun 2022 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun-tahun berikutnya. Dalam Laporan Kinerja Interim BBPOM di

Banjarmasin Triwulan I Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas BBPOM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM, seluruh stakeholder (instansi Pemerintah Pusat/Daerah) dan juga masyarakat. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang apa yang telah dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan proses pencapaian yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sepanjang Triwulan I tahun 2022.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuous improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 April 2022

Kepala BBPOM di Banjarmasin



Drs. Leonard Durna, Apt., MM.

## Ringkasan Eksekutif

Terdapat 11 (sebelas) sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM, dalam 3 (tiga) Perspektif. Pada triwulan I tahun 2022, dari 11 sasaran kegiatan tersebut, baru 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang dapat diukur pencapaian target masing-masing dengan NPS total 90,72 (**Baik**), yang dirata-ratakan dari NPS 3 Perspektif.

Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved). Pada Triwulan I Tahun 2022, dari 29 Indikator Kinerja tersebut, baru 20 (duapuluh) indikator yang dapat dilakukan pengukuran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan I tahun 2022, memperoleh NPS 80,69% (**Cukup**) dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 83; realisasi 73,38; capaian kinerja 88,41% (**Cukup**)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 81; realisasi 84,00; capaian kinerja 103,70% (**Baik**)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 72; realisasi 100; capaian kinerja 138,89% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
  - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 86; realisasi 78,57; capaian kinerja 91,36% (**Baik**)
  - e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 93; realisasi 0; capaian kinerja 0% (**Sangat Kurang**)

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan I tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 1 (satu) indikator kinerjanya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; target 84.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan I tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 3 (tiga) indikator kinerjanya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu :
  - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; target 92,
  - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; target 80,56
  - c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM; target 91
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan I tahun 2022 memperoleh NPS 89,24% (**Cukup**), karena dari 6 (enam) indikator kinerja yang dimiliki hanya 5 (lima) yang dapat diukur, yaitu sebagai berikut :
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 83; realisasi 92,98; capaian kinerja 112,02% (**Sangat Baik**)
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 62; realisasi 17,50; capaian kinerja 28,23% (**Sangat Kurang**)
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 95,42; capaian kinerja 95,42% (**Baik**)
  - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 50; realisasi 41,18; capaian kinerja 82,35% (**Cukup**)

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 66; realisasi 73,21; capaian kinerja 110,93% (**Sangat Baik**)
  - f. Indeks pelayanan publik; target 4,01 , **belum dilakukan pengukuran.**
  - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik; target 34,43; realisasi 36,67; capaian kinerja 106,51% (**Baik**)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan I tahun 2022 memperoleh NPS 69,23% (**Kurang**) dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 91,80; realisasi 95,85; capaian kinerja 102,79% (**Baik**)
  - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target progres pelaksanaan tahapan 20%; realisasi 12,5%; capaian kinerja 50% (**Kurang**)
  - c. Jumlah desa pangan aman; target progres pelaksanaan tahapan 20%; realisasi 15%; capaian kinerja 62,5% (**Kurang**)
  - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target progres pelaksanaan tahapan 25%; realisasi 15%; capaian kinerja 60% (**Kurang**)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan I tahun 2022 memperoleh NPS 120% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 25; realisasi 38,10; capaian kinerja 152,40% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)

- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Baik**)
  
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 35,85% (**Sangat Kurang**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; target 33; realisasi 11,83; capaian kinerja 35,85% (Sangat Kurang)**
  
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal, pada triwulan I tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 2 (dua) indikator kinerjanya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu:
  - a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin; target 83,3
  - b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin; target 80,01
  
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada triwulan I tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 1 (satu) indikator kinerjanya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu : **Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin; target 82**
  
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada triwulan I tahun 2022 memperoleh NPS 89,24% (**Cukup**), karena dari 2 (dua) indikator kinerja yang dimiliki, hanya 1 (satu) yang dapat diukur, yaitu :
  - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; target 78; **belum dilakukan pengukuran.**
  - b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal; target 2,25; realisasi 2,38; capaian kinerja 105,78% (**Baik**)

11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada triwulan I tahun 2022 memperoleh NPS 120% (**Sangat Baik**) dengan indikator kinerja : Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin; target 46,55; realisasi 68,65 ; capaian kinerja 147,48% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-**. Sebelum memasuki masa pelaksanaan anggaran, pada bulan Desember 2021 mengalami *self adjustment* anggaran, dimana terhadap pagu anggaran tersebut diblokir sebesar Rp 3.154.828.000,- (5%) sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp.59.058.012.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada triwulan I tahun 2022 adalah Rp 3.774.562.930,- atau 6,07% terhadap pagu awal.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, pada triwulan I tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 15,75 dan Tingkat Efisiensi (TE) 14,75 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Tidak Efisien dengan nilai 75%. Nilai tersebut berasal dari 29 Indikator Kinerja Utama, dimana seluruhnya masih memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Tidak Efisien.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	viii
<hr/>	
Bab I Pendahuluan	1.1 Gambaran Umum Organisasi ..... . 1 1.2 Tugas dan Fungsi ..... . 2 1.3 Isu Strategis ..... . 4 1.4 Struktur Organisasi ..... . 11 1.5 Lingkungan Internal ..... . 17 5 Lingkungan External ..... . 22
<hr/>	
Bab II Perencanaan Kinerja	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis ..... . 25 2.2 Sasaran Strategis ..... . 30 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator ..... . 51 2.4 Pengukuran Efisiensi Kegiatan ..... . 52
<hr/>	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... . 53 3.2 Akuntabilitas Kinerja ..... . 56 3.3 Realisasi Anggaran ..... . 58
<hr/>	
Bab IV Penutup	IV.1 Kesimpulan ..... . 289 IV.2 Saran..... . 291
<hr/>	
Lampiran .....	. 293

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/ 411/ M.KT.01/ 2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni 2018 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang mengkoordinir 2 (dua) Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) kabupaten.

Pembagian wilayah kerjanya sebagai berikut :



**Gambar 1.1.1. Peta Wilayah Kerja**

<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Wilayah kerja</b>
<b>BBPOM di Banjarmasin</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Banjarmasin,</li> <li>2. Kota Banjarbaru,</li> <li>3. Kabupaten Banjar,</li> <li>4. Kabupaten Tanah Laut,</li> <li>5. Kabupaten Barito Kuala,</li> <li>6. Kabupaten Tapin,</li> <li>7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan,</li> <li>8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah</li> </ol>
<b>Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>	<b>Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Hulu Sungai Utara,</li> <li>2. Kabupaten Balangan,</li> <li>3. Kabupaten Tabalong</li> </ol>
<b>Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</b>	<b>Kabupaten Tanah Bumbu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Tanah Bumbu,</li> <li>2. Kabupaten Kota Baru</li> </ol>

**Tabel 1.1.1. Wilayah Kerja**

BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sejak tahun 2022, Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi satuan kerja mandiri, namun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penunjukan BBPOM dan Balai POM sebagai Koordinator Loka POM, maka BBPOM di Banjarmasin menjadi koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

## 1.2. Tugas dan Fungsi

BBPOM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/ pendaftaran produk;

- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

### **1.3. Isu Strategis**

Peran BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM (Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu) sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/ kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/ fasilitasi (bantuan modal/ teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di Banjarmasin, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan

berdampak pada membanjirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.

- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals*/bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
  - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin ke depan KIE kepada masyarakat.
  - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

- 6) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.

- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 15) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.
- 16) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.
- 17) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *business as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

- 18) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 19) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta BBPOM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran BBPOM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.
- 20) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:
- a. **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan

dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

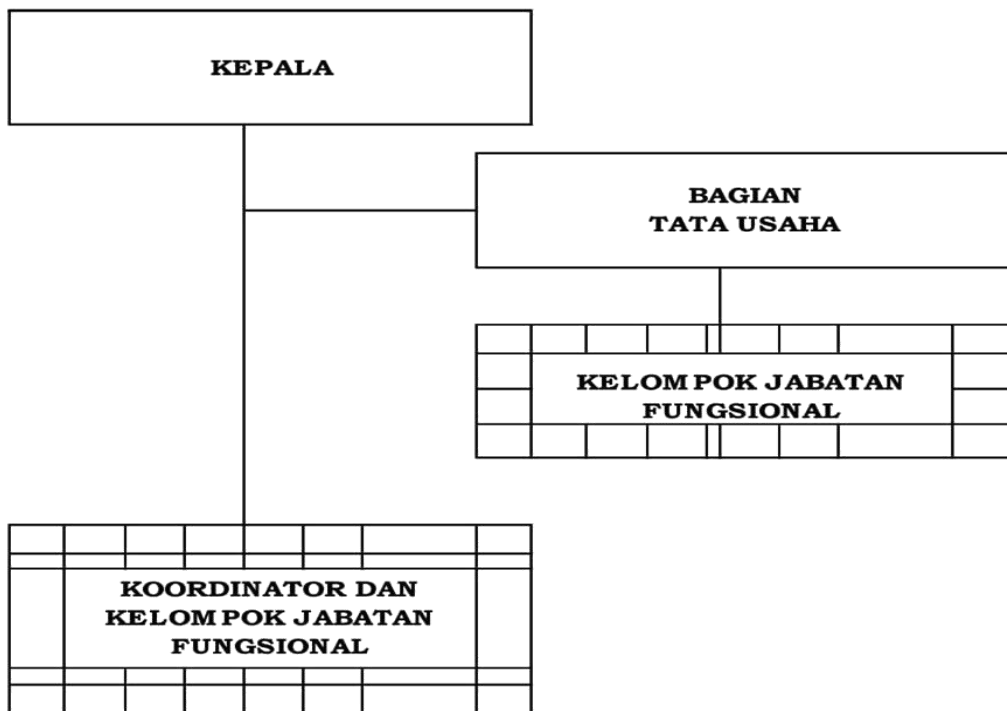
- b. **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/ Peraturan/ Pedoman/ Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/ Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/ klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/ PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/ klinik.
- c. **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- d. **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-*

*market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

- 21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dampak terhadap susunan organisasi BBPOM di Banjarmasin, struktur Organisasi BBPOM sebagai berikut :



**Gambar 1.4.1. Struktur Organisasi BBPOM**

Pada struktur organisasi yang baru terdapat penyederhanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan kelompok substansi masing-masing. Pejabat Eselon III atau Kepala Bidang berubah menjadi Koordinator Kelompok Substansi, sedangkan Pejabat Eselon IV atau Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian berubah menjadi Subkoordinator Subkelompok Substansi.

Berikut struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 :



**Gambar 1.4.2. Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin**

❖ **Kelompok Substansi Pengujian**

**Tugas :** Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

**Fungsi :**

- penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Kimia ;**

**Tugas :** Melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi ;**

**Tugas :** Melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Pemeriksaan ;**

**Tugas :** Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

**Fungsi :**

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Inspeksi ;**

**Tugas :** Melakukan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Sertifikasi;**

**Tugas :** Melakukan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Penindakan**

**Tugas :** Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

**Fungsi :**

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

**Tugas :** Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

**Fungsi :**

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### ❖ **Bagian Tata Usaha**

**Tugas :** Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

- Fungsi :**
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
  - d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
  - e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

#### ➤ **Subkelompok Substansi Program & Evaluasi;**

**Tugas :** Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

#### ➤ **Subkelompok Substansi Umum;**

**Tugas :** Melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

#### ❖ **Kelompok Jabatan Fungsional;**

**Tugas:** Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **1.5. Lingkungan Internal**

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

### **1. Sarana Prasarana**

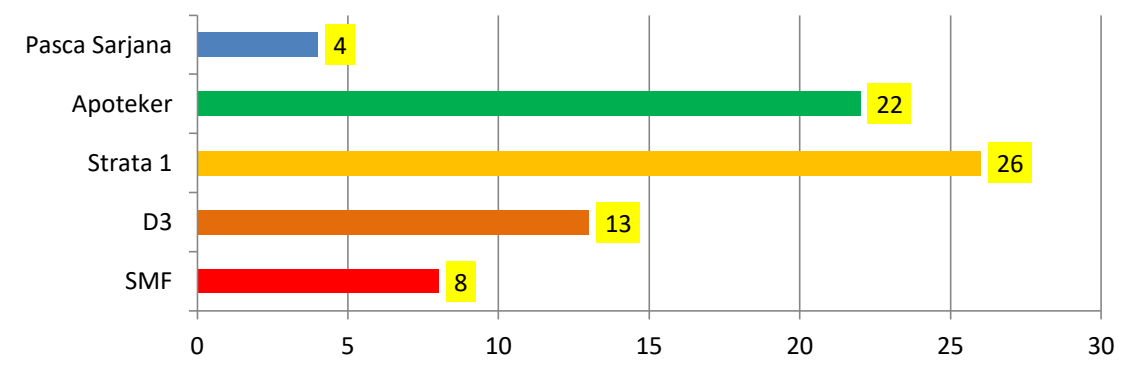
Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai **74,1%**. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian terhadap Standar Minimum Peralatan Laboratorium turun menjadi **55,7%**, sehingga perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

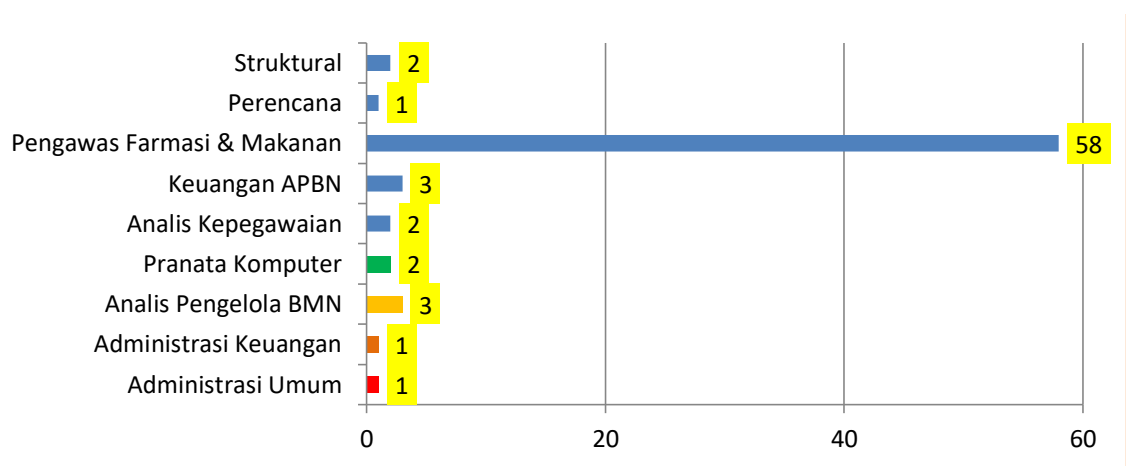
## 2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 31 Maret 2022 sejumlah 73 Orang dengan proporsi 67,12 % perempuan dan 32,88 % laki-laki.

Berikut profil pegawai BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan:



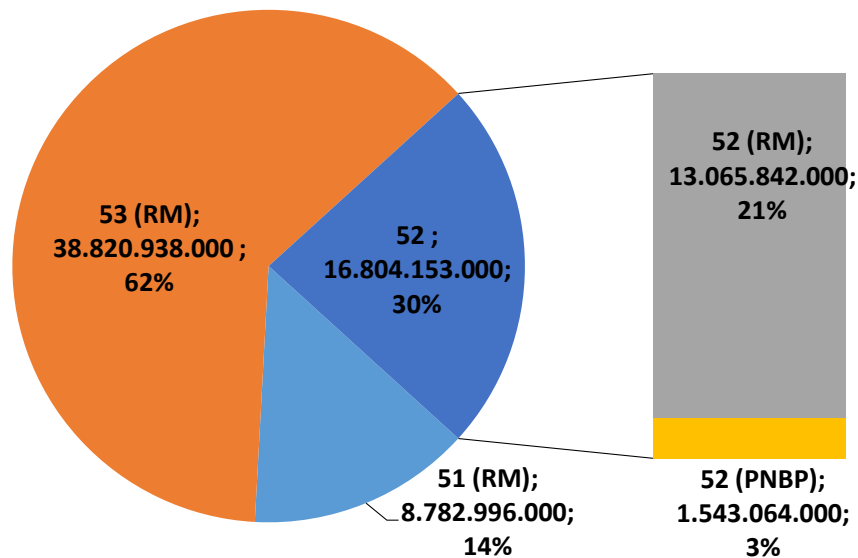
**Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**



**Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2022**

### 3. Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/ 2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 62.212.840.000,-.



**Grafik 1.5.1. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 - Awal**

Sebelum memasuki masa pelaksanaan anggaran, pada bulan Desember 2021 mengalami self adjustment anggaran, dimana terhadap pagu anggaran tersebut diblokir sebesar Rp 3.154.828.000,- (5%) sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp.59.058.012.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada triwulan I tahun 2022 adalah Rp 3.774.562.930,- atau 6,07% terhadap pagu awal.

## 1.6. Lingkungan Eksternal

### 1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km<sup>2</sup> yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/ Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/ Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/ selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/ Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)	Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
TANAH LAUT	348.623	HULU SUNGAI UTARA	240.494
KOTABARU	347.399	TABALONG	257.794
BANJAR	596.001	TANAH BUMBU	368.362
BARITO KUALA	317.181	BALANGAN	133.274
TAPIN	193.635	BANJARMASIN	715.703
HULU SUNGAI SELATAN	240.279	BANJAR BARU	270.021
HULU SUNGAI TENGAH	275.213		

**Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan**

## 2. Jumlah Sasaran Pengawasan

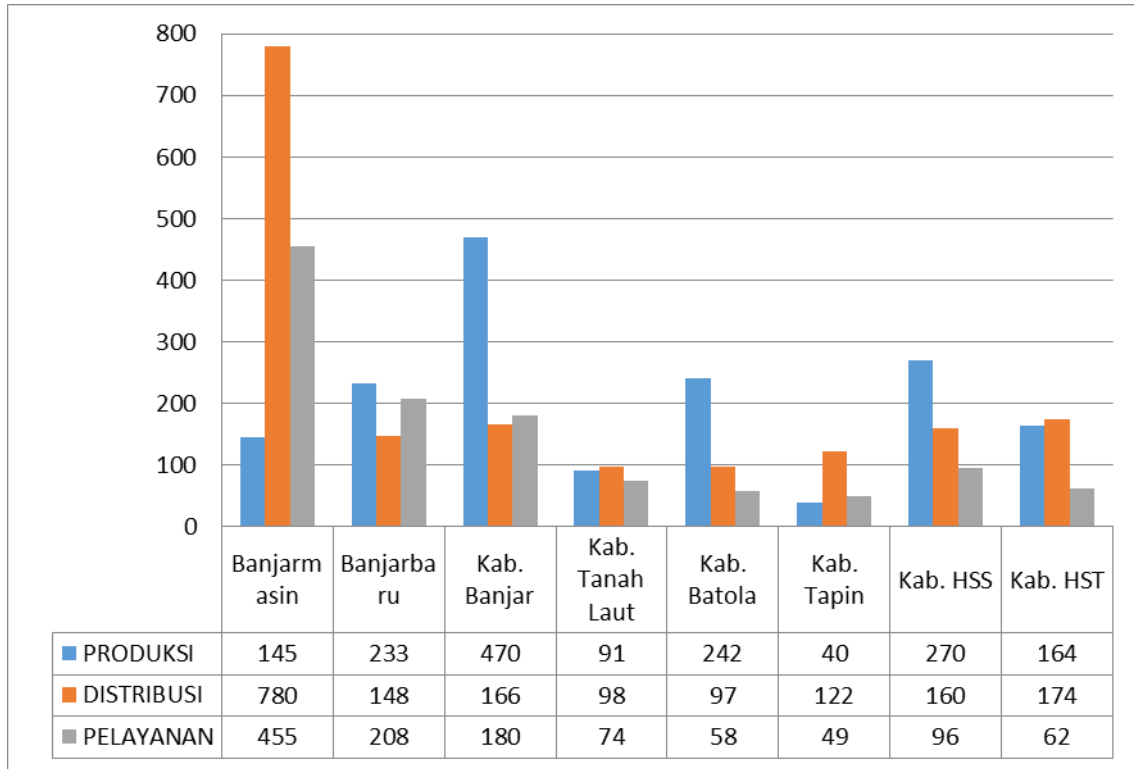
Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarmasin (8 Kabupaten/ Kota) sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 4.582 sarana, yang terdiri dari 1.586 sarana produksi, 1.796 sarana distribusi, 1.131 sarana pelayanan dan 1.586 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	51	1.131	1.182
Pangan MD	56	818	-	874
Kosmetika	9	481	-	490
Obat Tradisional	4	223	-	227
Suplemen Makanan	-	223	-	223
<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>1.796</b>	<b>1.131</b>	<b>2.996</b>
IRTP	1.586			1.586

**Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan**

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 30,12%, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/ kota lainnya.

Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



**Grafik 1.6.1. Jumlah Sarana Per Kabupaten/ Kota**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis**

##### **Visi Badan POM :**

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

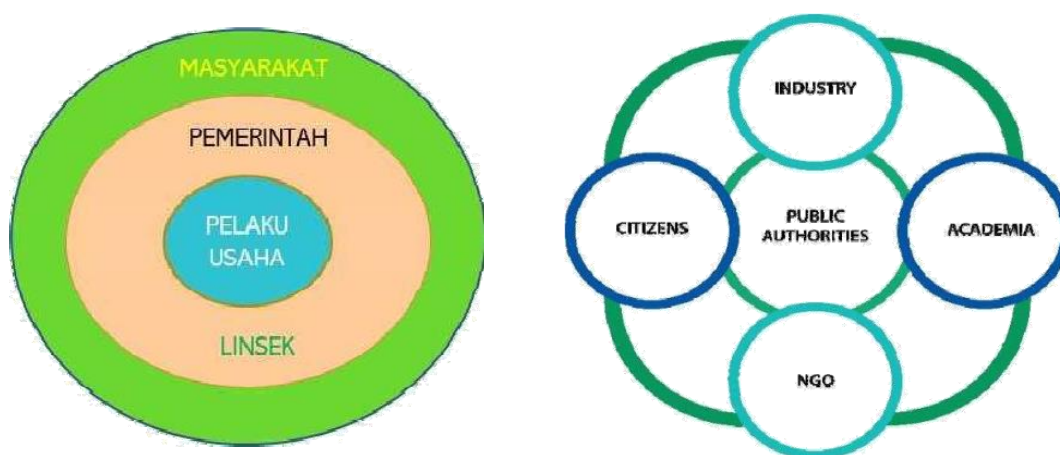
##### **Misi Badan POM :**

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BBPOM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BBPOM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BBPOM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 2.1.1. Tiga Pilar dan Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

## 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BBPOM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

### 3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

#### a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. BBPOM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke BPOM.

#### b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BBPOM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar

melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

**c. Pengujian Secara Laboratorium**

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

**d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

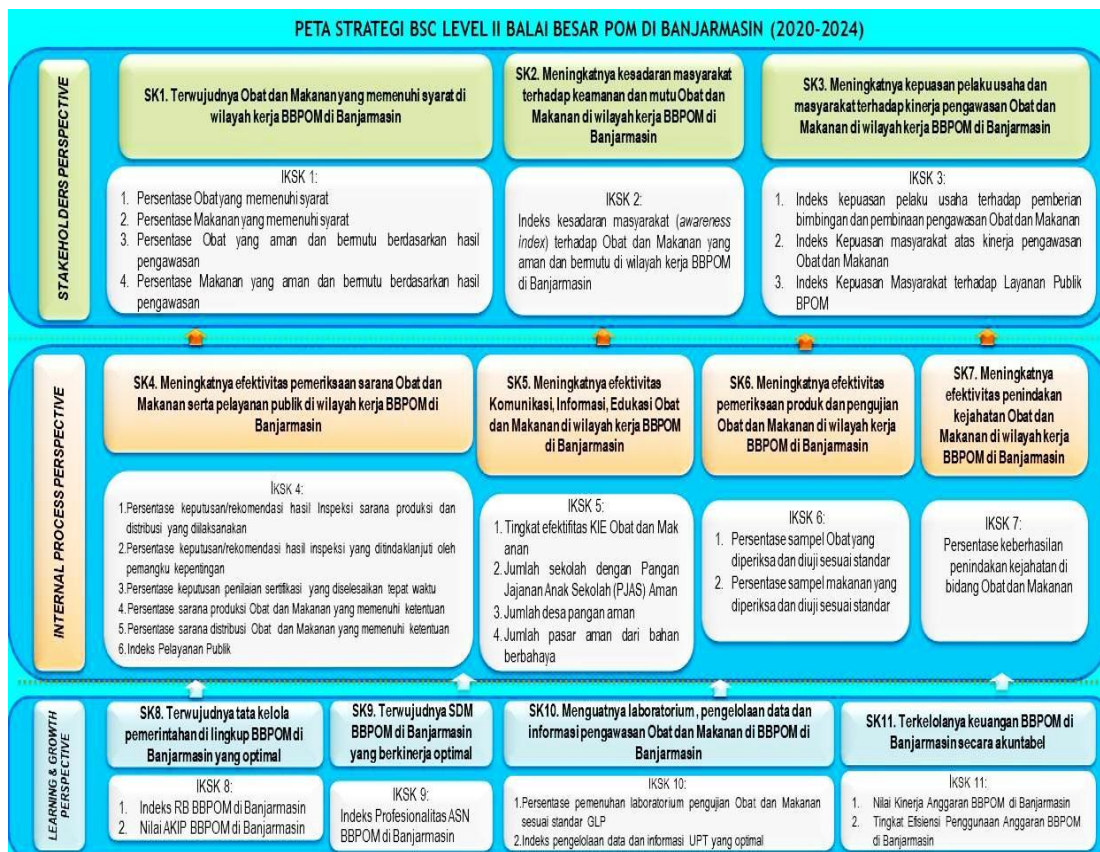
**4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

## 2.2. Sasaran Strategis BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II BBPOM di Banjarmasin.

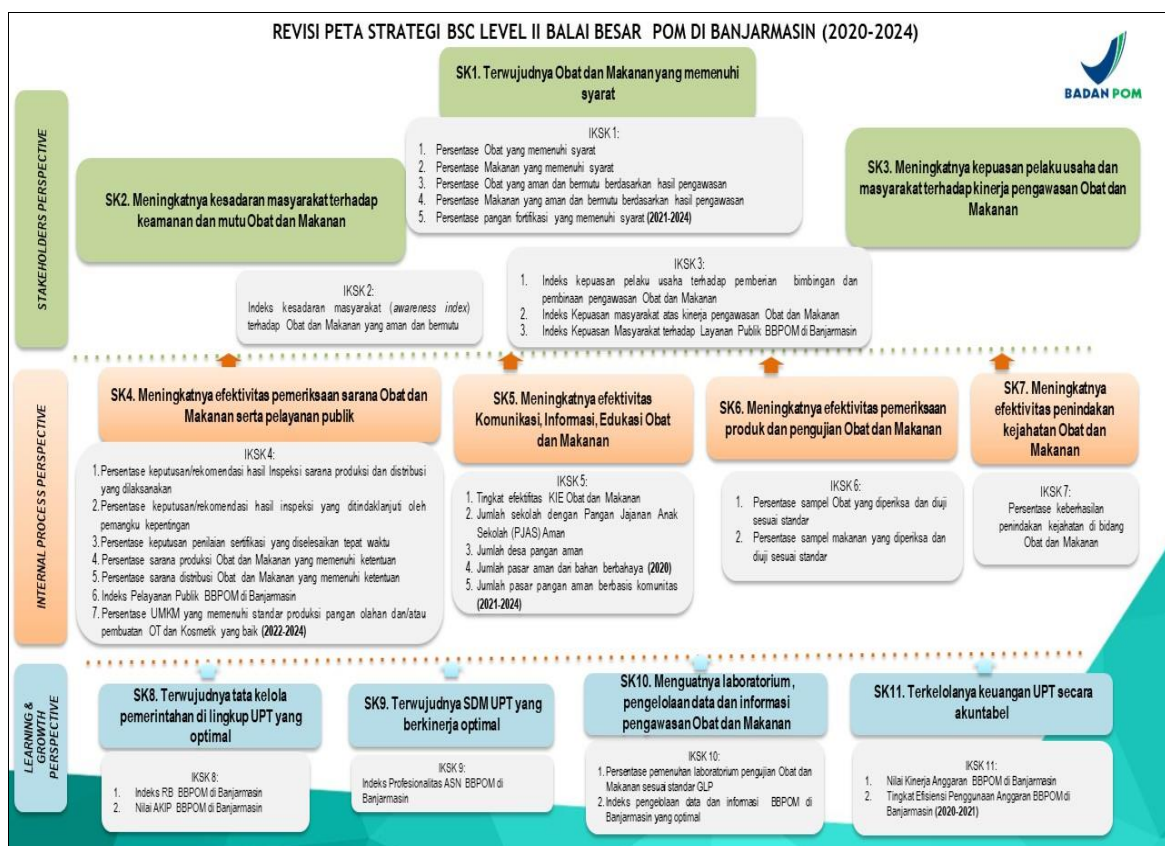
Berdasarkan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



**Gambar 2.2.1. Peta Strategis Level II BBPOM di Banjarmasin**

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar 2.2.2. Peta Strategis Level II Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya  
berdasarkan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-  
2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stake holder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IKSK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)</li> <li>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)</li> </ul>
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 6.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning &amp; Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
IKSK 11.2			Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)	

**Tabel 2.2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II BBPOM di Banjarmasin**

## 1. ***Stakeholder Perspective:***

### a. **Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83% di tahun 2024.**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76% di tahun 2024.**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 86,7% di tahun 2024.**
- 5) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Banjarmasin yaitu: "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

**b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

### **c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,6 di akhir tahun 2024.**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 85,01 di akhir tahun 2024.**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

## ***2. Internal Process Perspective:***

### **a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban

BBPOM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60% di tahun 2024.**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.**
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.**
- 7) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

## **b. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 100 di akhir tahun 2024.**
- 3) Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 di akhir tahun 2024.**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 10 di akhir tahun 2024**

## **c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Banjarmasin**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**

#### **d.Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96% di tahun 2024.**

### **3. Learning and Growth Perspective:**

#### **a. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin, dengan target 88,3 pada akhir 2024.**
- 2) Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin, dengan target 84,1 pada akhir 2024.**

#### **b.Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin, dengan target 84 di tahun 2024.**

### **c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 88% di tahun 2024.**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

### **d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola

anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95,5 di tahun 2024.
- 2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, dengan target sebesar 92% di tahun 2021.

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Reviu Rensra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Stake holder</b>	SK 1	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	93
	SK 2	2.1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
	SK 3	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	80,56
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin	91
	<b>Internal Process</b>	SK 4	4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2			Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
4.3			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		4.6	Indeks Pelayanan Publik	4,01
	SK 5	5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	77
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	91,8
		5.3	Jumlah desa pangan aman	60 (100%)
		5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	19 (100%)
	SK 6	6.1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	6 (100%)
		6.2	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin	100
	SK 7	7.1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100
	<b>Learning and Growth</b>	SK 8	8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
8.2			Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	83,3
SK 9		9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	80,1
SK 10		10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	78
SK 11		11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	2,25

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	48.561.112.000
2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	13.651.728.000
	<b>Jumlah</b>	<b>62.212.840.000</b>

**Tabel 2.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

### 2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020	Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50	Baik	90 - <110
Kurang	50 - <70	Sangat Baik	110 - 120
Cukup	70 - <90	Tidak dapat disimpulkan	> 120

Tabel 2.3.1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

### 2.4. Pengukuran efisiensi kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

#### Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila TE < 0 atau TE > 1

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target-target sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja .

Dalam menganalisa capaian kinerja untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi di triwulan I tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2019 dan 2020, dan membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 dengan target nasional 2022, target BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 sebagai tahun yang akan dijalani dan tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, Pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Nilai Pencapaian Strategis NPS total 90,72 dengan kriteria Baik.

No.	Perspektif	Nilai	Kriteria
1	<i>Stakeholder</i>	80,69	Cukup
2	<i>Internal Process</i>	78,58	Cukup
3	<i>Learning and Growth</i>	112,89	Sangat Baik
	<b>NPS</b>	<b>90,72</b>	<b>Baik</b>

**Tabel 3.1.1. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif Triwulan I Tahun 2022**

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Keegiatannya masing-masing, yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
<b>A</b>	<b><i>Perspektif Stakeholder</i></b>		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	80,69	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
	<b>NPS Perspektif <i>Stakeholder</i></b>	<b>80,69</b>	
<b>B</b>	<b><i>Perspektif Internal Process</i></b>		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	89,24	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	69,23	Kurang
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	120	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	35,85	Sangat Kurang
	<b>NPS Perspektif <i>Internal Process</i></b>	<b>78,58</b>	<b>Cukup</b>

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
<b>C</b>	<b><i>Perspektif Learn and Growth</i></b>		
<b>8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	<b>Belum Dinilai</b>
<b>9</b>	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	-	<b>Belum Dinilai</b>
<b>10</b>	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	105,78	<b>Baik</b>
<b>11</b>	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	120	<b>Sangat Baik</b>
	<b>NPS Perspektif <i>Learn and Growth</i></b>	<b>112,89</b>	<b>Sangat Baik</b>
	<b>NPS Total</b>	<b>90,72</b>	<b>Baik</b>

**Tabel 3.1.2. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan Tahun 2021**

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Indikator Kinerja masing-masing, sebagai mana tabel pada lampiran dalam laporan ini. Dalam tabel tersebut telah dilakukan penyesuaian hasil perhitungan NPS dengan batas tertinggi NPS adalah 120%, namun pada tahun 2021 ini tidak terdapat capaian Indikator Kinerja yang melebihi 120%.

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) BBPOM di Banjarmasin sebagaimana tersebut di atas belum optimal dan masih jauh dari kriteria yang diharapkan yaitu Sangat Baik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat dari analisis akuntabilitas kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2021.

### **3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dan saling berhubungan. Dalam pelaksanaannya, Renstra akan

dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan untuk waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang mengacu kepada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) BBPOM di Banjarmasin (level 2) yang diturunkan dari Sasaran Strategis (SS) level 0 Kepala Badan POM, dimana pada tiap Sasaran Kegiatan terdapat satu atau lebih Indikator Kinerja, dengan jumlah seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan.

Pada triwulan I tahun 2022, capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TWI	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
<b>Stakeholder Perspective</b>							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83	73,38	88,41	<b>Cukup</b>
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	84,00	103,70	<b>Baik</b>
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	100,00	138,89	<b>TDD</b>
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	78,57	91,36	<b>Baik</b>
		1.5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	93	0	0,00	<b>Sangat Kurang</b>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target TWI	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat & Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	2.1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum dinilai
		3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum dinilai
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum dinilai
<b>Internal Process Perspective</b>							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	92,98	112,02	Sangat Baik
		4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	62	17,50	28,23	Sangat Kurang
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100	95,42	95,42	Baik
		4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	41,18	82,35	Cukup
		4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	66	73,21	110,93	Sangat Baik
		4.6	Indeks Pelayanan Publik	-	-		Belum dinilai
		4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	34,43	36,67	106,51	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target TWI	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,80	95,85	104,41	Baik
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20%	10,00%	50,00	Kurang
		5.3	Jumlah desa pangan aman	20%	12,5%	62,50	Kurang
		5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25%	15,00%	60,00	Kurang
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	38,10	152,40	TDD
		6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	30,24	120,96	TDD
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	7.1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	33,00	11,83	35,85	Sangat Kurang
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Baik
		8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Baik
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	Baik
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2,25	2,38	105,78	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	46,55	68,65	147,48	Baik

*TDD = Tidak Dapat Disimpulkan*

**Tabel 3. 1 Capaian Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022**

Berdasarkan data pada tabel diatas Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

### Sasaran Kegiatan 1 :

### Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kerjanya sebagai berikut :

#### Indikator Kinerja 1.1. :

#### Persentase Obat yang memenuhi syarat

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
83	73,38	88,41	Cukup

Tabel 3.2.1.1.1. Realisasi Kinerja IK.1.1 Tahun 2021

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS s. d Triwulan } n}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji s. d. Triwulan } n} \times 100$$

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya) ;
- 2) Produk kedaluarsa ;
- 3) Produk rusak ;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	80,8	83,6	86,6	90	92,3
<b>Menjadi</b>	80,8	82	83	84	85
<b>Realisasi</b>	78,05	78,30	-	-	-

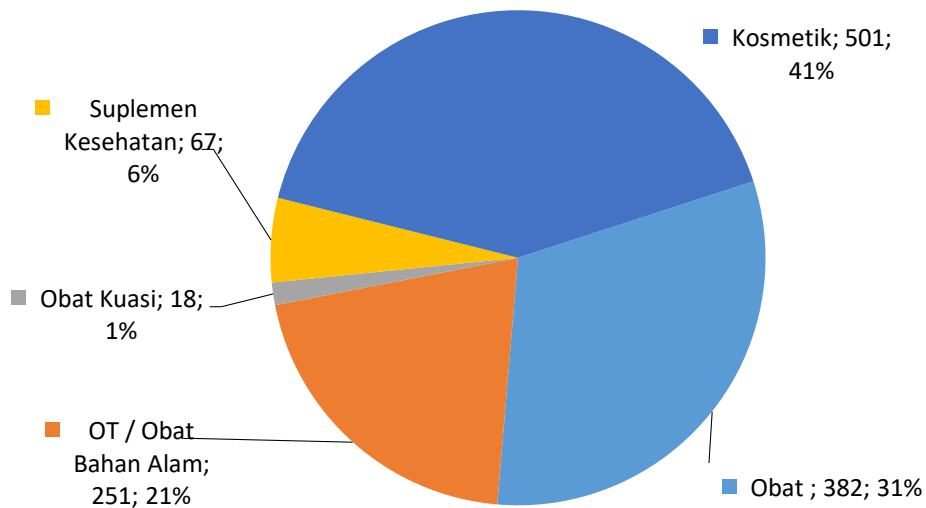
**Tabel 3.2.1.1.2. Perubahan Target IK 1.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
83	83	83	83	83	83
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
83	83	83	83	83	83

**Tabel 3.2.1.1.2. Target Bulanan IK 1.1.**

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Obat Acak pada BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.219 sampel, dengan perincian per komoditi :



**Grafik 3.2.1.1.1. Komposisi Sampel Obat Acak Tahun 2022**

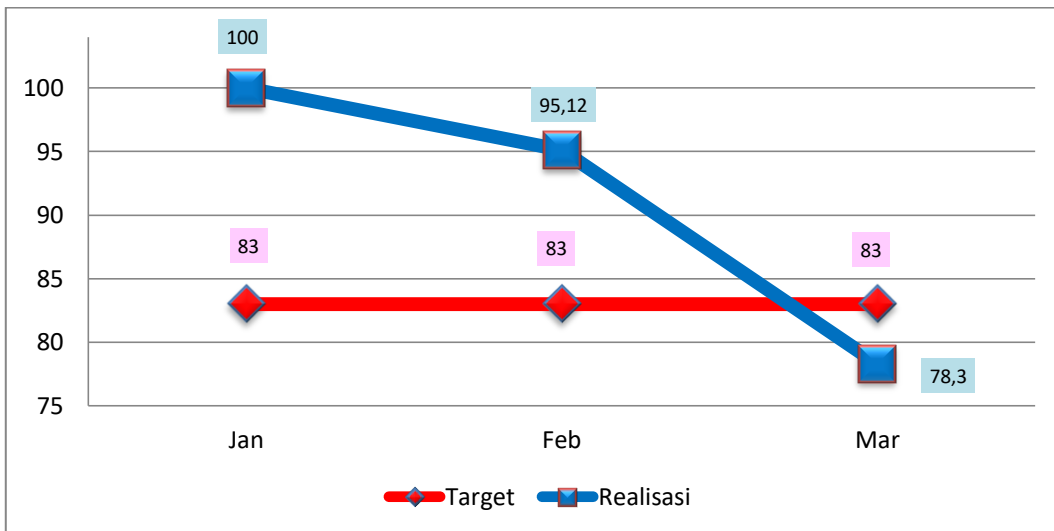
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022, diperoleh data jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 154 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 113 sampel atau 73,383%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 12,63% dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.219 sampel, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	42	42	100,00
b.	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	49	46	93,88
c.	Obat Kuasi	0	0	-
d.	Suplemen Kesehatan	12	10	83,33
e.	Kosmetik	51	15	29,41
	Jumlah seluruhnya	154	113	73,38

**Tabel 3.2.1.1.3 Sampel Obat Acak per Komoditi Triwulan I Tahun 2021**

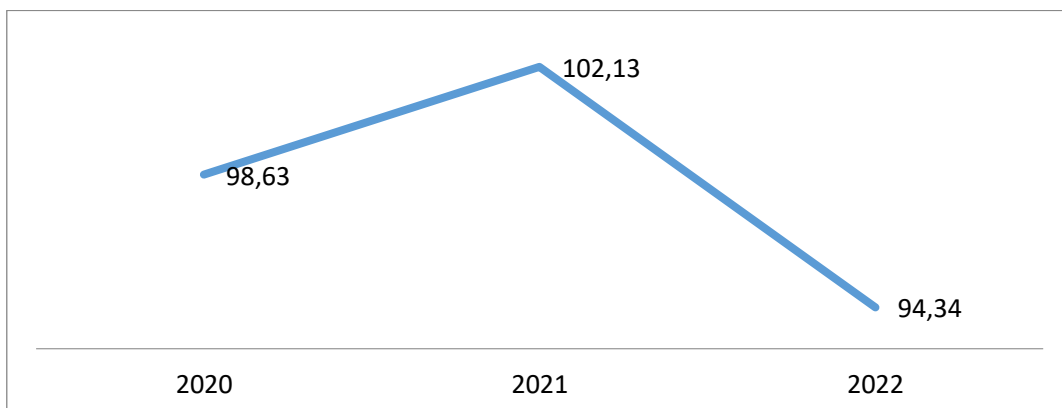
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 4 komoditi Sampel Obat Acak, Kosmetik menyumbang persentase sampel MS terendah (56.77%) sehingga tidak dapat mencapai target IKU.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



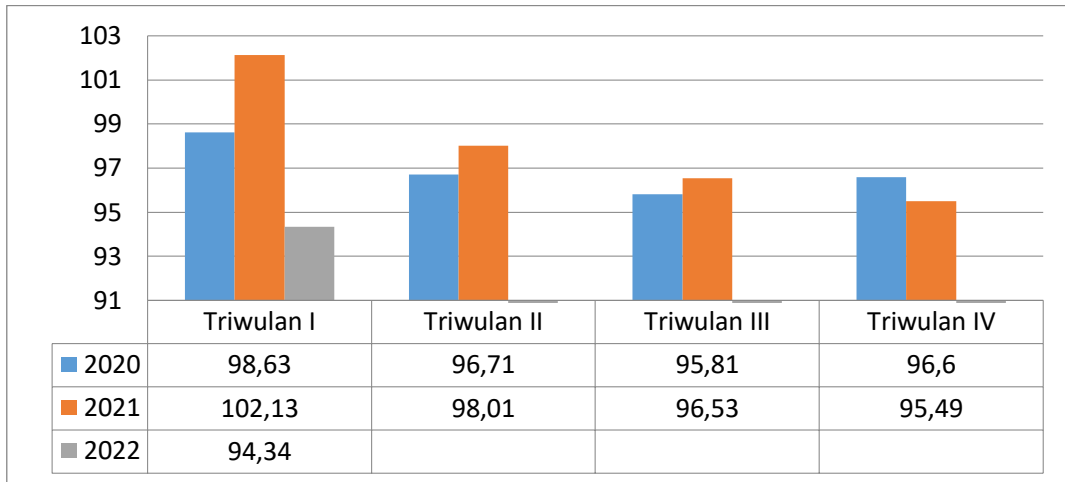
**Grafik 3.2.1.1.2. Realisasi Kinerja IK.1.1 Pertriwulan Tahun 2021.**

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.1. Tahun 2020-2021**

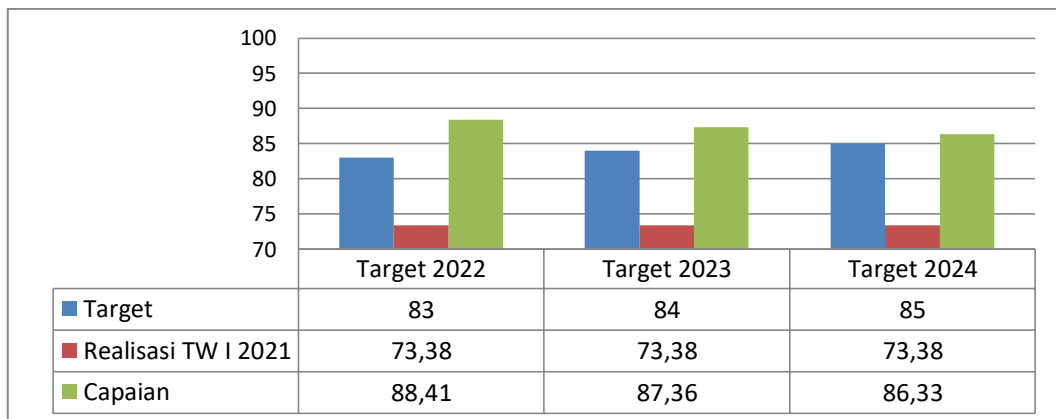
Dan apabila capaian tiap triwulan tahun 2022 disandingkan dengan capaian tiap triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.1. Tahun 2020-2021**

Dapat terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022 dibanding triwulan I tahun 2020 dan 2021 karena adanya kriteria baru sebagai penyebut (bilangan pembagi) yaitu sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.1 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024**

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 85%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 86,33% dengan kriteria “cukup”,

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 409.580.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 92.143.000,- atau 22,5%. Dari data tersebut indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 3,93 dengan tingkat efisiensi sebesar 2,93 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 75% (**Tidak Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
88,41 %	22,50 %	3,93	2,93	75%	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.1.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.1. Triwulan I Tahun 2022**

## Indikator Kinerja 1.2 :

### Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
81	84,00	103,70	Baik

Tabel 3.2.1.2.1. Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan I Tahun 2022

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar sesuai dengan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi i:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Tahap pemeriksaan hasil sampling produk Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Makanan yang memenuhi syarat, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	78	80	82	84	86
<b>Menjadi</b>	78	80	81	82	83
<b>Realisasi</b>	81,54	84,86	-	-	-

**Tabel 3.2.1.2.2. Perubahan Target IK 1.2.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

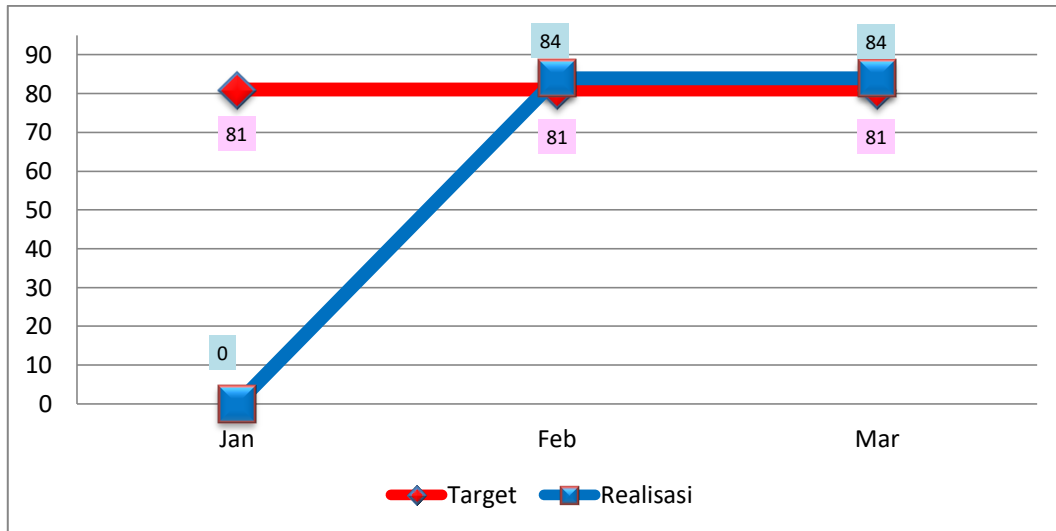
Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
81	81	81	81	81	81
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
81	81	81	81	81	81

**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 1.2.**

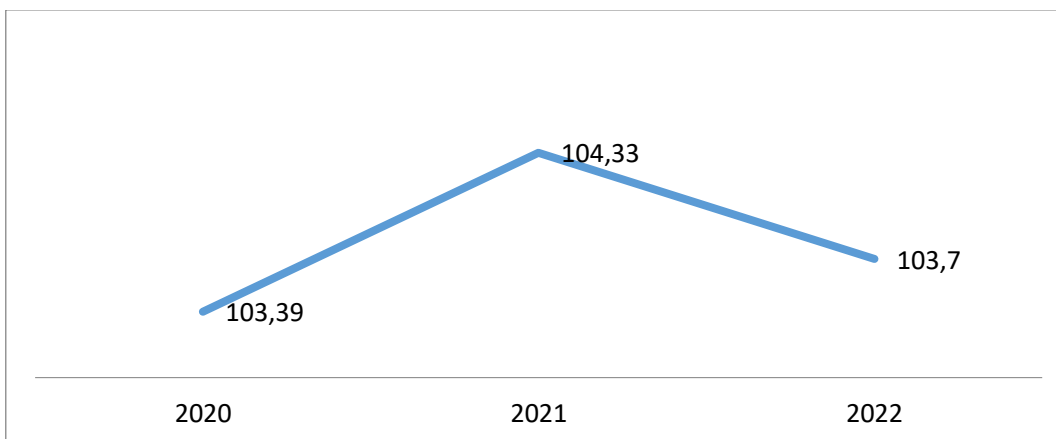
Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021, diperoleh data jumlah sampel yang Memenuhi Syarat adalah 42 sampel dari 50 Sampel yang diperiksa dan diuji atau 84%, tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian baru mencapai 9,43% dari target Sampel Makanan Acak yaitu 530 sampel.

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



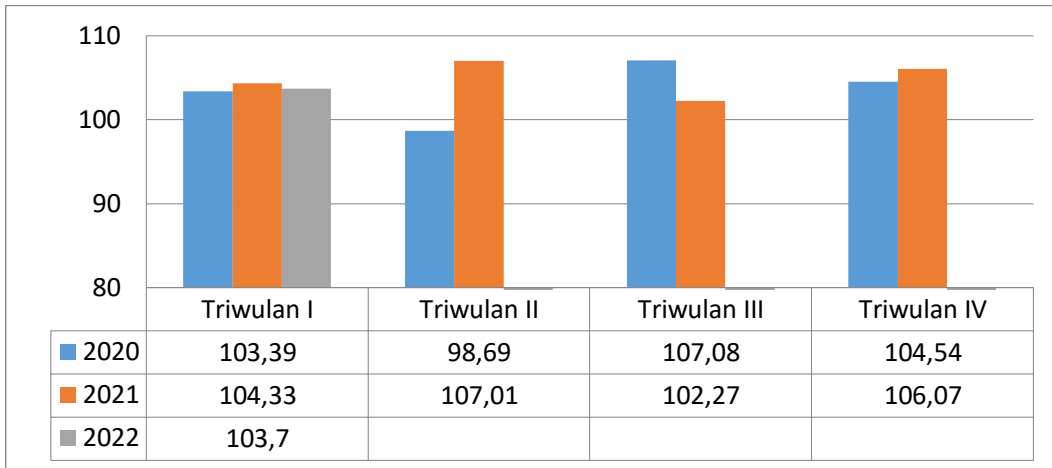
**Grafik 3.2.1.2.2. Realisasi Kinerja IK.1.2 Pertriwulan Tahun 2022.**

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.2. Triwulan I Tahun 2020-2022**

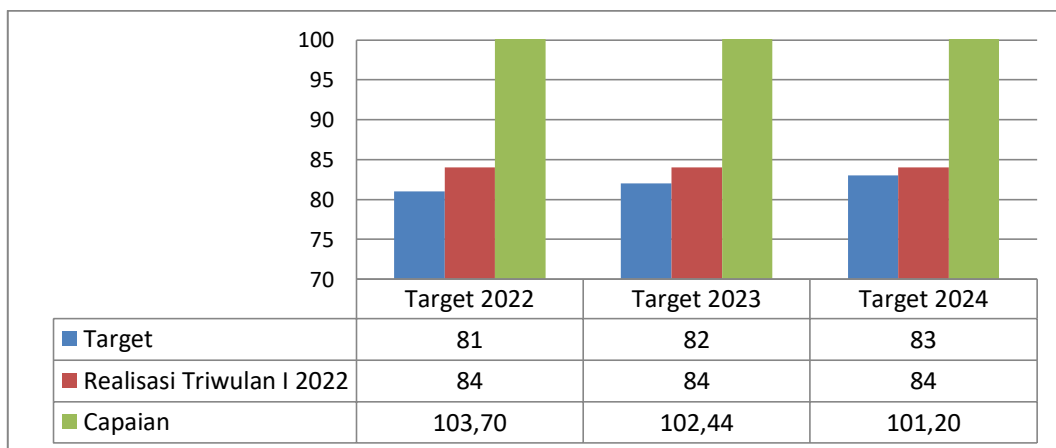
Dan apabila capaian tiap triwulan tahun 2022 disandingkan dengan capaian tiap triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.2 Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibanding triwulan I tahun 2021, dari capaian sebesar 104,33% menjadi 103,7 %.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 254.176.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 12.598.904,- atau 4,96% , dicapai indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 20,92 dengan tingkat efisiensi sebesar 19,92 sehingga capaian efisiensi pada triwulan I tahun 2022 sebesar 75% **(Tidak Efisien)**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
103,7%	22,5 %	20,92	19,92	75%	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.1.2.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.2. Triwulan I Tahun 2022**

### Indikator Kinerja 1.3 :

#### Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
72	100	138,89	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.2.1.3.1. Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan I Tahun 2022

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Obat Aman} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara targeted/*purposive*. Yang dimaksud dengan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/*purposive* di tahun berjalan.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana

Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	94	85	94	95	95
<b>Menjadi</b>	94	70	72	74	76
<b>Realisasi</b>	68,77	76,6	-	-	-

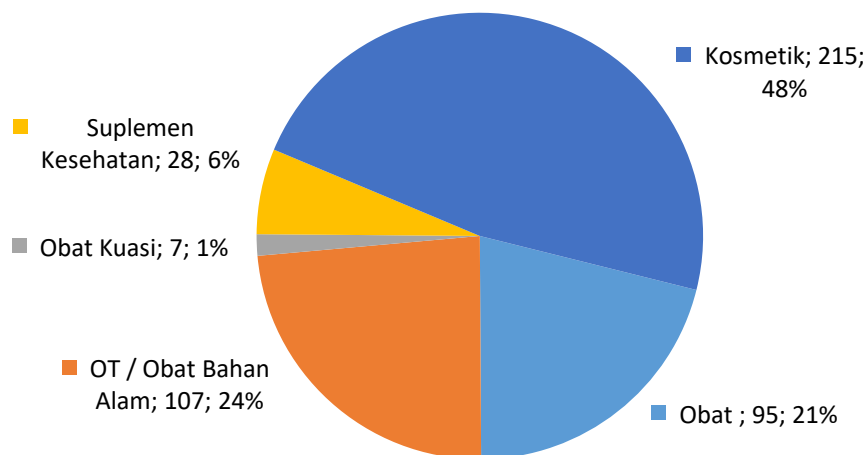
**Tabel 3.2.1.3.2. Perubahan Target IK 1.3.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
72	72	72	72	72	72
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
72	72	72	72	72	72

**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 1.3.**

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Obat *Targetted* pada BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 452 sampel, dengan perincian per komoditi :



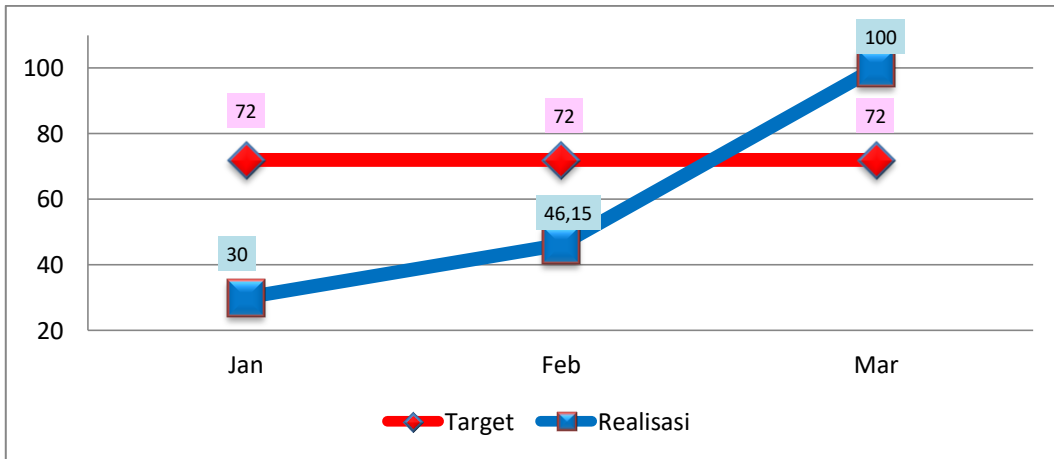
**Grafik 3.2.1.3.1. Komposisi Sampel Obat *Targetted* Tahun 2021**

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulanan tahun 2021, diperoleh data Jumlah Sampel Obat *Targetted* yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 568 sampel dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 432 sampel atau 76,06%, dari data tersebut tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 568 sampel, sudah mencapai 100,53% dari target Sampel Obat *Targetted* yaitu 565 sampel, yang terdiri dari :

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	13	13	100
b.	Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	14	14	100
c.	Obat Kuasi	0	0	0
d.	Suplemen Kesehatan	0	0	0
e.	Kosmetik	0	0	0
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

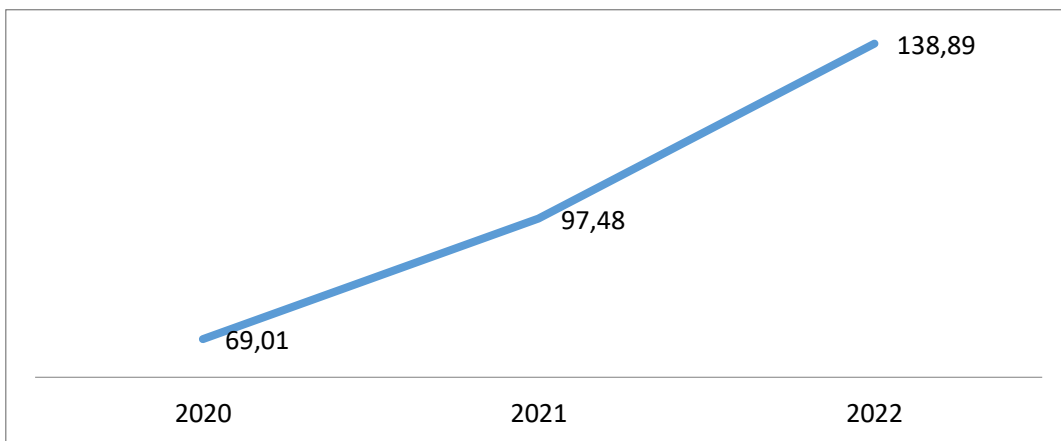
**Tabel 3.2.1.3.3 Sampel Obat *Targetted* per Komoditi Tahun 2022**

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



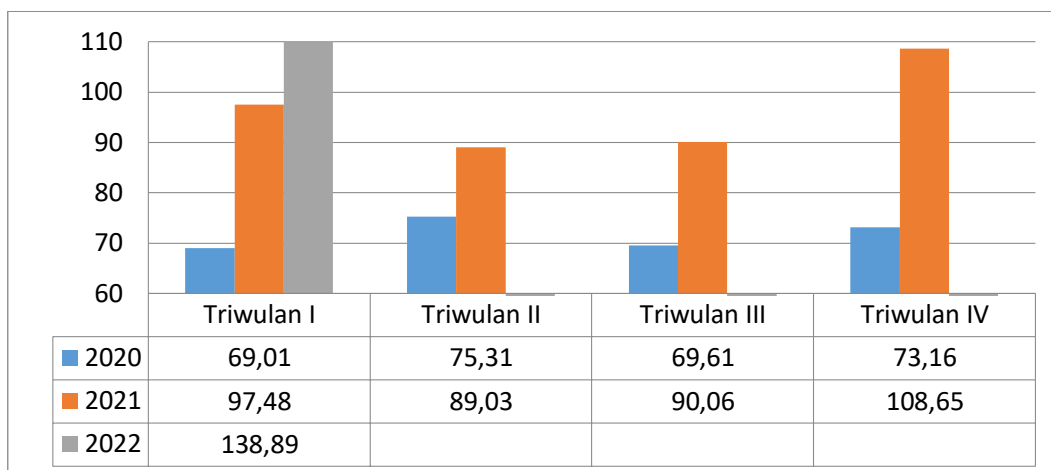
**Grafik 3.2.1.3.2. Realisasi Kinerja IK.1.3 Pertriwulan Tahun 2022**

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3. Triwulan I Tahun 2020-2022**

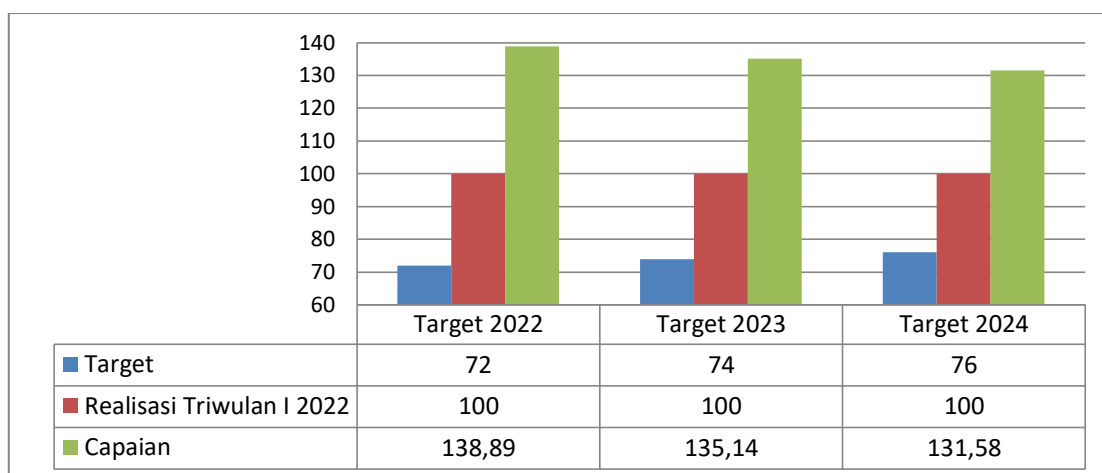
Dan apabila capaian tiap triwulan tahun 2022 disandingkan dengan capaian tiap triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3. Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan pada triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 dan 2021.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2022, pada triwulan IV tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 409.580.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 92.143.000,- atau 22,5%. Dari data tersebut indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 6,17 dengan tingkat efisiensi sebesar 5,17 sehingga capaian efisiensi pada triwulan I tahun 2022 sebesar 75% (**Tidak Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
138,89%	22,5 %	6,17	5,17	75%	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.1.3.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.3. Triwulan I Tahun 2022**

#### Indikator Kinerja 1.4 :

#### Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
86	78,57	91,36	Baik

Tabel 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan I Tahun 2021

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus:

*% Makanan Aman*

$$= \frac{\text{Jumlah Makanan Targeted MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Makanan Targeted Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang dimaksud dengan aman dan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	85	86	87	88	89
<b>Menjadi</b>	85	85,5	86	86,5	86,7
<b>Realisasi</b>	68,77	89,12	-	-	-

**Tabel 3.2.1.4.2. Perubahan Target IK 1.4.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

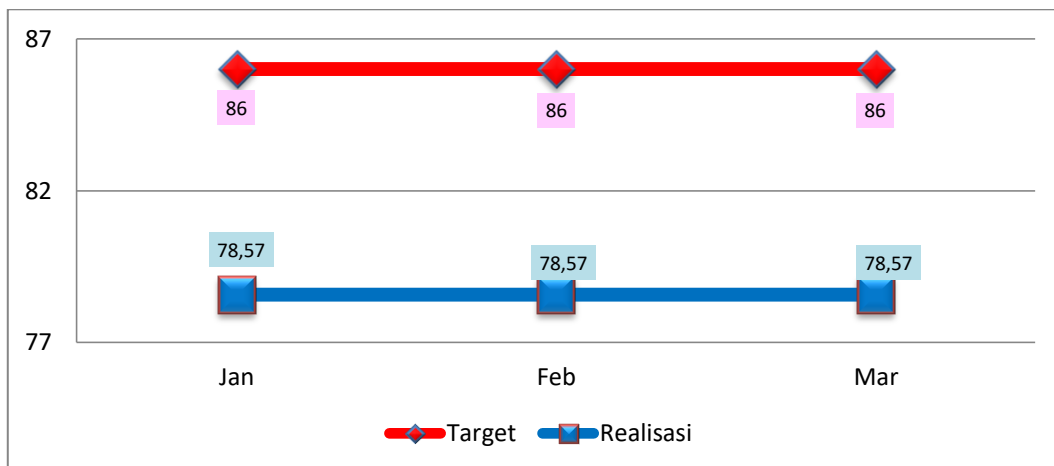
Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
86	86	86	86	86	86
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
86	86	86	86	86	86

**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 1.4.**

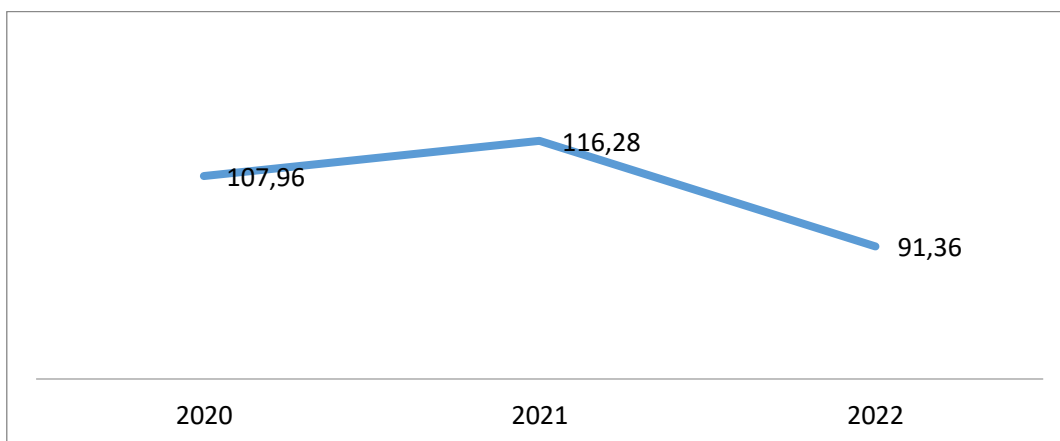
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan I tahun 2022, diperoleh data Sampel Makanan Targetted yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 14 sampel dengan hasil Menenuhi Syarat sebanyak 78,57% atau 11 sampel. Dari data tersebut tergambar bahwa pelaksanaan sampling dan pengujian sampel baru mencapai 10,45% dari target Sampel Makanan *targetted* yaitu 134 sampel.

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



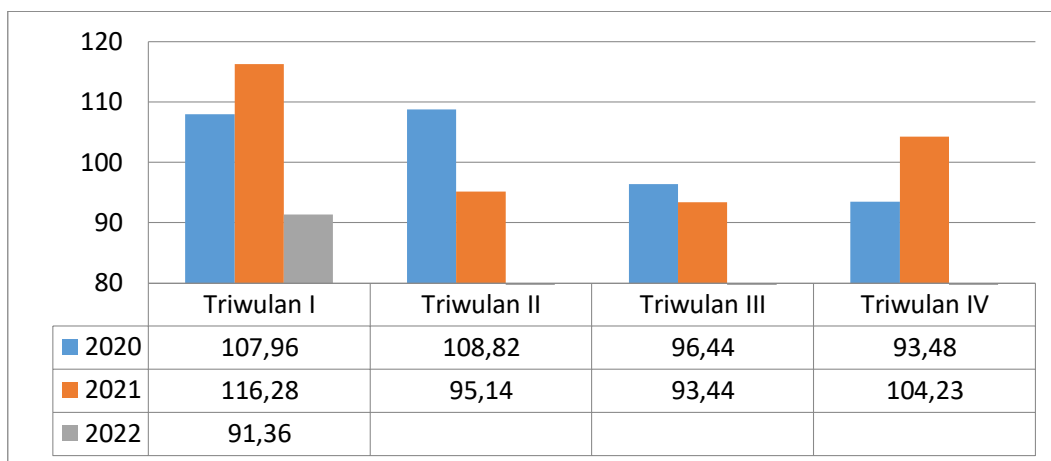
**Grafik 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2021**

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3. Triwulan I Tahun 2020-2022**

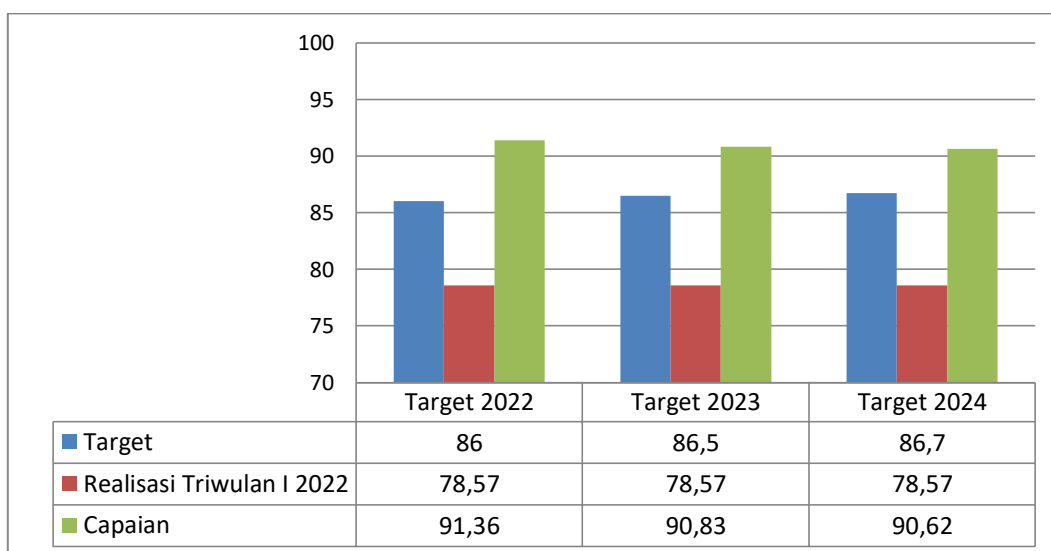
Apabila capaian kinerja per triwulan tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja per triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.4. Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022 dibanding triwulan I tahun 2020 dan 2021.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.275.770.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.15.147.896,- atau 5,49% , dicapai indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 16,63 dengan tingkat efisiensi sebesar 15,63 sehingga capaian efisiensi triwulan I tahun 2022 sebesar 75% (**Tidak fisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
91,36%	5,49 %	16,63	15,63	75%	<b>Tidak fisien</b>

**Tabel 3.2.1.4.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.4. Tahun 2021**

### Indikator Kinerja 1.5 :

#### Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
93	0	0	Sangat Kurang

Tabel 3.2.1.5.1. Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan I Tahun 2021

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

% Pangan Fortifikasi MS

$$= \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator yang baru dimunculkan tersendiri di tahun 2021, yang sebelumnya masih dihitung sebagai IKU Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat.

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Reviu Renstra 2020-2024	-	92,3	93	94	95
Realisasi	-	91,25	-	-	-

Tabel 3.2.1.5.2. Perubahan Target IK 1.5.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

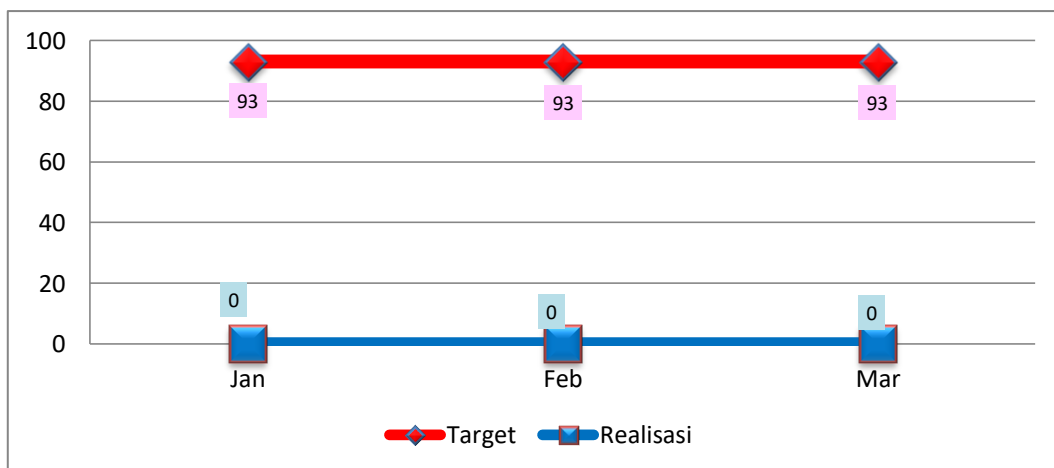
<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
93	93	93	93	93	93
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
93	93	93	93	93	93

**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 1.4.**

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Pangan Fortifikasi pada BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 108 sampel

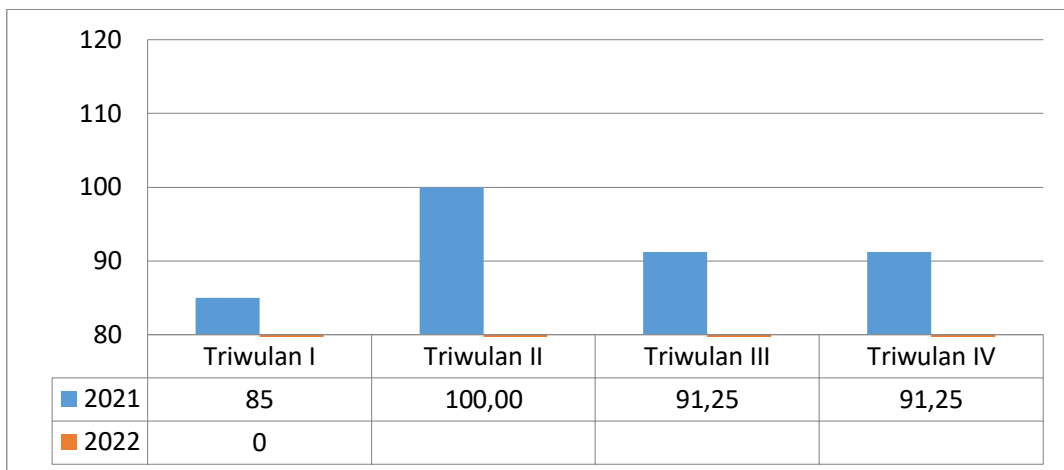
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2022, diperoleh data Jumlah sampel Pangan Fortifikasi yang disampling sebanyak 35 sampel, namun belum ada yang selesai Diperiksa dan Diuji.

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



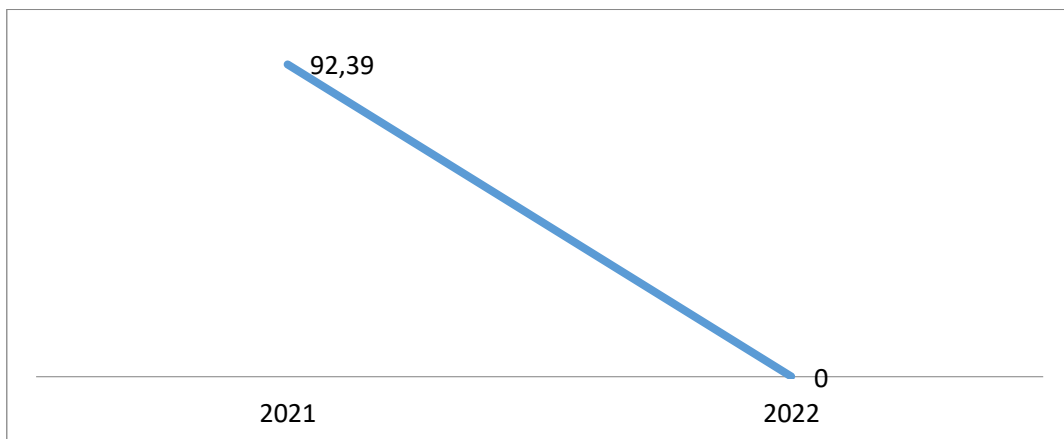
**Grafik 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2021**

Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat merupakan turunan dari indikator kinerja persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSK 1.4) tahun 2020, sehingga dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi dan capaian tahun 2021, sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.5. Tahun 2021**

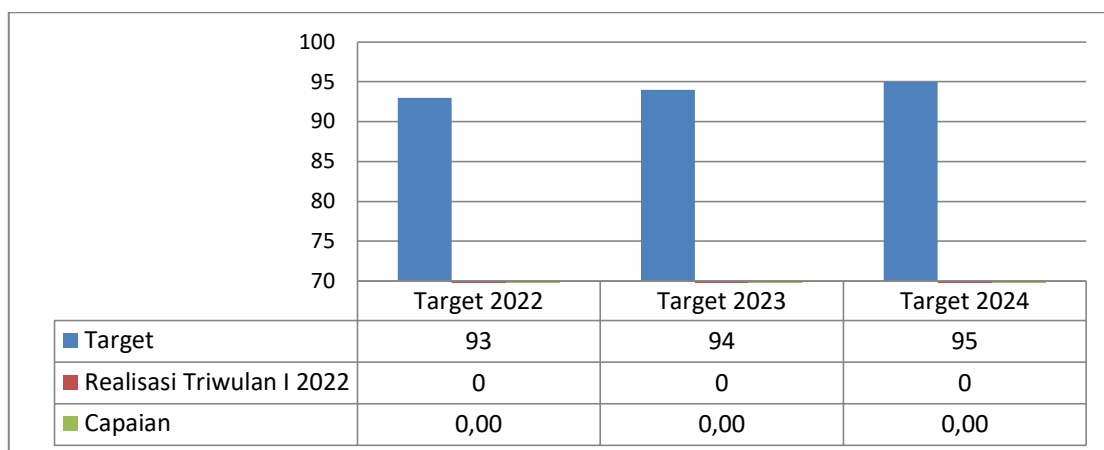
Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3. Triwulan I Tahun 2021-2022**

Dari Grafik tersebut terlihat indikator kinerja persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2022 memiliki capaian yang jauh lebih rendah dibanding triwulan I tahun 2021.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.13.700.800,- dengan serapan sebesar Rp.13.688.480,- atau 99,91%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
99,18%	99,91 %	0,99	-0,01	75%	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.1.5.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.5. Tahun 2021**

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,01 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 75% (**Tidak Efisien**).

## Sasaran Kegiatan 2 :

### Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

#### Indikator Kinerja 2.1 :

#### Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
81	79,08	97,63 %	-

Tabel 3.2.2.1.1. Realisasi Kinerja IK.2.1 Tahun 2021

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

**Kesadaran (*Awareness*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "pengetahuan" dari masyarakat. **Ketertarikan (*Interest*)** bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. **Keinginan (*Desire*)** bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. **Tindakan (*Action*)** bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "**perilaku**" dari masyarakat.

Pengukuran indikator kinerja digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana sistem pengawasan Obat dan Makanan efektif dilakukan. Pengukuran dilakukan terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait bagaimana cara memilih produk Obat dan Makanan sebelum digunakan.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	68	71	74	78	81
<b>Menjadi</b>	68	81	84	86	89
<b>Realisasi</b>	78,36	79,08	-	-	-

**Tabel 3.2.2.1.2. Perubahan Target IK 2.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 21.637.656,- dari pagu Rp. 211.252.900,- atau 10,24%. Penyerapan anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja yang belum dilakukan penilaian, maka menghasilkan indeks efisiensi 0 dengan Tingkat Efisiensi -1 dan Capaian Tingkat Efisiensi 75% atau **Tidak Efisien.**

### Sasaran Kegiatan 3 :

#### Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

#### Indikator Kinerja 3.1 :

#### Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
-	-	-	-

Tabel 3.2.3.1.1. Realisasi Kinerja IK.3.1 Triwulan I Tahun 2021

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 21.637.656,- dari pagu Rp. 211.252.900,- atau 10,24%. Penyerapan anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja yang belum dilakukan penilaian, maka menghasilkan indeks efisiensi 0 dengan Tingkat Efisiensi -1 dan Capaian Tingkat Efisiensi 75% atau **Tidak Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
-	10,24 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.3.1.4 Efisiensi Anggaran IK.3.1 Triwulan I Tahun 2021

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	86	87,5	89	90.5	92
<b>Menjadi</b>	86	91.1	92.3	93.4	94.6
<b>Realisasi</b>	96,35	92,30	-	-	-

**Tabel 3.2.3.1.2. Perubahan Target IK 3.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

### Indikator Kinerja 3.2 :

#### Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
-	-	-	-

**Tabel 3.2.3.2.1. Realisasi Kinerja IK.3.2 Tahun 2021**

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 169.580.711,- dari pagu Rp. 1.835.450.400,- atau 9,24%. Penyerapan anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja yang belum dilakukan penilaian, maka menghasilkan indeks efisiensi 0 dengan Tingkat Efisiensi -1 dan Capaian Tingkat Efisiensi 75% atau **Tidak Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
-	9,24 %	0	-1	75%	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.3.2.4 Efisiensi Anggaran IK.3.2 Triwulan I Tahun 2021**

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	72	75	77	80	83
<b>Menjadi</b>	72	78.33	80.56	82.78	85.01
<b>Realisasi</b>	76,11	73,03	-	-	-

**Tabel 3.2.3.2.2. Perubahan Target IK 3.2.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

### Indikator Kinerja 3.3 :

#### Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
-	-	-	-

Tabel 3.2.3.3.1. Realisasi Kinerja IK.3.3 Tahun 2021

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 121.000.955,- dari pagu Rp. 7.979.296.300,- atau 1,52%. Penyerapan anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja yang belum dilakukan penilaian, maka menghasilkan indeks efisiensi 0 dengan Tingkat Efisiensi -1 dan Capaian Tingkat Efisiensi 75% atau **Tidak Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
-	1,52 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	88,5	90,55	91	91.5	92
<b>Menjadi</b>	89,18	90	91	91,5	92
<b>Realisasi</b>	89,18	91,83	-	-	-

**Tabel 3.2.3.3.2. Perubahan Target IK 3.3.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

#### **Sasaran Kegiatan 4 :**

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

#### **Indikator Kinerja 4.1 :**

**Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

<b>Target Triwulan I 2022</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
83	92,98	112,02	<b>Sangat Baik</b>

**Tabel 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.1 Tahun 2021**

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi, dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- A. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- B. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- C. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat;
- D. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4***

**A =** *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

**B =** *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*

**C =** *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yg diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

**D =** *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	87	89	91	93	95
<b>Menjadi</b>	87	82	83	85	87
<b>Realisasi</b>	81,64	92,4			

**Tabel 3.2.4.1.2. Perubahan Target IK 4.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
83	83	83	83	83	83
Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
83	83	83	83	83	83

**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 4.1.**

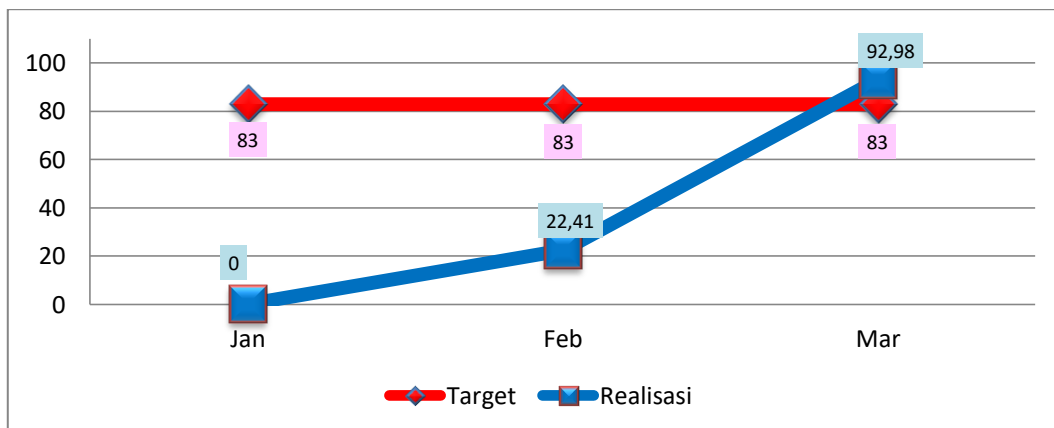
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I (Januari, Februari dan Maret) tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Jenis Rekomendasi	Realisasi								
	Januari		Februari		Maret		Jumlah		
	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	%TL
A	8	0	21	13	28	36	57	49	85,96
B	3	0	3	0	2	8	8	8	100
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JLH</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>183</b>	<b>99</b>	
<b>Rata-rata</b>									<b>92,98</b>

**Tabel 3.2.4.1.1 Realisasi Kinerja IKSK.4.1 Triwulan I Tahun 2021**

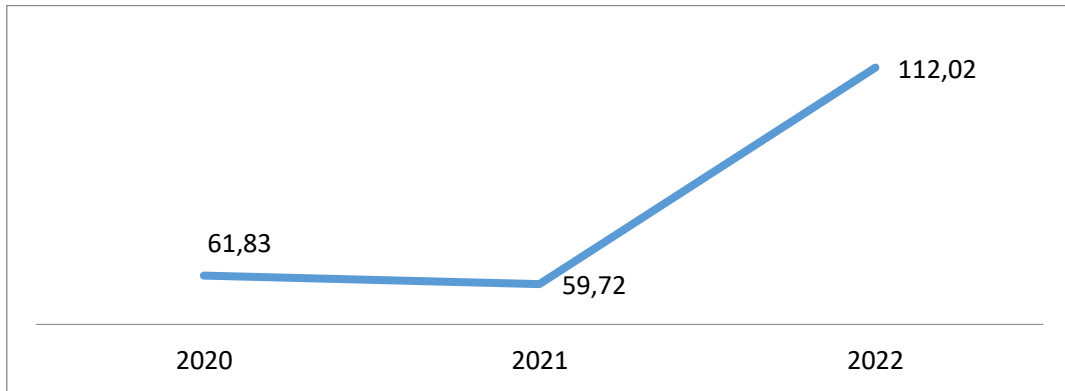
Pada triwulan I tahun 2022, Balai Besar POM di Banjarmasin telah menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 57 keputusan/ rekomendasi dari 65 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Rasio keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin triwulan I tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 112,02 % dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



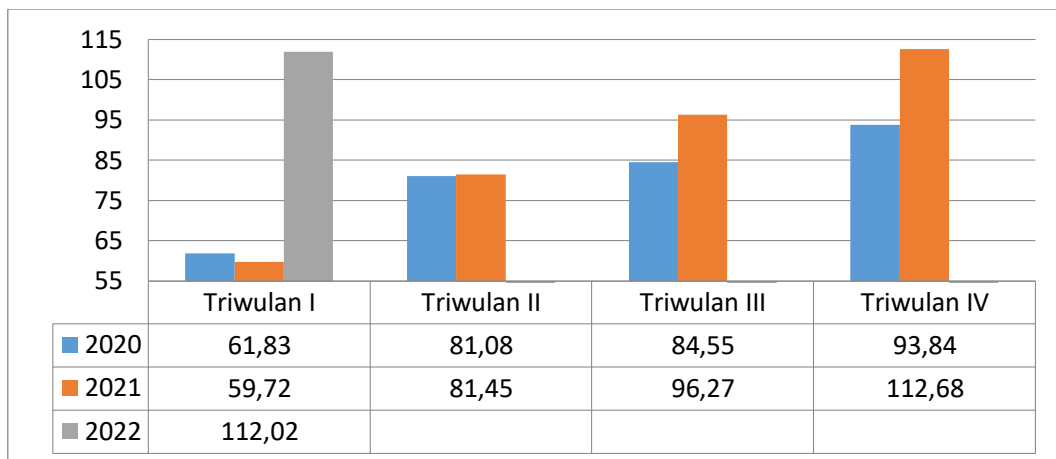
**Grafik 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.1 Pertriwulan Tahun 2021**

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.1. Triwulan I Tahun 2020-2022**

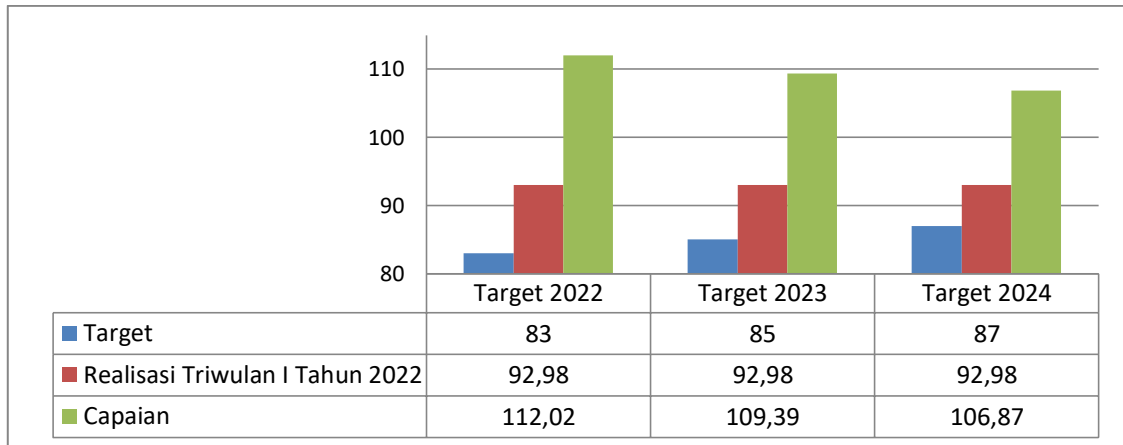
Apabila capaian kinerja per triwulan tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja per triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.4. Tahun 2020-2022**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022 dibanding triwulan I tahun 2020 dan 2021.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.1 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.7.004.140,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.190.945.800,- atau 5,49% , dicapai indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 30,54 dengan tingkat efisiensi sebesar 29,54 sehingga capaian efisiensi triwulan I tahun 2022 sebesar 75% (**Tidak efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
112,02	3,67	30,54	29,54	<b>75%</b>	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.4.1.3 Efisiensi Anggaran IK.4.1 Triwulan I Tahun 2022**

#### Indikator Kinerja 4.2 :

**Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
62	17,50	28,23	Sangat Kurang

**Tabel 3.2.4.2.1. Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan I Tahun 2022**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder =  $(A+B)/2$**

**A =** *(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

**B =** *(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	55	60	65	70	75
<b>Menjadi</b>	55	60	62	65	70
<b>Realisasi</b>	53,52	71,79	-	-	-

**Tabel 3.2.4.2.2. Perubahan Target IK 4.2.**

**Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
62	62	62	62	62	62
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
62	62	62	62	62	62

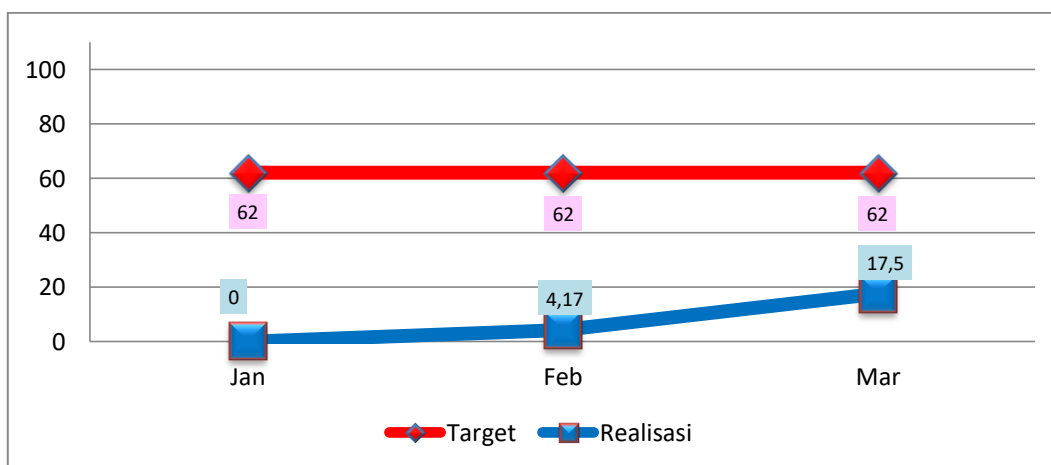
**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 4.2.**

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Jenis Rekomendasi	Realisasi								
	Januari		Februari		Maret		Jumlah		
	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	%TL
A	0	0	12	1	28	13	40	14	35
B	0	0	1	0	4	0	5	0	0
<b>JLH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	
<b>Rata-rata</b>									<b>17,50</b>

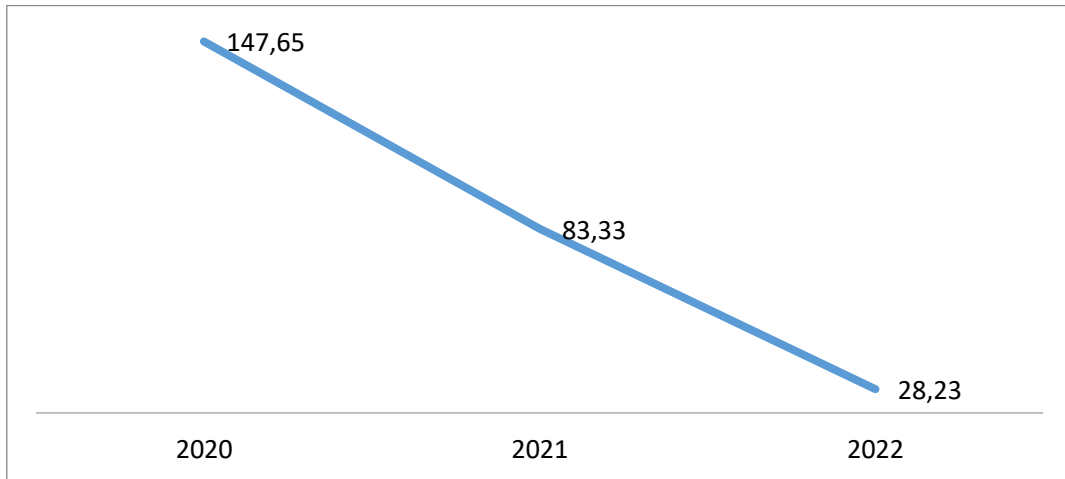
Sampai dengan trwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 45 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 14 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/ feedback, sehingga capaiannya sebesar 28,23%.

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



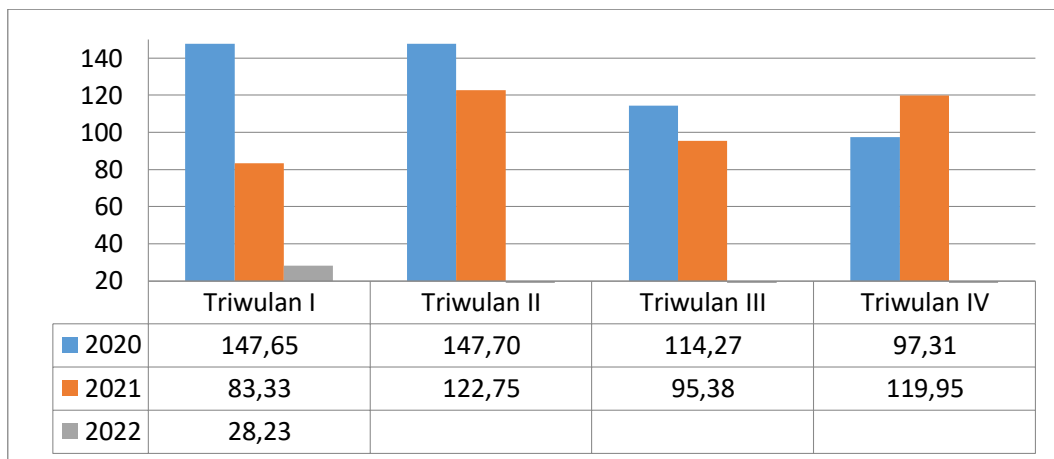
**Grafik 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.1 Pertriwulan Tahun 2022**

Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



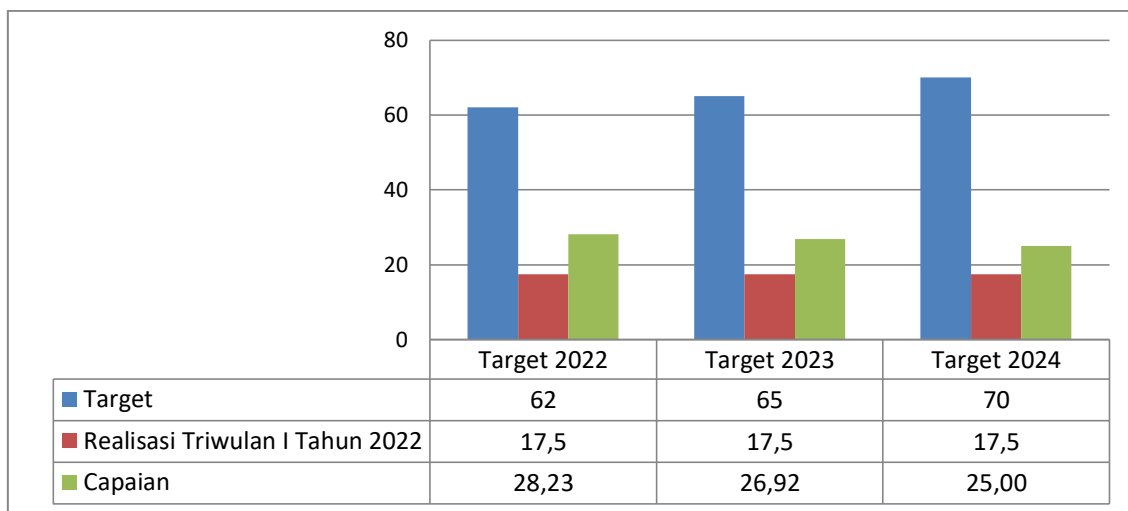
**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.2. Triwulan I Tahun 2020-2022**

Apabila capaian kinerja per triwulan tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja per triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.2. Tahun 2020-2022**

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.7.004.140,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.190.945.800,- atau 3,67% , dicapai indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 30,54 dengan tingkat efisiensi sebesar 29,54 sehingga capaian efisiensi triwulan I tahun 2022 sebesar 75% **(Tidak fisien)**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
28,23	3,67	7,69	6,69	<b>75%</b>	<b>Tidak Efisien</b>

**Tabel 3.2.4.2.3 Efisiensi Anggaran IK.4.2 Triwulan I Tahun 2022**

### Indikator Kinerja 4.3 :

#### Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	95.42	95.42	Baik

**Tabel 3.2.4.3.1. Realisasi Kinerja IK.4.3 Tahun 2021**

Dalam tupoksinya sebagai unit kerja Badan POM, selain melakukan pengawasan post market, BBPOM di Banjarmasin juga memiliki peran dalam pengawasan pre-market. Peran BBPOM di Banjarmasin dalam pengawasan pre-market salah satunya adalah kegiatan sub kelompok substansi sertifikasi, berupa audit/pemeriksaan sarana produksi/distribusi obat dan makanan dalam rangka perizinan maupun sertifikasi serta penerbitan SKI/SKE obat dan makanan, baik secara manual maupun sistem INSW melalui e-bpom. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan layanan terhadap pelaku usaha yang bermaksud melakukan legalisasi terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, produk serta kegiatan impor dan ekspor komoditi obat dan makanan.

Permohonan pemeriksaan/audit semakin meningkat dengan adanya mandat dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi Pedagang Besar Farmasi yang mewajibkan sertifikasi CDOB bagi semua PBF. Selain implikasi dari Peraturan tersebut, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) juga memberikan dampak terhadap permohonan audit/sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan. Hal ini dikarenakan beberapa pangan yang termasuk pangan yang bisa didaftarkan sebagai PIRT pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) tidak lagi masuk dalam daftar pangan yang bisa didaftarkan sebagai PIRT pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang didaftarkan sebagai PIRT pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor

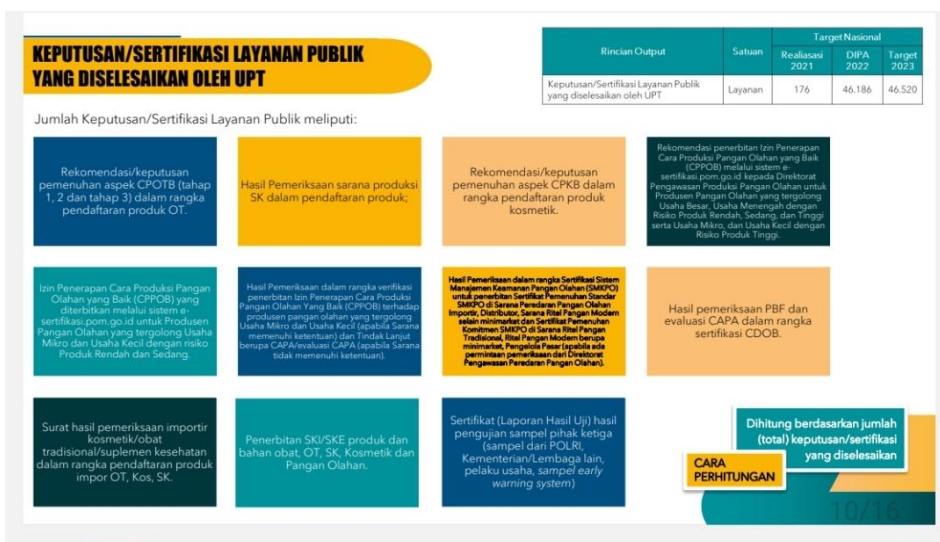
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). yang disimpan beku. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentunya memberikan dampak berupa meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan produknya. Selain itu, sejak pandemic COVID-19 di tahun 2020, mulai marak UMKM pangan siap saji yang mengalihkan produknya dari siap saji menjadi pangan olahan berupa pangan siap saji yang disimpan beku (frozen food). Kebutuhan produk farmasi di masa pandemic COVID-19 juga mempengaruhi munculnya sarana pelayanan kefarmasian maupun sarana distribusi obat yang baru.

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Pengumpulan dan pengolahan data Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh BBPOM di Bjm berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah (total) keputusan/ sertifikasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan keputusan/sertifikasi yang masuk (layanan)}} \times 100\%$$

Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik meliputi :



Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	82	88	86	88	90
<b>Menjadi</b>	82	100	100	100	100
<b>Realisasi</b>	99,81	100	-	-	-

**Tabel 3.2.4.3.2. Perubahan Target IK 4.3.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
100	100	100	100	100	100
Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
100	100	100	100	100	100

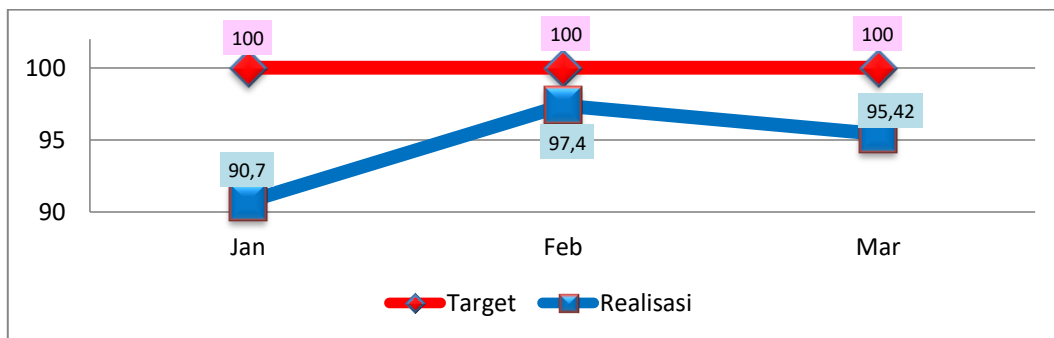
**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 4.3.**

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Jenis Rekomendasi	Realisasi								
	Januari		Februari		Maret		Jumlah		
	R	TL	R	TL	R	TL	R	TL	%TL
SKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKE	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Pengujian Sampel P3	86	78	145	147	268	251	499	476	95,39
Sertifikat CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, CPPOB	0	0	0	0	3	3	3	3	100,0
<b>JLH</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>145</b>	<b>147</b>	<b>271</b>	<b>254</b>	<b>502</b>	<b>479</b>	<b>95,42</b>

Pada triwulan I tahun 2022, Balai Besar POM di Banjarmasin telah menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 476 keputusan/ rekomendasi dari 499 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Sehingga realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 95,42 %.

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.3 Pertriwulan Tahun 2022**

Capaian indikator ini pada TW I tahun 2021 berbeda dengan capaian TW I tahun sebelumnya. Pada TW I tahun 2021, capaian untuk indikator ini yaitu 99,70 % sedangkan capaian untuk indikator ini pada TW I tahun 2022 yaitu 95,42 %. Akan tetapi, kriteria yang dicapai mendapat nilai sama dengan kriteria BAIK.

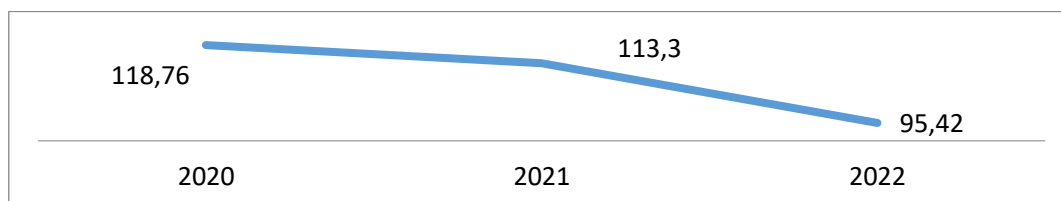
Terdapat carryover pengujian sampel pihak ketiga pada TW I tahun 2022 disebabkan karena ketidakterseediaannya salah suku cadang yang digunakan dan adanya perpindahan lokasi laboratorium ke Balai Besar POM di Banjarmasin berkedudukan di Banjarbaru.

Jenis layanan pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya (timeline 30 HK).

Meskipun jumlah layanan sertifikasi CPOTB/CPKB/CPMB/ CDOB/SKI/SKE/GDP sangat sedikit dibanding dengan jumlah layanan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi keberhasilan capaian layanan CPOTB/CPKB/CPMB/CDOB/SKI/SKE/GDP tidak dapat diabaikan. Pada TW I tahun 2022, tidak ada carryover proses layanan sertifikasi CPOTB/CPKB/CPMB/ CDOB/SKI/SKE/GDP. Hal ini tidak lepas dari upaya pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua "Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan" dan adanya inovasi pendampingan UMKM yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin yaitu Ganii UMKM.

Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada setiap proses layanan sertifikasi, dilakukan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha melalui keterbukaan kesempatan untuk konsultasi bagi pelaku usaha dengan media telepon maupun whatsapp grup. Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk.

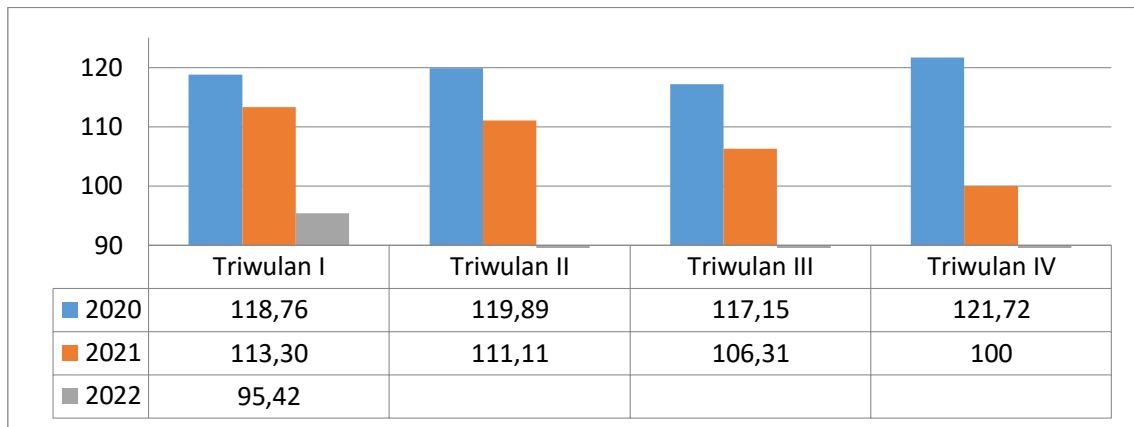
Apabila capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.3. Triwulan I Tahun 2020-2022**

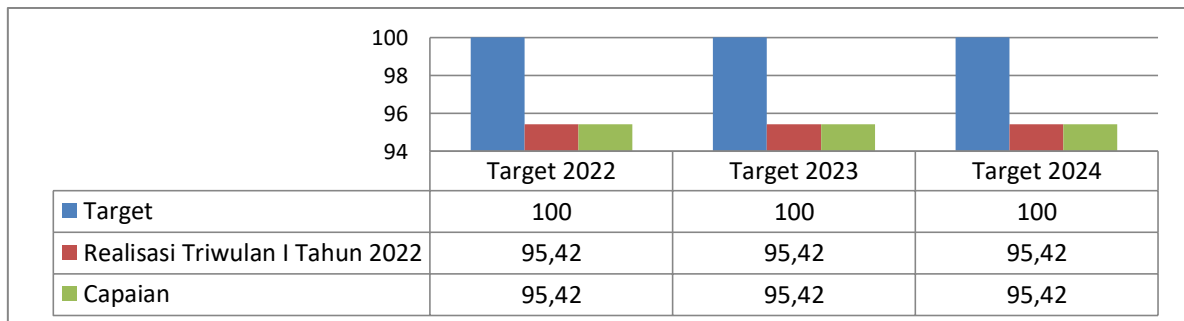
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja antara triwulan I tahun 2022 dengan triwulan I tahun 2021 yang memperoleh capaian sebesar 99,70%. Namun apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sampel maka terjadi kenaikan dimana pada TW I tahun 2021 total permohonan sebanyak 335 permohonan sedangkan TW I tahun 2022 jumlah permohonan 502.

Apabila capaian kinerja per triwulan tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja per triwulan tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKSK.4.3 Tahun 2020-2022**

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.3 Triwulan I Tahun 2022 dengan target Tahun 2022, 2023 dan 2024**

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini, pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 88.016.700,- namun belum ada serapan anggaran atau 0% , dicapai indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0 dengan tingkat efisiensi sebesar -1 sehingga capaian efisiensi triwulan I tahun 2022 sebesar 75% (**Tidak efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
95,42	0	0	-1	75%	Tidak Efisien

**Tabel 3.2.4.2.3 Efisiensi Anggaran IK.4.3 Triwulan I Tahun 2022**

Presentase keputusan penilaian sertifikasi di TW I tahun 2022 telah dicapai dengan baik dengan nilai kriteria BAIK akan tetapi masih perlu di tingkatkan dalam mencapai prosentase capaian (output) sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100% di TW II. Untuk itu perlu adanya perencanaan penambahan anggaran suku cadang sehingga pembelian barang persediaan suku cadang dapat ditambah untuk ketersediaan di awal tahun berikutnya sehingga stok suku cadang cukup sampai adan pengadaan di tahun berjalan, serta mempercepat proses pengujian sampel terutama sampel pihak ketiga yang masuk di akhir bulan sehingga dapat mengurangi carry over

#### Indikator Kinerja 4.4 :

#### Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Target Triwulan I 2022	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	95.42	95.42	Baik

Tabel 3.2.4.4.1. Realisasi Kinerja IK.4.4 Tahun 2021

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%*

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada tahun 2022 target jumlah sarana produksi obat yang diperiksa sebanyak 132 sarana.

Sarana Produksi	Industri Obat Tradisional	Usaha Kecil OT	Industri Kosmetik	Industri Pangan	Industri RT Pangan	Jumlah
Jumlah Sarana yang ada	2	2	9	54	1.511	1.578
Target 1 tahun	2	2	9	50	50	113

Tabel 3.2.4.4.2. Jumlah Sarana Produksi dan Target dalam 1 Tahun - Tahun 2021

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	20	35	22	23	24
<b>Menjadi</b>	20	45	50	55	60
<b>Realisasi</b>	36,59	50,67	-	-	-

**Tabel 3.2.4.4.3. Perubahan Target IK 4.4.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Dari target tahun 2022 tersebut, ditetapkan target bulanan, dimana untuk Indikator Kinerja ini target bulannya sama dengan target tahunan, yaitu :

<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
50	50	50	50	50	50
<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>
50	50	50	50	50	50

**Tabel 3.2.1.2.2. Target Bulanan IK 4.4.**

Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

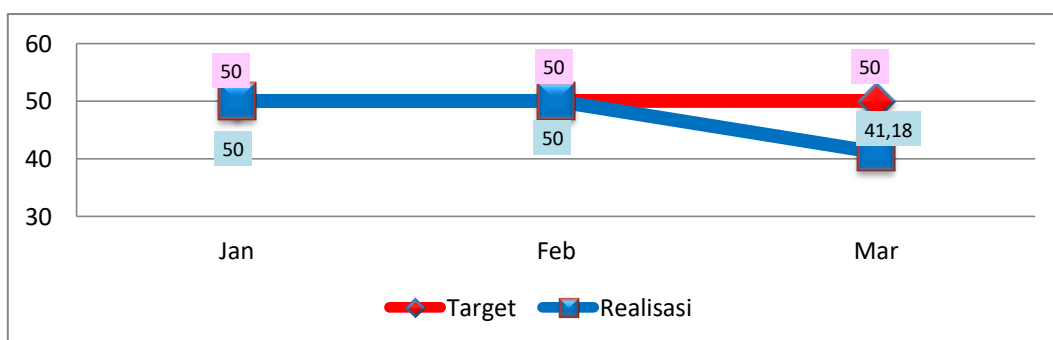
Sarana Produksi	Realisasi								
	Januari		Februari		Maret		Jumlah		
	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	%MK
IOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
IPangan	1	1	6	4	2	2	9	4	44,44
IRTP	0	0	2	0	5	0	7	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>41,18</b>

**Keterangan**

Riksa = Jumlah sarana yang diperiksa  
 MK = Memenuhi Ketentuan

Pada triwulan I tahun 2022, Balai Besar POM di Banjarmasin telah pemeriksaan terhadap 17 sarana produksi, dengan hasil sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 7 sarana, sehingga realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 41,18 %.

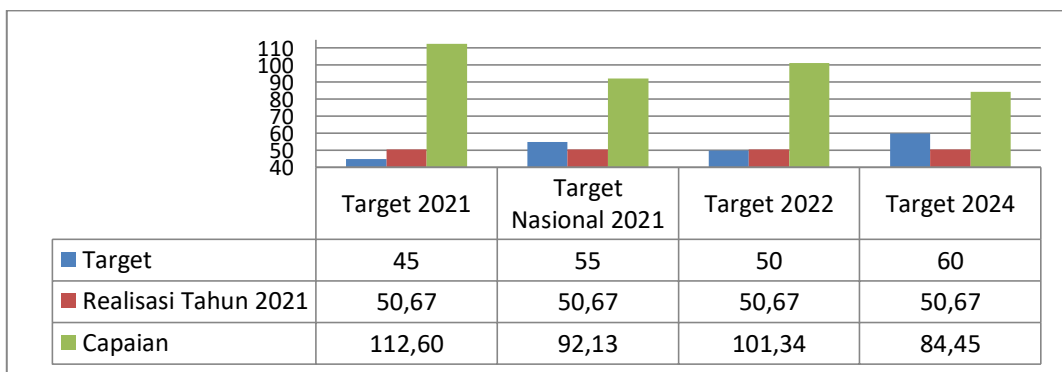
Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan I tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.4 Pertriwulan Tahun 2022**

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 150 sarana produksi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu, dengan hasil 76 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 74 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 50,67 %.

Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

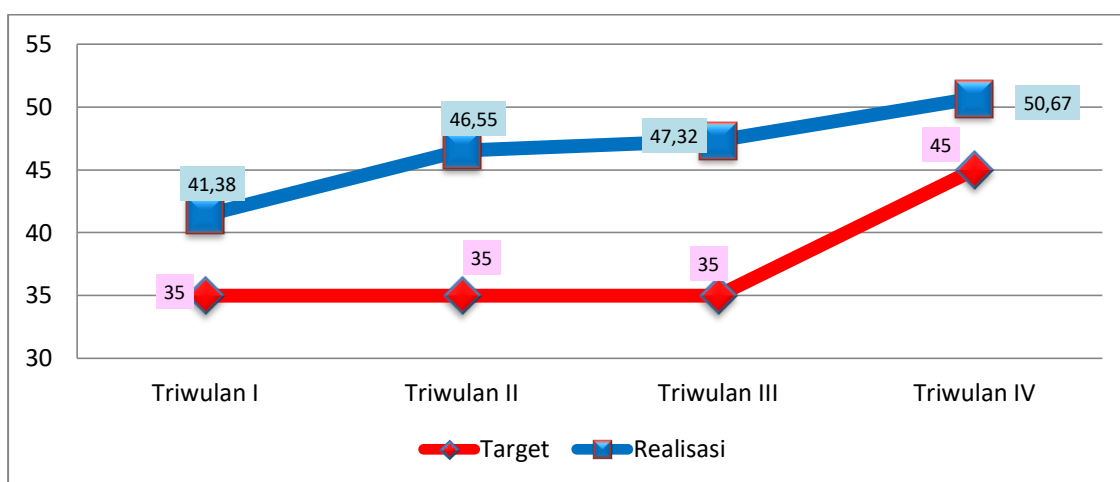


**Grafik 3.2.4.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Pada grafik di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 60 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 84,45% dengan kriteria Cukup, Realisasi

indikator ini untuk tahun 2021 (50,67%) masih berada dibawah target jangka menengah tahun 2024 (60%), sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2024 menjadi kriteria baik atau sangat baik.

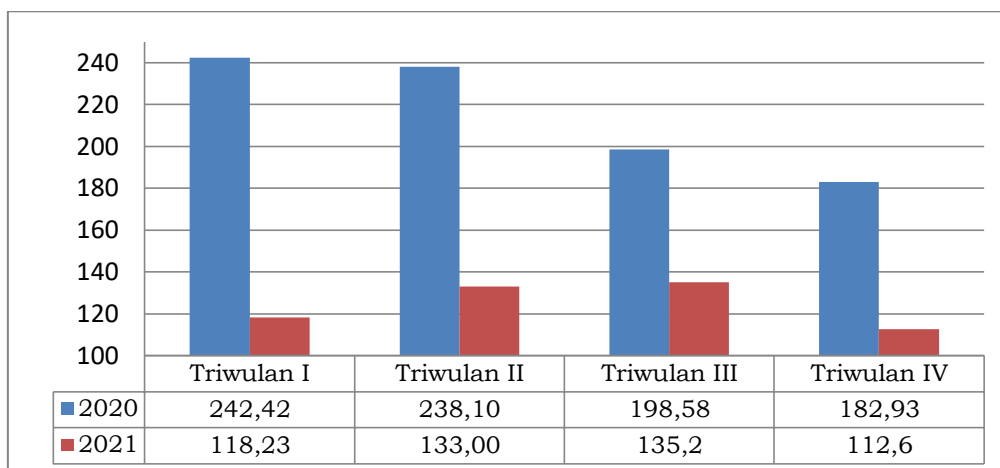
Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



**Grafik 3.2.4.4.2. Realisasi Kinerja IK.4.4 Pertriwulan Tahun 2021**

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan target, dimana pada triwulan I, II dan III targetnya adalah 35, sedangkan pada triwulan IV sesuai dengan Reviu Renstra 2021-2024 targetnya adalah 45.

Apabila capaian kinerja triwulanan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



**Grafik 3.2.4.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan antara triwulan IV tahun 2021 dengan triwulan IV tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 112,60%. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan setiap triwulan bersifat kumulatif sedangkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan sama setiap triwulan. Pada triwulan IV tahun 2021, target berdasarkan reuiu Renstra mengalami perubahan menjadi 45% dari awalnya sebesar 35 %. Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sarana produksi maka terjadi peningkatan jumlah yang diperiksa dimana pada triwulan IV tahun 2020 adalah sebanyak 123 sarana, dengan yang memenuhi ketentuan 45 sarana, sedangkan tahun 2021 sebanyak 150 sarana dengan yang memenuhi ketentuan 76 sarana

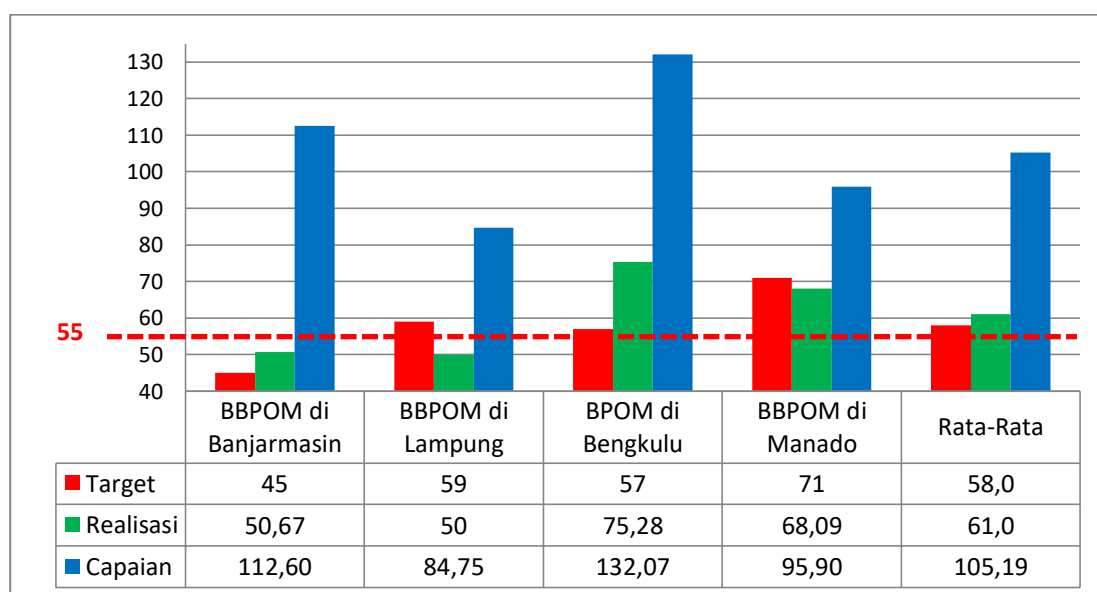
Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.114.442.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.114.442.000,- atau 100,0%. Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1.12 dengan tingkat efisiensi sebesar 0.12 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 100,0 % (**Efisien**).

Capaian	Serapan	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
---------	---------	----	----	------------	----------

(Output)	anggaran (Input)				
112,60%	100,00%	1.12	0.12	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.4.4.4 Efisiensi Anggaran IK.4.4 Tahun 2021**

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke 3 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster 4, yaitu sebagai berikut :



----- Target Nasional tahun 2021 sebesar 55 %

**Grafik 3.2.4.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Bandar Lampung masih berada dibawah target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 55%. BBPOM Manado telah melebihi target nasional dan BPOM di Bengkulu mencapai realisasi paling tinggi jika dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang seklaster

Capaian indikator ini pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 karena terdapat perbedaan penetapan target akan tetapi masuk dalam kriteria Baik. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah keterbatasan jenis sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak terdapat sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). Sarana produksi yang ada adalah kosmetik golongan A dan B, sarana IOT, UKOT dan produksi pangan olahan MD dan PIRT. Sesuai dengan karakteristik daerahnya, maka BBPOM di Banjarmasin melakukan optimalisasi pembinaan pemenuhan aspek CPPB pada sarana IRTP dan seluruh sarana MD dan pembinaan kepada UKOT dan IOT untuk pemenuhan CPOTB serta meningkatkan monitoring surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP ke Dinas Kesehatan.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja tahun 2022 antara lain :

- Pemutakhiran data sarana produksi
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana produksi UMKM
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan perbaikan yang dilakukan bersifat permanen, tidak hanya dalam rangka memperbaiki temuan
- Menyediakan pelayanan help desk untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana disitribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Jumlah target sarana produksi MD sebesar 42 % dari target sarana produksi pada tahun 2021. Jumlah sarana produksi MD yang memenuhi ketentuan pada sebesar sejumlah 81.03 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari para pelaku usaha

- Kuatnya sinergisme pengawasan antara BBPOM di Banjarmasin dengan Dinas Kesehatan setempat yang selaras dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) NF Pangan BPOM untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pengawasan IRTP semakin baik.

Berdasarkan capaian tahun 2021 untuk mencapai target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, perlu dilakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petugas melaksanakan pengawasan diiringi dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan CAPA sebagai komitmen dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang sangat baik, yaitu 112,59% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

#### **Indikator Kinerja 4.5 :**

#### **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
63	68,77%	109,16%	<b>Baik</b>

**Tabel 3.2.4.5.1. Realisasi Kinerja IK.4.5 Tahun 2021**

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan/ jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%***

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	55	57	60	63	65
<b>Menjadi</b>	59,69 (Realisasi)	63	66	68	71

**Tabel 3.2.4.5.2. Perubahan Target IK 4.5.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Pada tahun 2021, terdapat pemotongan anggaran melalui Revisi APBNP tahap III dan IV, dimana anggaran untuk pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan juga terkena pemotongan sehingga perlu dilakukan penyesuaian target jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa pada tahun 2021, yaitu dari 629 sarana menjadi 553 sarana.

Sarana Distribusi	BBPOM Bjm		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T 1 thn	JS	T1thn	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn
<i>Pedagang Besar Farmasi</i>	38	11	0	0	1	1	39	12
<i>Apotek</i>	390	36	56	19	60	13	506	68
Toko Obat	222	8	50	5	44	4	316	17
Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah	9	9	3	3	2	2	14	14
Rumah Sakit	34	15	5	5	4	4	43	24
Puskesmas	148	74	43	34	42	29	233	137
Klinik	139	10	9	8	54	6	202	24
Fasilitas Dist. Obat Tradisional	205	19	59	8	71	3	335	30
Fasilitas Dist Suplemen Kes.	205	19	59	8	60	2	324	29
Fasilitas Distribusi Kosmetik	312	42	111	14	89	3	512	59
Fasilitas Dist Pangan Olahhan	719	67	298	38	895	34	1.912	139

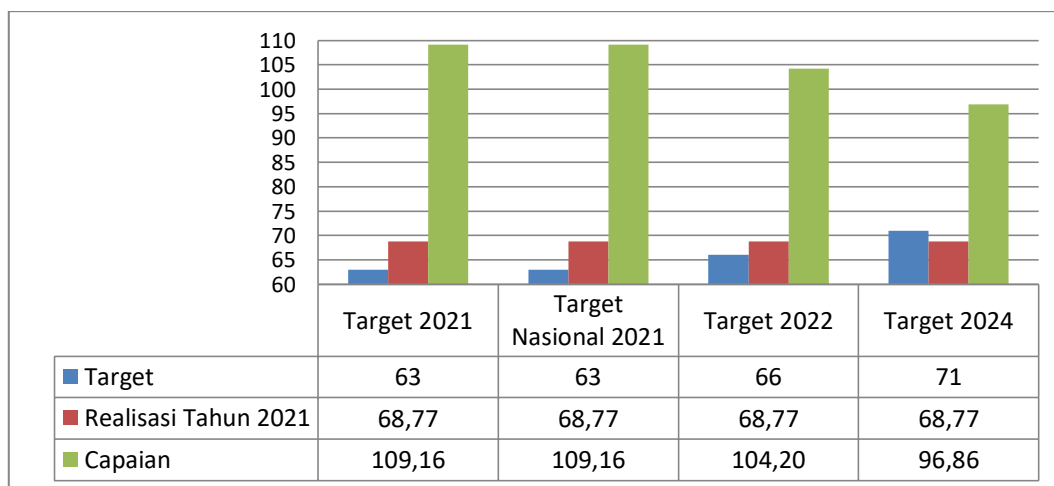
Sarana Distribusi	BBPOM Bjm		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T 1 thn	JS	T1thn	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn
<b>Jumlah</b>	<b>2.421</b>	<b>310</b>	<b>693</b>	<b>142</b>	<b>1.322</b>	<b>101</b>	<b>4.436</b>	<b>553</b>

**Keterangan** JS = Jumlah Sarana yang Ada  
T1thn = Target sarana yang diperiksa 1 tahun

**Tabel 3.2.4.5.2. Jumlah Sarana Distribusi dan target dalam 1 tahun – Tahun 2021**

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 618 sarana distribusi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu, dengan hasil sebanyak 425 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 193 sarana masih belum memenuhi ketentuan.

Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

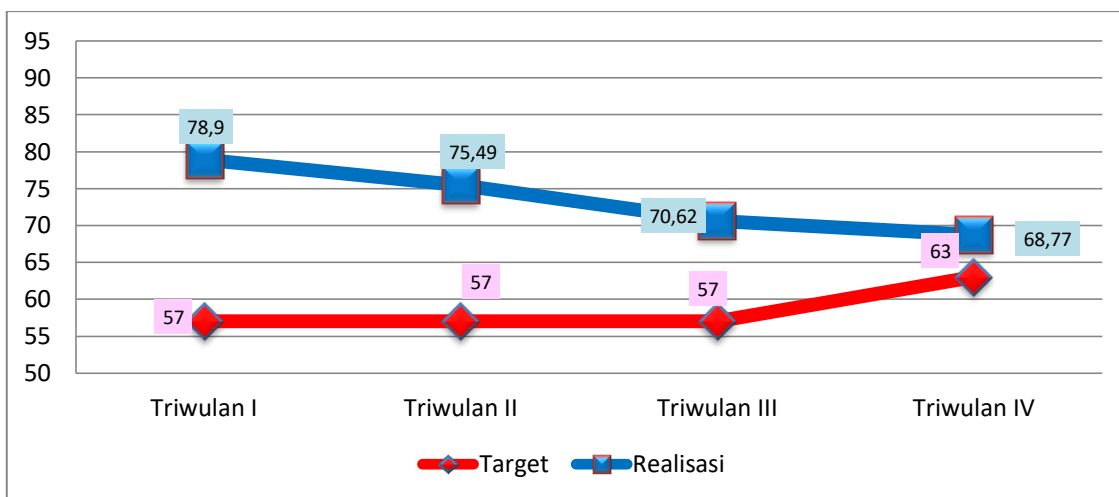


**Grafik 3.2.4.5.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Pada grafik di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 71 %. Jika realisasi

kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 96,79% dengan kriteria Baik, Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (68,77%) masih sedikit berada dibawah target jangka menengah tahun 2024 (71%), sehingga perlu dipertahankan monitoring dan evaluasi kinerja dan pengawalan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap masuk dalam kriteria baik atau bisa menjadi sangat baik.

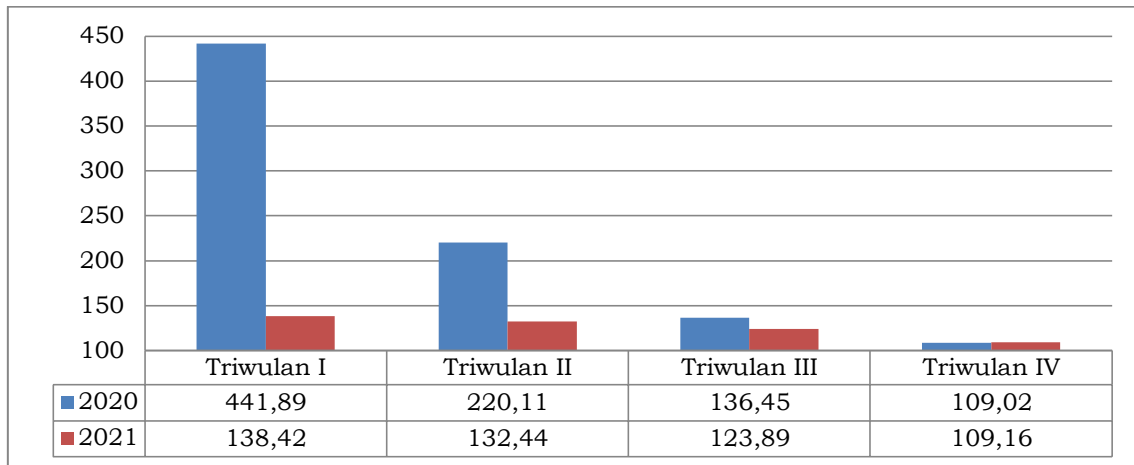
Apabila dibandingkan berdasarkan jumlah sarana distribusi maka terjadi peningkatan jumlah yang diperiksa dimana pada triwulan IV tahun 2020 adalah 542 sarana, dan jumlah yang memenuhi ketentuan 325 sarana. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 adalah sebesar 68,77%. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut



**Grafik 3.2.4.5.2. Realisasi Kinerja IK.4.5 Pertriwulan Tahun 2021**

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan target, dimana pada triwulan I, II dan III targetnya adalah 57, sedangkan pada triwulan IV sesuai dengan Reviu Renstra 2021-2024 targetnya adalah 63.

Apabila capaian kinerja triwulan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu triwulan IV tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



**Grafik 3.2.4.45.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pencapaian antara triwulan IV tahun 2021 dengan triwulan IV tahun 2020 yang memperoleh capaian yang hampir sama sebesar 109,16%. Namun apabila dicermati terdapat perbedaan capaian triwulan IV tahun 2021 yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena terdapat perubahan target pada triwulan IV tahun 2021 menjadi sebesar 63%. Penentuan target triwulanan tahun 2020 juga ditetapkan kumulatif, sedangkan tahun 2021 tetap dan sama dengan target tahunan.

Target triwulanan tahun 2021 bersifat tetap selama triwulan 1 sampai dengan triwulan III yaitu sebesar 57%, dan pada triwulan IV terdapat perubahan target menjadi 63% maka capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan capaian triwulan IV tahun 2021 (109,16%).

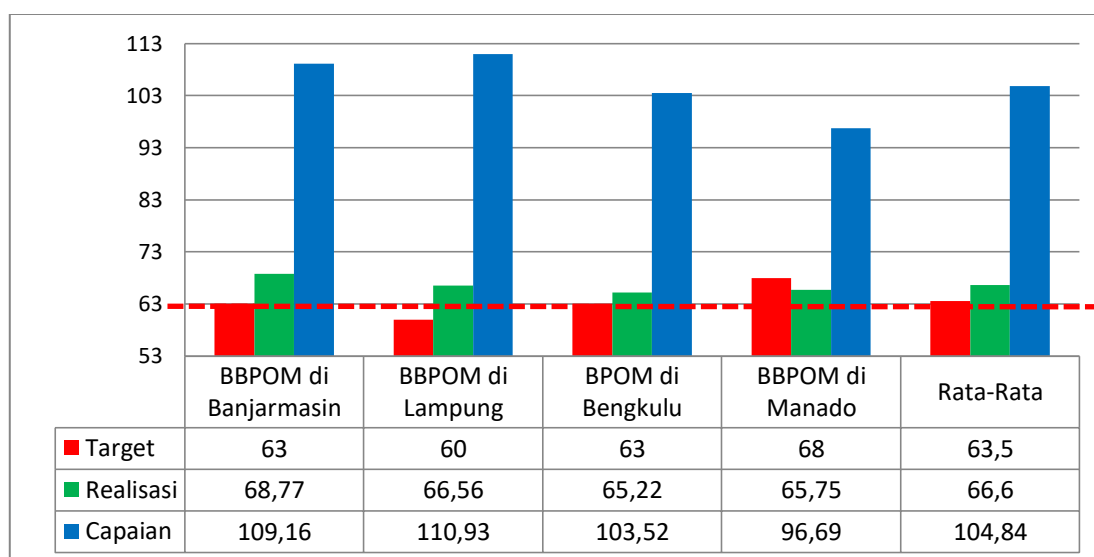
Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.213.526.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.213.440.590,- atau sebesar 99,96 %.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
109,16	99,96	1,09	0,09	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.4.5.4 Efisiensi Anggaran IK.4.5 Tahun 2021**

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,09 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,09 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi pertama dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



----- = Target Nasional tahun 2021 sebesar 63 %

**Grafik 3.2.4.5.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 63%. Realisasi UPT BPOM lain yang seklaster

yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado, dan BPOM di Bengkulu seluruhnya juga telah melebihi standar Nasional. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan terendah dicapai oleh BPOM di Bengkulu

Capaian indikator ini pada tahun 2021 sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 109 % dengan kriteria Baik, meskipun terdapat perbedaan target pada triwulan IV pada tahun 2021. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

1. Berlakunya aturan yang mewajibkan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan /perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam melakukan pemeriksaan sarana diiringi dengan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CAPA sebagai perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan. Dengan adanya perbaikan CAPA, diharapkan menjadi komitmen para pelaku usaha dalam memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten/kota sehingga tindak lanjut pada tahun 2021 yang masih berupa rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh sarana dengan efektif dan maksimal;
4. Adanya pandemi covid-19, terdapat fokus pengawasan kepada sarana pelayanan kefarmasian (Intensifikasi Puskesmas dan RS) terhadap kesiapan sarana dalam melakukan pengelolaan vaksin Covid-19. Pemenuhan CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan mendorong sarana Puskesmas dan RS dalam melakukan perbaikan sarana.

Beberapa langkah penting yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain :

1. Pengelolaan vaksin Covid-19 dan monitoring ketersediaan obat anti viral untuk pengobatan Covid-19 di sarana pelayanan kesehatan masih merupakan isu penting

di tahun 2021. Hal yang masih menjadi fokus dalam pengawasan adalah pengelolaan vaksin Covid-19 di, monitoring mutu dan penandaan vaksin Covid-19 serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam hal ini PBF dan saryanfar pengelola obat anti viral Covid-19 registrasi EUA untuk menyampaikan laporan melalui e-was.pom.go.id. Untuk menunjang tugas ini, kompetensi petugas BBPOM di Banjarmasin dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu ditingkatkan.

2. Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi masih terus dilakukan dengan menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko seiring dengan diadakan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha, membuka forum komunikasi untuk konsultasi CAPA dari pelaku usaha, serta meningkatkan kompetensi petugas

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana disitribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

1. Sesuai dengan program dari Badan POM bahwa pada tahun 2021 BBPOM di Banjarmasin fokus kepada pengawalam pendistribusian Covid-19 di IFP/ IFK dimana persen MKnya cukup tinggi sebesar 100 % dan juga melakukan Intensifikasi pengelolaan Vaksin Covid-19 sehingga lebih banyak melakukan pemeriksaan ke Puskesmas dan RS dimana persen MKnya sebesar 94.29 %.
2. Koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin dengan lintas sektor Dinas Kesehatan bersinergi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha cukup efektif didukung dengan adanya dana alokasi khusus non fisik pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan capaian tahun 2021, untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, perlu dilakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan, meningkatkan komitmen petugas serta tetap melakukan perencanaan pengawasan dengan lebih cermat berdasarkan analisis risiko.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Banjarmasin tahun

2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 109,16% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

#### Indikator Kinerja 4.6 :

#### Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
3,91	3,98	101,8%	Baik

**Tabel 3.2.4.6.1. Realisasi Kinerja IK.4.6 Tahun 2021**

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- 1) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- 2) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi, responsivitas, integritas.
- 3) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan ruang parkir, ruang tunggu, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, dan *front office*.
- 4) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari sarana konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.
- 5) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi media konsultasi dan media pengaduan.
- 6) Aspek inovasi

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana

Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

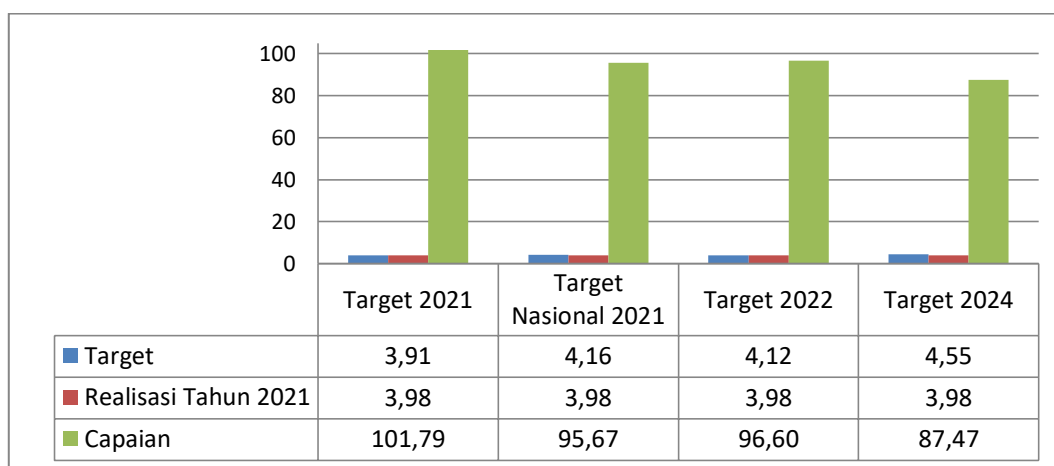
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51
<b>Menjadi</b>	3,69 (Realisasi)	3.91	4.12	4.34	4.55

**Tabel 3.2.4.6.2. Perubahan Target IK 4.6.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan adalah 3,91, dengan realisasi 3,98 dan capaian sebesar 101,8%. Capaian yang diperoleh masuk dalam kriteria baik, masih perlu perbaikan dan peningkatan, terutama dalam hal sarana prasarana dan dokumentasi, yaitu penyediaan mesin EDC untuk pembayaran PNBPN, penyediaan toilet jongkok, penyediaan area merokok, penyediaan antrian elektronik, penyempurnaan toilet difabel, SK petugas layanan beserta sertifikat penunjang, kecepatan tindak lanjut hasil SKM, Standar Pelayanan belum melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam penyusunannya.

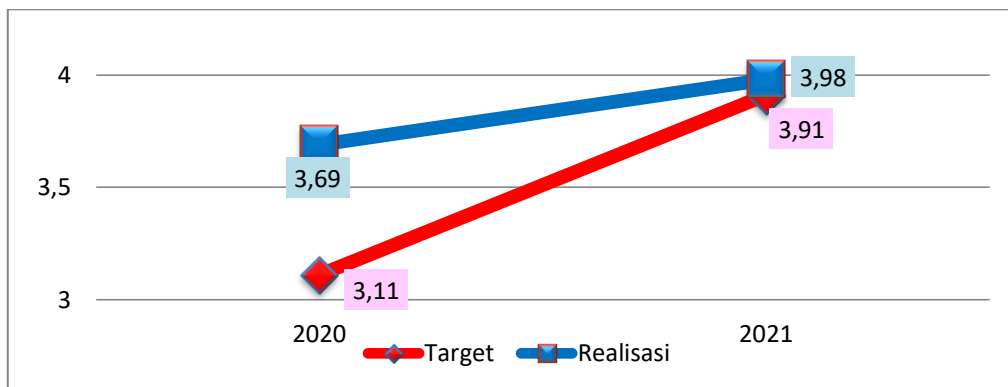
Indeks pelayanan publik dengan tahun 2020, ditetapkan target sebesar 3,11 dengan realisasi 3,69 (capaian di tahun 2020 adalah 118,65%), sedangkan indeks pelayanan publik tahun 2021 dengan target 3,75 dan realisasi yang diperoleh adalah 3,98 (capaian di tahun 2021 adalah 106,13%). Jika dilihat dari capaian terhadap target, capaian indeks pelayanan publik tahun 2021 lebih rendah dibanding capaian di tahun 2020. Namun jika dilihat dari besaran target dan realisasi, indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin mengalami peningkatan, di tahun 2021.

Kekurangan yang ditemukan pada penilaian tahun 2020 telah diperbaiki di tahun 2021, yaitu standar pelayanan dan maklumat pelayanan dipublikasikan tidak hanya di area ruang pelayanan tetapi juga di media sosial, media cetak dan brosur, pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat dilakukan pertriwulan, telah disusun Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan, telah ditetapkan sistem reward dan punishment bagi petugas layanan, telah disediakan karcis parkir dan CCTV di area parkir, disediakan loket khusus bagi orang berkebutuhan khusus, serta telah tersedia kantin dan alat fotocopy.



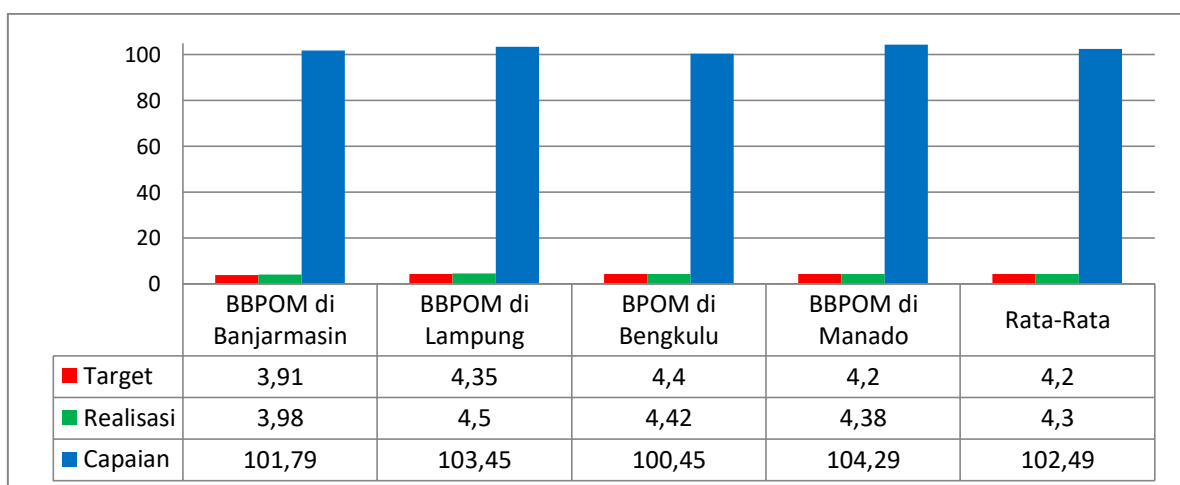
**Grafik 3.2.4.6.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.6 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Indeks pelayanan publik tahun 2021 realisasinya adalah 3,98, dibandingkan dengan target indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2024 adalah 4,51. Gap yang cukup jauh ini memerlukan dukungan semua pihak untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada semua aspek penilaian. Untuk aspek yang nilainya masih kurang perlu peningkatan baik dari segi anggaran maupun kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang pelayanan. Dan untuk aspek yang telah mendapat nilai sangat baik, perlu strategi dalam mempertahankannya, hal ini ditujukan agar pelayanan prima dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.



**Grafik 3.2.4.6.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.6 Tahun 2020-2021**

Capaian indeks pelayanan publik tertinggi diperoleh BBPOM di Manado sebesar 104,29%, diikuti BBPOM di Bandar Lampung yaitu 103,45%, BBPOM di Banjarmasin 101,79 dan Balai POM di Bengkulu dengan capaian 100,45%. Walaupun capaian indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi dibanding Balai POM di Bengkulu, namun jika dibandingkan ketiga balai lainnya, target indeks pelayanan publik yang ditetapkan lebih rendah. Dari penilaian tahun 2021, masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam hal sarana prasarana serta dalam hal pengarsipan dan dokumentasi.



**Grafik 3.2.4.6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.6 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Untuk mendorong pencapaian target kinerja indeks pelayanan publik, BBPOM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.40.628.000,- dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.40.611.749,- atau 99,96%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
101,79	99,96%	1,02	0,02	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.4.6.3. Efisiensi Anggaran IK.4.6 Tahun 2021**

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,02 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Dilihat dari aspek standar pelayanan publik, yang perlu dilakukan kedepannya adalah pada saat proses penyusunan standar pelayanan, BBPOM di Banjarmasin harus melibatkan masyarakat dan lintas sektor, selama ini standar disusun berdasarkan kebijakan dan peraturan dari sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan, belum mengakomodir kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk sarana prasarana, masih ada yang perlu ditingkatkan, seperti loket untuk pelanggan berkebutuhan khusus, penyediaan kloset jongkok, penyediaan mesin EDC, serta penyediaan nomor antrian elektronik. Pelayanan informasi, pengaduan dan konsultasi sudah sangat baik, yang masih perlu dikembangkan adalah dokumentasi pelayanan informasi dan pengaduan memudahkan untuk diakses di website.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks pelayanan publik tahun 2021 adalah peningkatan kompetensi petugas layanan dalam memahami setiap aspek yang dinilai, kerjasama yang baik antara Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi dan Bagian Tata Usaha yang saling berkaitan dalam pemenuhan aspek-aspek pelayanan, serta dukungan penuh Pimpinan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 101,79% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

**Sasaran Kegiatan 5 :**

**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**Indikator Kinerja 5.1 :**

**Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
90	92,51	102,79%	Baik

**Tabel 3.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2021**

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra 2020–2024, dan tidak ada pengukuran di tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 (empat) aspek yang dinilai yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang disampaikan, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

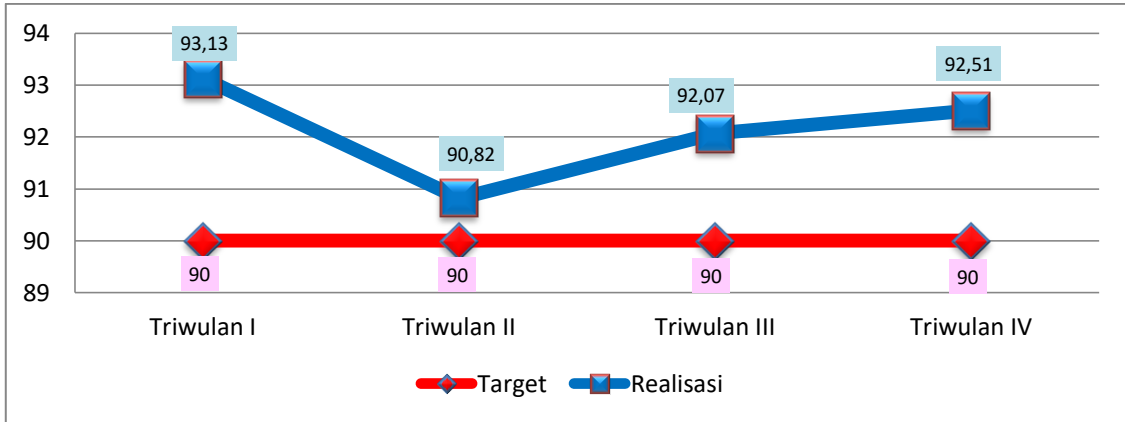
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	83,73	85,41	78	81	85
<b>Menjadi</b>	88,8 (Realisasi)	90	91,8	93,6	95,5

**Tabel 3.2.5.1.2. Perubahan Target IK 5.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang ditetapkan adalah 90, dengan realisasi 92,51 dan capaian yang diperoleh adalah 102,79%. Realisasi yang melebihi target merupakan keberhasilan dari kegiatan KIE yang dilaksanakan bagi masyarakat wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

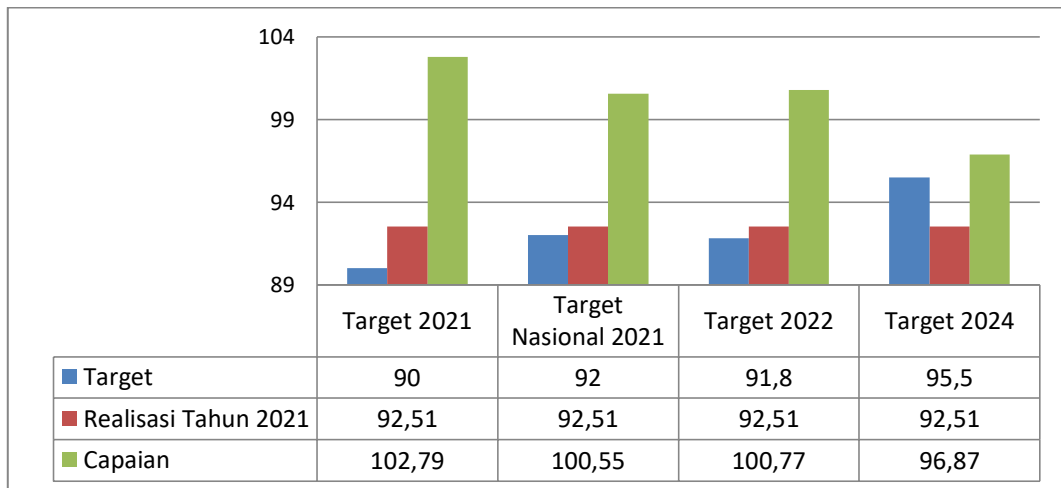
Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaiannya. Ini artinya petugas telah berhasil membuat materi yang sederhana sehingga mudah

diterima, diingat dan dipahami, dan disertai juga dengan teknis atau cara penyampaian yang baik dari petugas sehingga masyarakat puas akan informasi yang didapat.



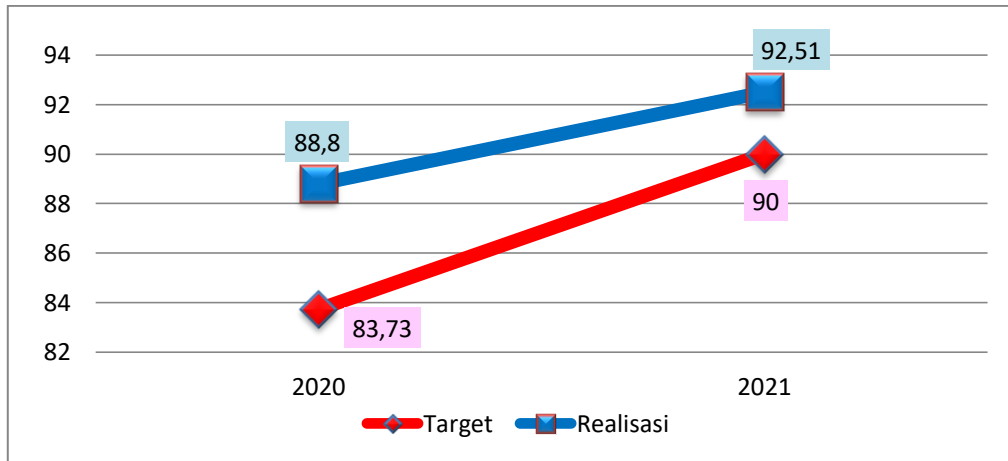
**Grafik 3.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Pertriwulan Tahun 2021**

Target indeks tingkat efektivitas KIE pada akhir Renstra tahun 2024 adalah 90,46. Dengan realisasi yang diperoleh di tahun 2021 pada nilai 92,51, BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target di tahun 2024, seperti tercantum dalam tabel berikut :



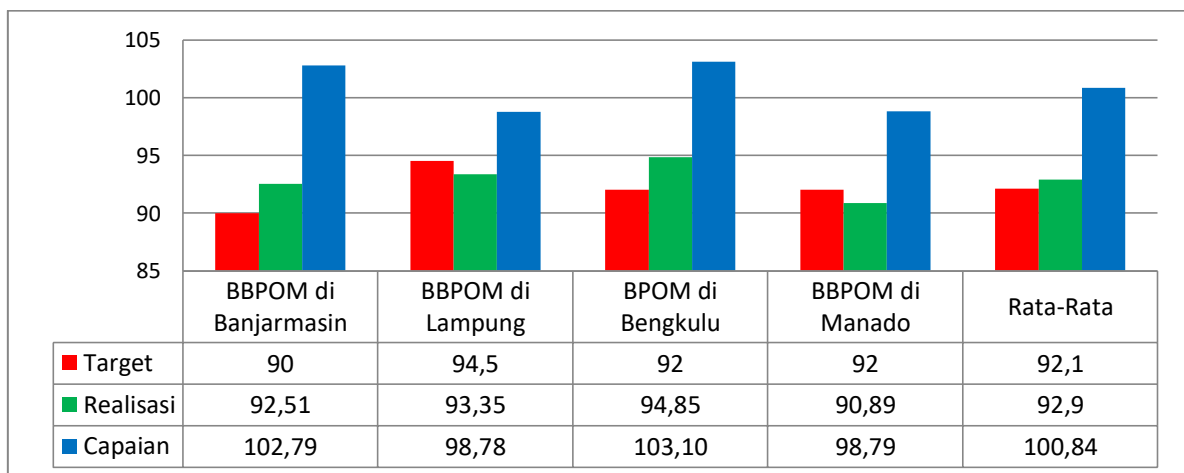
**Grafik 3.2.5.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, dapat terlihat sebagaimana grafik berikut :



**Grafik 3.2.5.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2020-2021**

Meskipun target Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 lebih tinggi dari target tahun 2020, BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target tersebut dengan baik.



**Grafik 3.2.5.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai 98,78%, BBPOM di Manado dengan capaian 98,79%, serta Balai POM di Bengkulu yang memperoleh 103,10%, maka capaian BBPOM di Banjarmasin berada di posisi kedua. Perbedaan capaian ditentukan banyak hal, diantaranya keberagaman responden yang memiliki latar belakang berbeda, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, budaya, lokasi survei. Selain itu metode KIE juga dapat berpengaruh terhadap penilaian, apakah KIE dilaksanakan secara langsung yang dapat dibimbing oleh petugas dalam memberikan jawaban jika responden yang belum memahami isi pertanyaan, atau KIE dilaksanakan melalui media sosial sehingga survei yang juga disampaikan melalui media sosial, memungkinkan ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan survei.

Walaupun demikian, tetap perlu upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan metode KIE, memperbarui materi, meningkatkan kompetensi petugas, serta memperluas sasaran penerima informasi agar KIE yang disampaikan tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga dapat mempengaruhi dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat terhadap pemilihan dan penggunaan Obat dan Makanan aman.

Untuk mendorong pencapaian target kinerja, BBPOM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.146.092.000,- dan terserap terserap Rp.145.553.067,- atau 99,63%. Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dicapai sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,003 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,79	99,63%	1,03	0,03	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.5.1.3. Efisiensi Anggaran IK.5.1 Tahun 2021**

Keberhasilan capaian kinerja ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021, yaitu :

- 1). Pelaksanaan sosialisasi keamanan Obat dan Makanan bagi mahasiswa, ritel dan PKK.
- 2). Pelaksanaan bimbingan teknis bagi kader sekolah.
- 3). Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 4). Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota.
- 5). Pelaksanaan KIE melalui media sosial, baliho, banner, spanduk, brosur, poster.
- 6). Peningkatan kompetensi petugas secara daring dalam pelatihan teknis dan pelayanan prima.

Untuk peningkatan indeks efektivitas KIE di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan metode KIE. Dari aspek materi, informasi yang ditampilkan harus lebih menarik dengan animasi dan bahasa yang mudah dipahami, video sederhana, poster dan brosur yang singkat, padat dan bermutu. Selain materi, sasaran KIE juga perlu ditambah baik jumlah maupun komunitasnya, sehingga masyarakat yang terpapar informasi Obat dan Makanan semakin luas khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 102,79% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### **Indikator Kinerja 5.2 :**

#### **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
40	40	100%	<b>Baik</b>

**Tabel 3.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Tahun 2021**

Pada tahun 2021, target untuk indikator PJAS aman yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin adalah 40 sekolah. Jumlah ini terdiri dari 24 sekolah baru ditambah dengan pengawalan terhadap 16 sekolah yang telah dilaksanakan di tahun 2020. Target 24 sekolah merupakan penambahan dari target tahun 2020 yang berkurang 4 sekolah. Perubahan target sekolah dikarenakan pada tahun 2020, kasus Covid 19 di wilayah Kalimantan Selatan sangat tinggi dan sebagian besar kabupaten/kota termasuk zona merah, sehingga pembelajaran dilangsungkan secara daring. Ini sebagai dasar dilakukannya penyesuaian jumlah sekolah yang diintervensi, baik pada tahun 2020 maupun 2021, dengan tujuan agar total jumlah sekolah yg diintervensi keamanan pangannya hingga 2024 tidak berubah.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

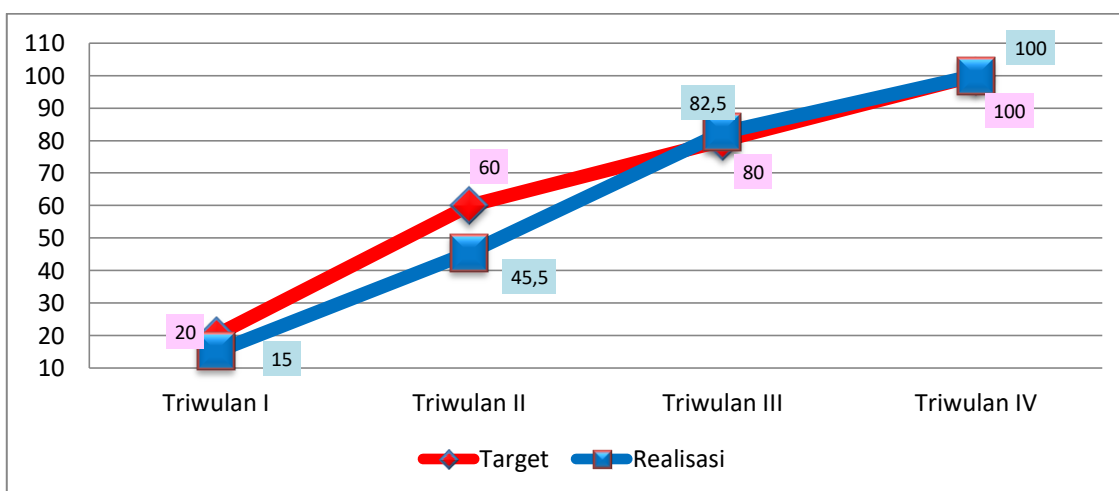
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	16 (20)	40	62	82	104
<b>Menjadi</b>	16 (Realisasi)	40	60	80	100

**Tabel 3.2.5.2.2. Perubahan Target IK 5.2.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Target Jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2021 adalah 40 sekolah, yang terdiri dari 24 sekolah yang diintervensi tahun 2021 dan 16 sekolah yang diintervensi tahun 2020. Realisasi yang dicapai sesuai target yaitu 40 sekolah, jadi capaian terhadap target adalah 100%.

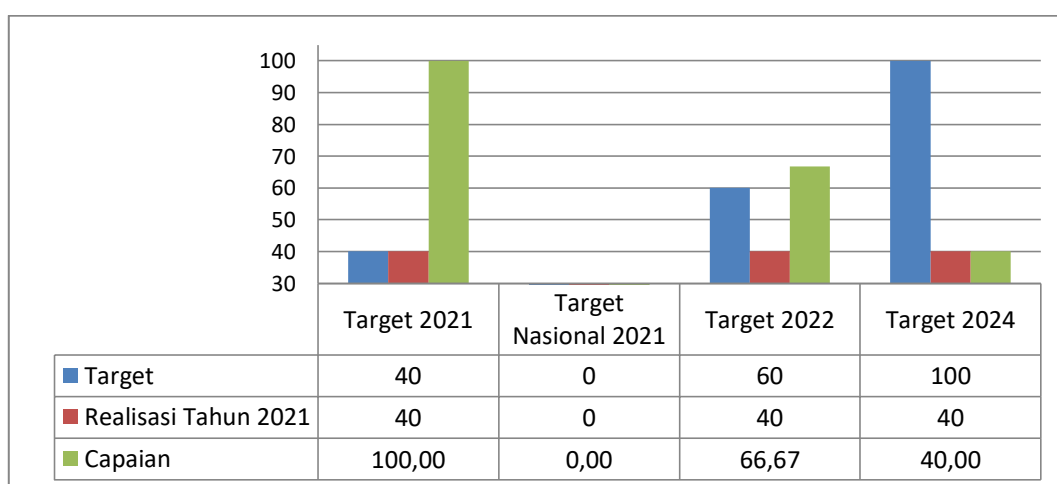
Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 1, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 2 (sekolah yang diintervensi pada tahun 2020 dan 2021).

Sebagaimana kegiatan di tahun 2020, pada tahun 2021 di masa pandemi Covid 19 belum berakhir, kegiatan pertemuan tatap muka seperti pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah yang melibatkan komunitas sekolah sebagai peserta, kegiatan mobil laboratorium keliling di kantin dan sekitar sekolah, audit kantin sekolah dan audit surveilan kantin sekolah yang melibatkan kantin dan penjual pangan di sekitar sekolah, ditiadakan. Untuk kegiatan mobil laboratorium keliling masih dilaksanakan tetapi dengan lokus yang berbeda, yaitu sampling, pengujian dan KIE dilaksanakan di jalur distribusi PJAS pada kabupaten/kota yang diintervensi tahun 2021.



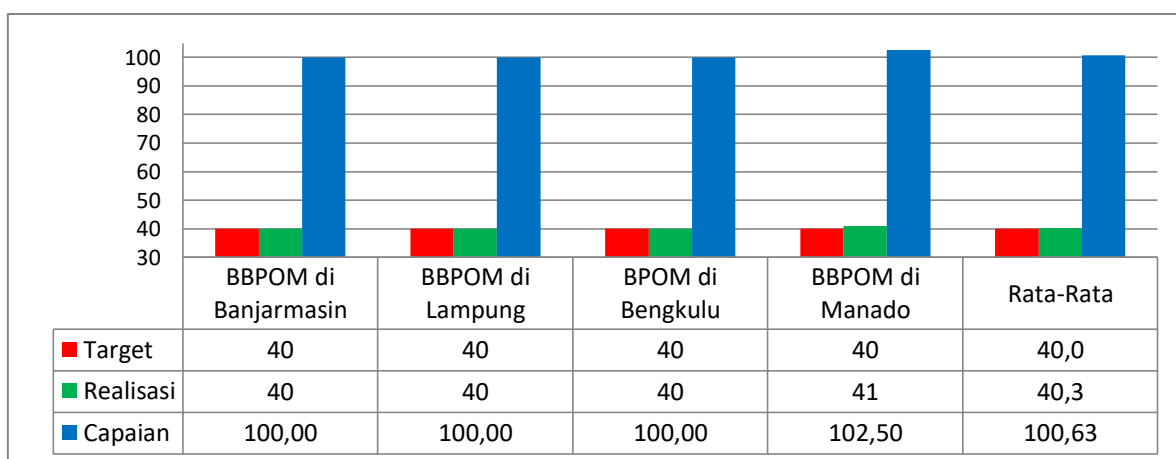
**Grafik 3.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Pertriwulan Tahun 2021**

Capaian program PJAS tahun 2020 dan 2021 adalah 100%. Realisasi jumlah sekolah yang diintervensi sesuai jumlah target yang ditetapkan secara nasional. Di dalam pencapaian target, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan intervensi PJAS aman berlangsung di tahun 2021, karena beberapa sekolah masih dilaksanakan secara daring, sehingga terbatas dalam cara penyampaian informasi atau materi kepada komunitas sekolah. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, bagaimana petugas balai mendorong agar terbentuknya tim keamanan pangan sekolah hingga memantau kader keamanan pangan untuk mengintervensi komunitas sekolah, memerlukan upaya dan semangat yang tinggi kepada pihak sekolah. Petugas balai harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat. Penyampain informasi yang dilakukan dengan tatap muka akan berbeda hasilnya dengan informasi yang disampaikan secara daring. Pertanyaan dan jawaban yang diterima terbatas, selain kurang jelasnya materi yang disampaikan, juga terkendala pada fasilitas dan jaringan. Sehingga dapat dimengerti jika pemahaman yang diterima peserta dan komunitas sekolah belum seperti yang dipersyaratkan



**Grafik 3.2.5.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Target sekolah di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah sekolah dan kondisi wilayah. Untuk ke-4 Balai Besar/Balai POM berikut, target sekolah yang diintervensi pada tahun 2021 jumlahnya adalah 40 sekolah, yaitu BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado dan di Balai POM di Bengkulu, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%, kecuali BBPOM di Manado yang realisasinya 41 sekolah dengan capaian 102,5%



**Grafik 3.2.5.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.2 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Pada tahun 2024 target yang diintervensi Program PJAS BBPOM di Banjarmasin berjumlah 100 sekolah, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target sekolah baru berjumlah 20 sekolah dan ada sekolah yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2021 sebanyak 40 sekolah, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 100 sekolah pada akhir Renstra tahun 2024.

Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebesar Rp.530.668.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.530.651.312,- atau capaian kinerja sebesar 100 %. Indeks Efisiensi yang dicapai adalah 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran dinilai efisien karena dapat mencapai capaian sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	100%	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.5.2.3. Efisiensi Anggaran IK.5.2 Tahun 2021**

Keberhasilan capaian program PJAS di tahun 2021, selain dilaksanakan tahapan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan, program PJAS ini juga ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Kerjasama dan koordinasi intensif dengan pihak sekolah terkait pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan.
- 2). Pembentukan *whatsapp group* yang anggotanya berisi petugas BBPOM di Banjarmasin dan tim keamanan pangan sekolah. Grup ini sebagai media komunikasi pelaksanaan kegiatan serta berbagi informasi Obat dan Makanan untuk komunitas sekolah.

Program intervensi PJAS aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024. Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan sekolah juga bertambah, sehingga sekolah yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Di tahun-tahun mendatang, keamanan pangan tidak hanya slogan tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### **Indikator Kinerja 5.3 :**

#### **Jumlah desa pangan aman**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
12	12	100%	Baik

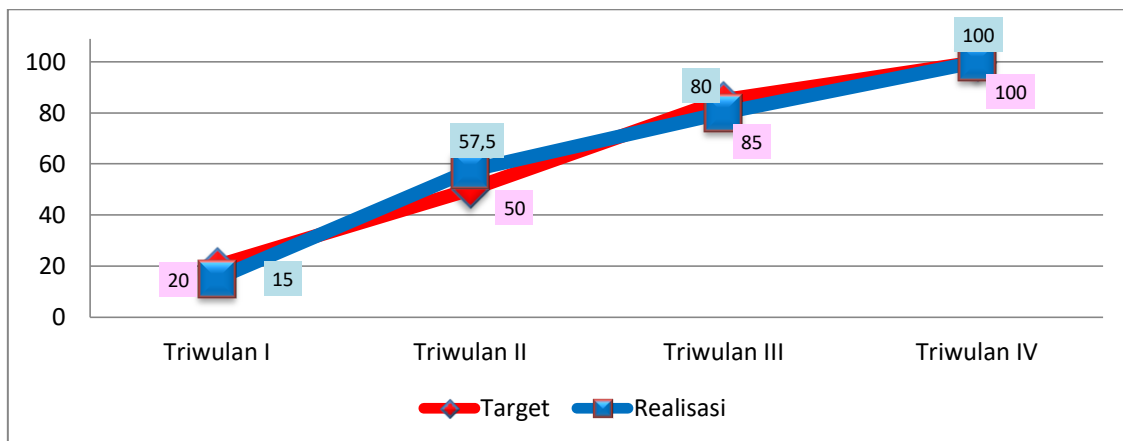
**Tabel 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Tahun 2021**

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, namun untuk target Jumlah Desa Pangan Aman tidak mengalami perubahan.

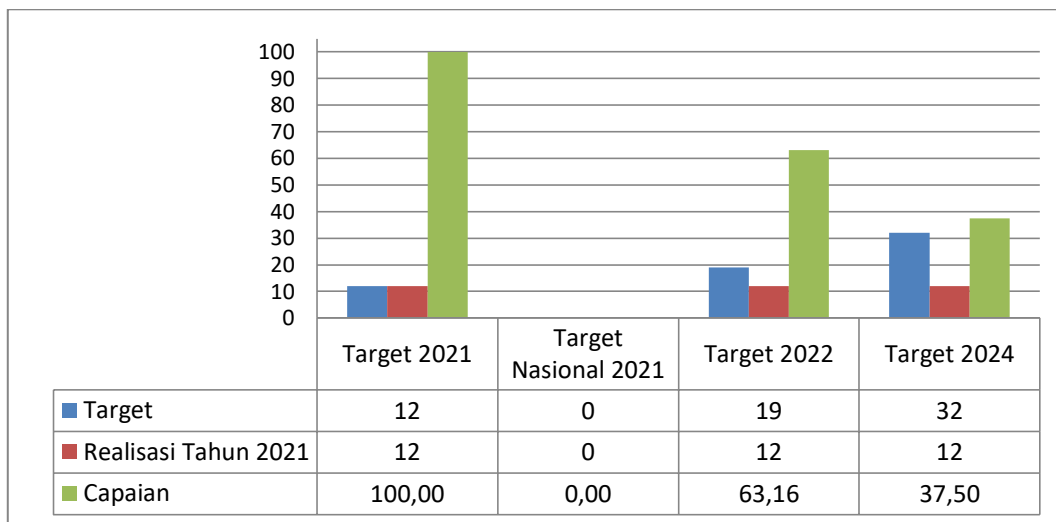
Target untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman Pada tahun 2021 adalah 12 (dua belas) desa yang terdiri dari 8 (delapan) desa baru ditambah dengan pengawalan terhadap 4 (empat) desa yang telah dilaksanakan di tahun 2020. Target desa yang diintervensi keamanan pangan tahun 2021 mengalami perubahan dari target awal yaitu enam desa. Bertambahnya target desa karena mengakomodir kekurangan dua desa di tahun 2020.

Masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 di kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan, sebagian besar berstatus zona merah, sehingga Pemerintah Daerah membatasi pertemuan tatap muka dan kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak.



**Grafik 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Pertriwulan Tahun 2021**

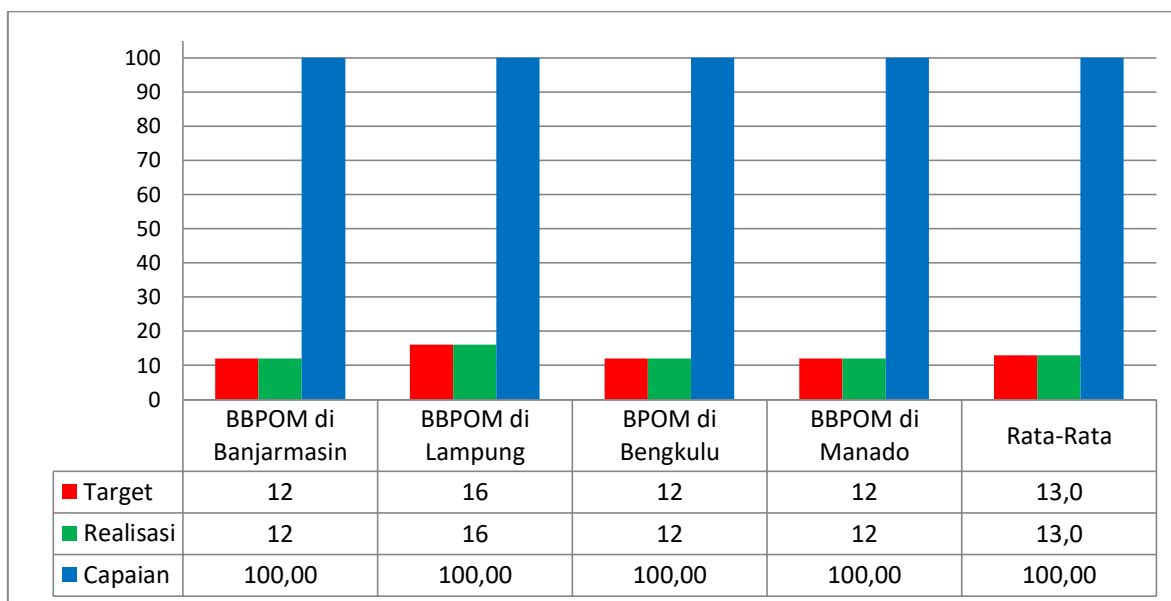
Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2021. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna. Di tahun 2021 sekolah tidak aktif, pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga tidak ada sampling dan pengujian pangan jajanan di kantin dan lingkungan sekolah. Kader keamanan pangan yang dibentuk dari komunitas sekolah juga tidak melibatkan siswa, kader hanya terdiri dari guru dan komite sekolah. Ini dikarenakan kasus Covid 19 cukup tinggi di daerah sehingga tidak memungkinkan siswa untuk beraktivitas langsung di luar rumah.



**Grafik 3.2.5.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.3 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Realisasi jumlah desa pangan aman yang diintervensi tahun 2021 dan pengawalan desa yang diintervensi tahun 2020 adalah 12 (dua belas) desa, dan diperoleh capaian terhadap target sebesar 100%. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program adalah status PPKM Level III di salah satu kabupaten yang diintervensi keamanan pangan, sehingga pelaksanaan advokasi kelembagaan desa baru terlaksana di bulan April. Tertundanya awal tahapan kegiatan ini berpengaruh terhadap tahapan kegiatan selanjutnya.

Program Desa Pangan Aman di tahun 2021 dan tahun 2020 mencapai realisasi 100% terhadap target desa yang diintervensi, meskipun dilaksanakan di masa pandemi Covid 19. Kendala yang ada disiasati dengan pembatasan waktu pelaksanaan, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan disertai dengan menjalin komunikasi secara intensif dengan tim keamanan pangan desa, kader keamanan pangan dan komunitas.



**Grafik 3.2.5.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.3  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Target desa pangan aman di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah desa dan kondisi wilayah. Pada tahun 2021, target desa BBPOM di Banjarmasin adalah 12 (dua belas), BBPOM di Bandar Lampung 16 (enam belas) desa, BBPOM di Manado target desa adalah 12 (dua belas) dan target di Balai POM di Bengkulu juga 12 (dua belas) desa, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Pada tahun 2024 target desa yang diintervensi Program Desa Pangan Aman oleh BBPOM di Banjarmasin berjumlah 32 desa, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru berjumlah 4 desa dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target desa pangan aman di tahun 2021 sebanyak 12 desa, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 32 desa pada akhir Renstra tahun 2024.

Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA sebesar Rp.720.093.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.720.091.400,- atau 100%. Indeks Efisiensi yang dicapai adalah 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada

tahun 2021 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dinilai efisien karena kegiatan yang berkaitan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	100%	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.5.3.3. Efisiensi Anggaran IK.5.3 Tahun 2021**

Keberhasilan capaian Program Desa Pangan Aman tahun 2021 ditunjang oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Koordinasi secara internsif kepada lintas sektor, tim keamanan pangan desa, kader keamanan pangan serta komunitas desa.
- 2). Pembentukan grup *whatsapp* yang beranggotakan petugas BBPOM di Banjarmasin serta kader keamanan pangan desa sebagai media komunikasi dan berbagi informasi terkait Obat dan Makanan.
- 3). Selain melaksanakan kegiatan untuk desa yang diintervensi tahun 2021 dan 2020, BBPOM di Banjarmasin juga mengawal Desa Sungai Rasau, Kabupaten Tanah Laut yang diintervensi BPOM tahun 2019. Desa Sungai Rasau telah menganggarkan secara mandiri kegiatan replikasi Desa Pangan Aman bersumber dari APB Desa tahun 2021.

Program Desa Pangan Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah desa yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan desa juga bertambah, sehingga desa yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2021, Desa Sungai Rasau yang diintervensi program Desa Pangan Aman tahun 2019 masuk kategori 10 besar dalam Lomba Desa

Pangan Aman, begitu juga dengan kader keamanan Desa Sungai Rasau, masuk nominator 10 besar Lomba Kader Keamanan Pangan. Kegiatan keamanan pangan yang telah dilaksanakan tim keamanan pangan dan kader Desa Sungai Rasau didokumentasikan dan diunggah di akun media sosial *Facebook* desa, sehingga pengalaman dan penerapan keamanan dapat menjadi contoh bagi desa lain. Hal ini juga sebagai penguatan, bahwa penerapan keamanan pangan tidak selalu memerlukan banyak anggaran. Dengan semangat dan kemauan para kader yang didukung oleh perangkat desa serta Pemerintah Daerah, keamanan pangan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses penyiapan bahan pangan, produksi, penyiapan, penyajian hingga pangan siap dikonsumsi.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

#### **Indikator Kinerja 5.4 :**

#### **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
4	4	100%	<b>Baik</b>

**Tabel 3.2.5.4.1. Realisasi Kinerja IK.5.4 Tahun 2021**

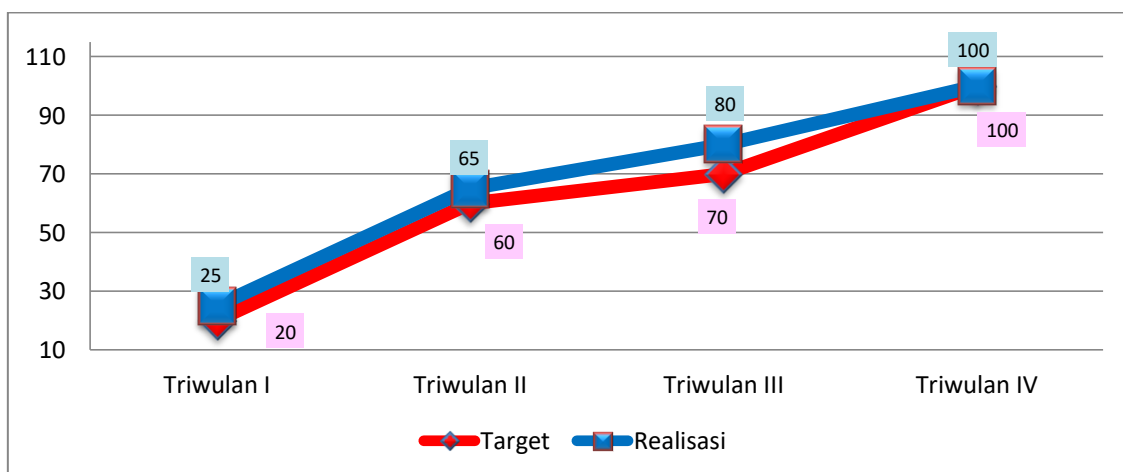
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, selain dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, juga terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja, yaitu yang semula nama indikator kerjanya adalah Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, namun untuk targetnya tidak mengalami perubahan.

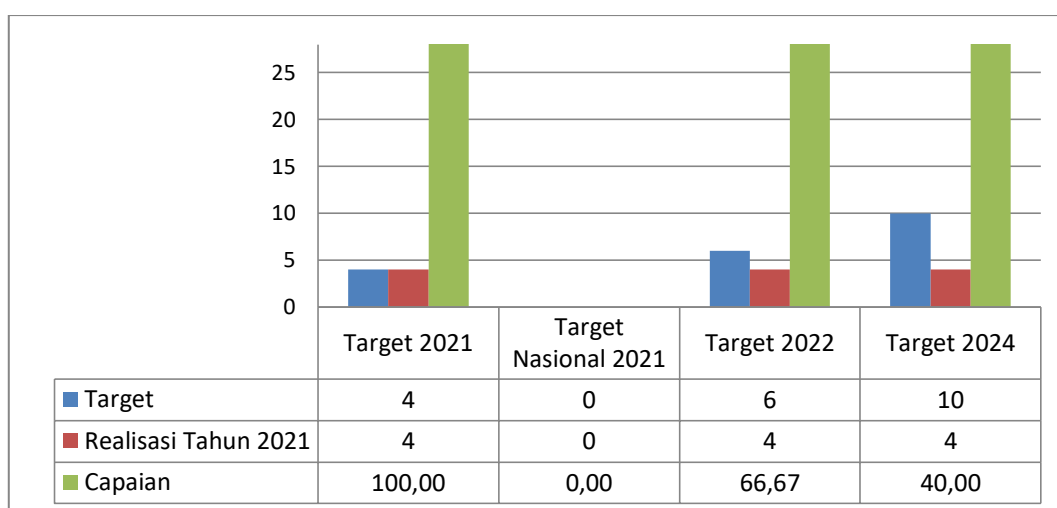
Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2021, memiliki target sebanyak 4 (empat) Pasar. Jumlah ini terdiri dari 2 (dua) pasar yang baru diintervensi di tahun 2021 ditambah dengan pengawalan terhadap 2 (dua) Pasar yang telah dilaksanakan di tahun 2020.

Delapan tahapan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap 1, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap 2 dan lomba pasar aman dari bahan berbahaya. Capaian program pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 adalah 100%, karena seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan di empat pasar yang difokuskan sebagai target.



**Grafik 3.2.5.4.1. Realisasi Kinerja IK.5.4 Pertriwulan Tahun 2021**

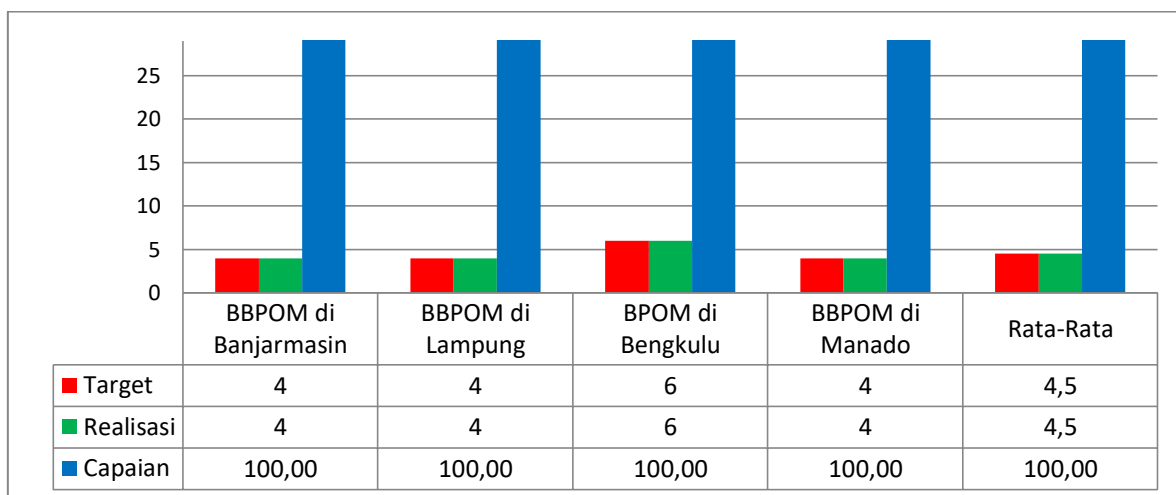
Pada tahun 2021, selain pelaksanaan target pasar tahun 2021 dan pengawalan pasar tahun 2020, terlaksana juga pengawalan kepada pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi tahun 2016, berupa penyediaan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kegiatan sampling pangan, pembelian test kit dan permohonan tenaga instruktur BBPOM di Banjarmasin untuk melatih petugas dinas perdagangan dalam pengujian bahan berbahaya pada pangan dengan uji cepat.



**Grafik 3.2.5.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.4 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Untuk target pasar aman dari bahan berbahaya pada tahun 2021 dan 2020 berbeda jumlahnya, tetapi realisasi sama yaitu mencapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 dengan banyak kendala yang dihadapi. Agar dapat dilaksanakan secara baik dan mencapai target, kegiatan berupa pertemuan tatap muka dilakukan dengan pembatasan waktu, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan disertai dengan menjalin komunikasi secara intensif dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota sebagai instansi penanggungjawab dan petugas pasar sebagai pelaksana teknis kegiatan. Terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya, dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan sampling dan pengujian sampel di area pasar. Menurunnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dan

tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, merupakan sasaran dari intervensi pasar aman dari bahan berbahaya.



**Grafik 3.2.5.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.4  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah pasar dan kondisi wilayah. Pada tahun 2021, target pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Manado masing-masing 4 (empat) pasar, sedangkan target di Balai POM di Bengkulu adalah 6 (enam) pasar, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%. Kendala yang dihadapi masing-masing balai tentunya berbeda, untuk BBPOM di Banjarmasin, kasus Covid 19 yang tinggi dan berstatus zona merah hingga triwulan satu, menyebabkan kegiatan advokasi baru terlaksana di bulan April dan berpengaruh terhadap tahapan berikutnya.

Kendala lainnya yaitu adanya petugas pasar yang dimutasi sehingga memerlukan koordinasi kembali dalam penunjukkan petugas pengganti serta melatih petugas pengujian dengan *test kit*. Perubahan petugas pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Banjarmasin, sehingga perlu pembelajaran dan pendampingan berkesinambungan dalam pelaksanaan.

Dalam meraih capaian kinerja tahun 2021, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.160.438.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.160.437.720,- atau 100%. Dengan realisasi anggaran sebesar 100,00 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran terkait paspasar aman dari bahan berbahaya dinilai telah **efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	100%	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.5.4.2. Efisiensi Anggaran IK.5.4 Tahun 2021**

Keberhasilan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2021 ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi intensif kepada Dinas Perdagangan dan petugas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.
- 2) Pendampingan kepada petugas BBPOM di Banjarmasin yang baru terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
- 3) Pendampingan kepada petugas pasar yang baru dalam pelaksanaan uji sampel pangan untuk kegiatan monev tahap dua.
- 4) Pembentukan grup Whatsapp yang beranggotakan petugas balai, petugas pasar dan komunitas pasar untuk berbagi informasi Pangan Aman.
- 5) Pendampingan dan pelaksanaan lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang mengajukan Pasar Pangeran Bumi Raya, Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai peserta.
- 6) Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten tanah Bumbu sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah pasar yang diintervensi, jumlah fasilitator dan pengelola pasar juga bertambah, sehingga pasar yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Jumlah pasar aman berbasis komunitas BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

**Sasaran Kegiatan 6 :**

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**Indikator Kinerja 6.1 :**

**Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	100	100%	Baik

**Tabel 3.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Tahun 2021**

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

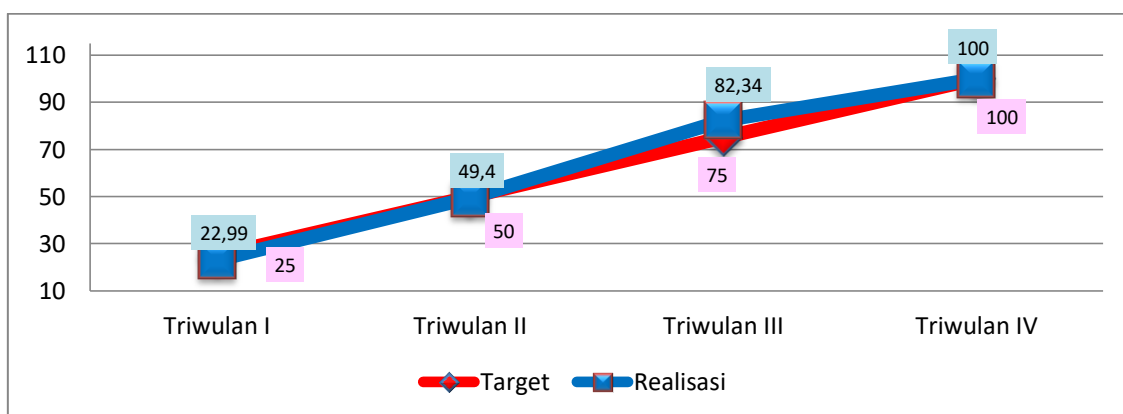
$$\% \text{ Obat Std} = \frac{\text{Jumlah Obat Diperiksa sesuai Standar} + \text{Jumlah Obat Diuji sesuai Standar s.d Triwulan } n}{\text{Jumlah Target Obat Diperiksa} + \text{Jumlah Target Obat Diuji Tahun } n} \times 100$$

Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium, baik pengujian kimi maupun mikrobiologi.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021, diperoleh Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 100%, yang diperhitungkan dari :

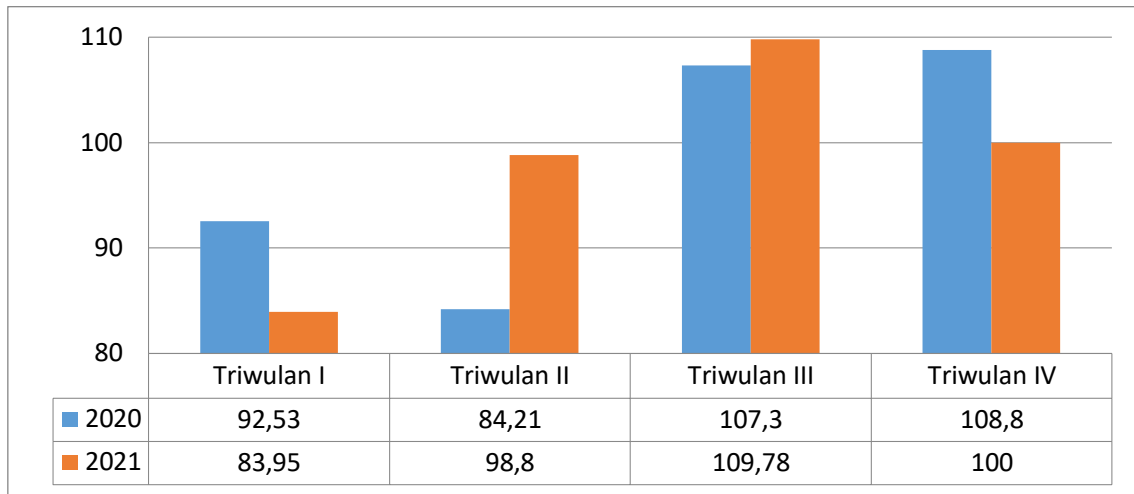
- Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar 2.075 sampel
- Jumlah target sampel Obat yang diperiksa 2.075 sampel
- Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar 2.070 sampel
- Jumlah target sampel Obat yang diuji dikurangi sampel TIE, rusak, kadaluarsa 2.070 sampel

Rangkuman target, realisasi, capaian dan kriteria triwulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Pertriwulan Tahun 2021**

Apabila capaian kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut:

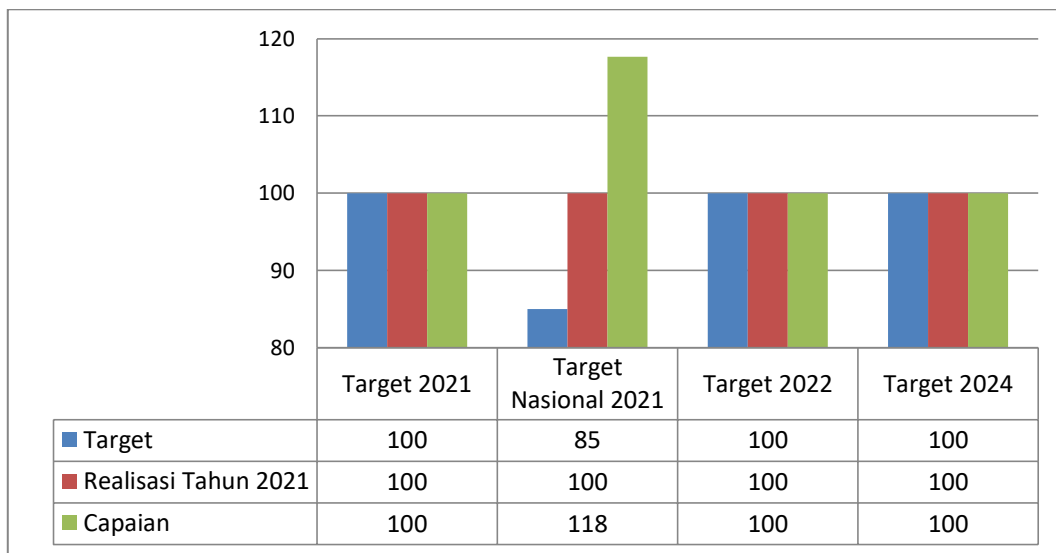


**Grafik 3.2.6.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja triwulan IV tahun 2021 dibanding triwulan IV tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 108,8%, dengan jumlah target sampel Obat, baik yang diperiksa sesuai standar maupun yang diuji sesuai standar sama yaitu 2.075 sampel. Namun, untuk perhitungan capaian tersebut pada akhir tahun, penyebut dikoreksi dengan mengurangi target sampel Obat yang diuji dengan jumlah sampel Obat TIE, rusak dan kadaluarsa sehingga jumlahnya akan sama dengan jumlah sampel Obat yang masuk ke laboratorium untuk diuji.

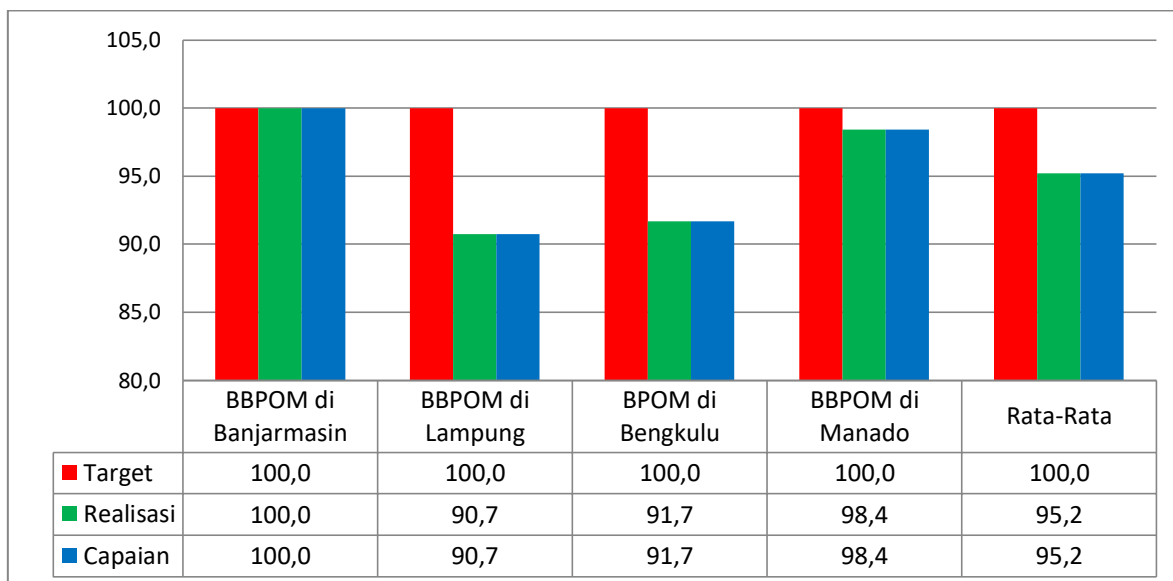
Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 100%, capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV tahun 2021 telah mencapai target sebesar 100%.

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 100,00%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling.
- b) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp213.321.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.213.306.454,- atau 99,99%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	99,99%	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.6.1.2. Efisiensi Anggaran IK.6.1 Tahun 2021**

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 adalah sebesar 100% (**Efisien**).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase sampel Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium.
- b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling.
- c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

## Indikator Kinerja 6.2 :

### Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	100	100%	Baik

Tabel 3.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Tahun 2021

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

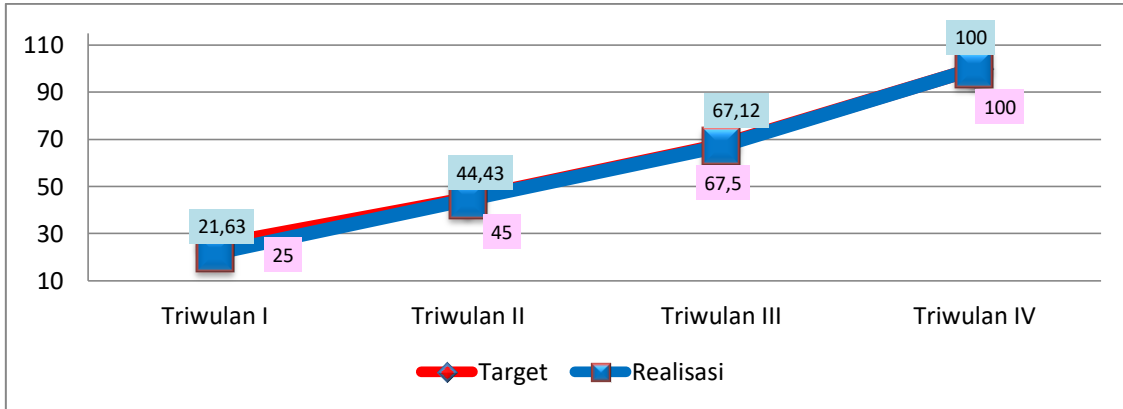
$$\% \text{ Makanan Std} = \frac{\text{Jumlah Makanan Diperiksa sesuai Standar} + \text{Jumlah Makanan Diuji sesuai Standar s.d Triwulan } n}{\text{Jumlah Target Makanan Diperiksa} + \text{Jumlah Target Makanan Diuji Tahun } n} \times 100$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium, baik pengujian kimi maupun mikrobiologi.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021, diperoleh Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 100%, yang diperhitungkan dari :

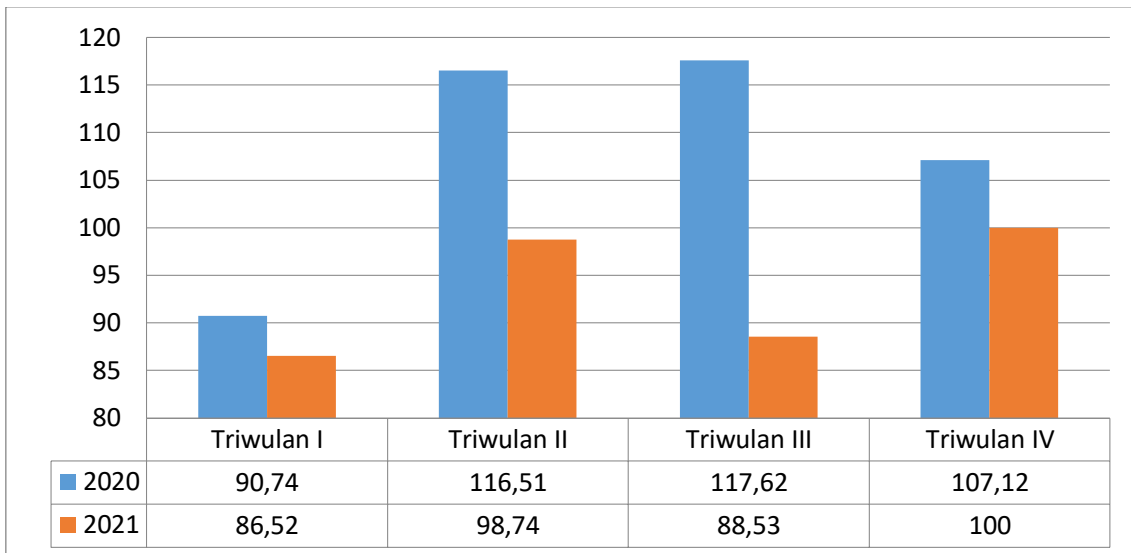
- Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar 853 sampel
- Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa 853 sampel
- Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar 851 sampel
- Jumlah target sampel Makanan yang diuji dikurangi sampel TIE, rusak, kadaluarsa 851 sampel

Rangkuman target, realisasi, capaian dan kriteria triwulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Pertriwulan Tahun 2021**

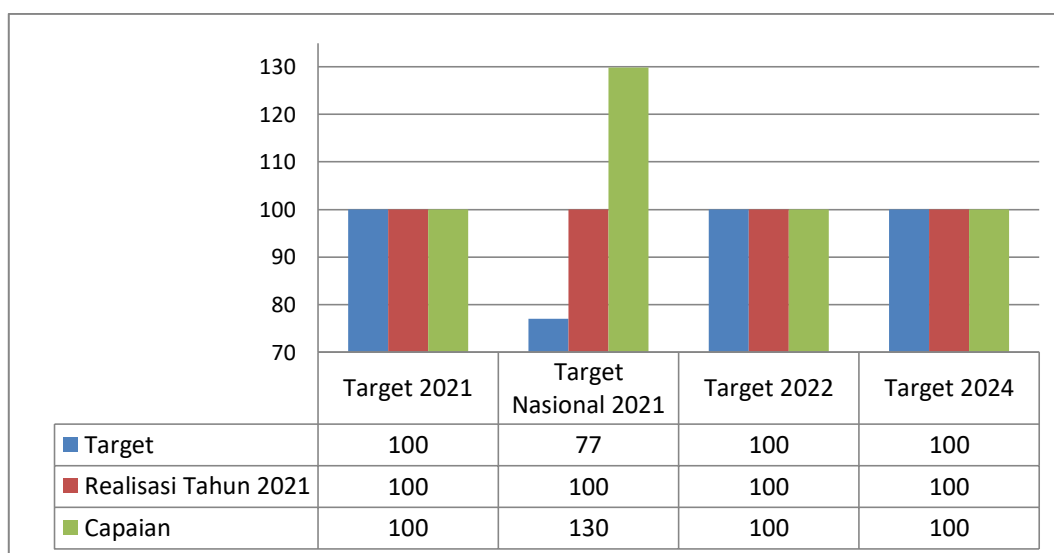
Apabila capaian kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut:



**Grafik 3.2.6.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.2 Tahun 2020-2021**

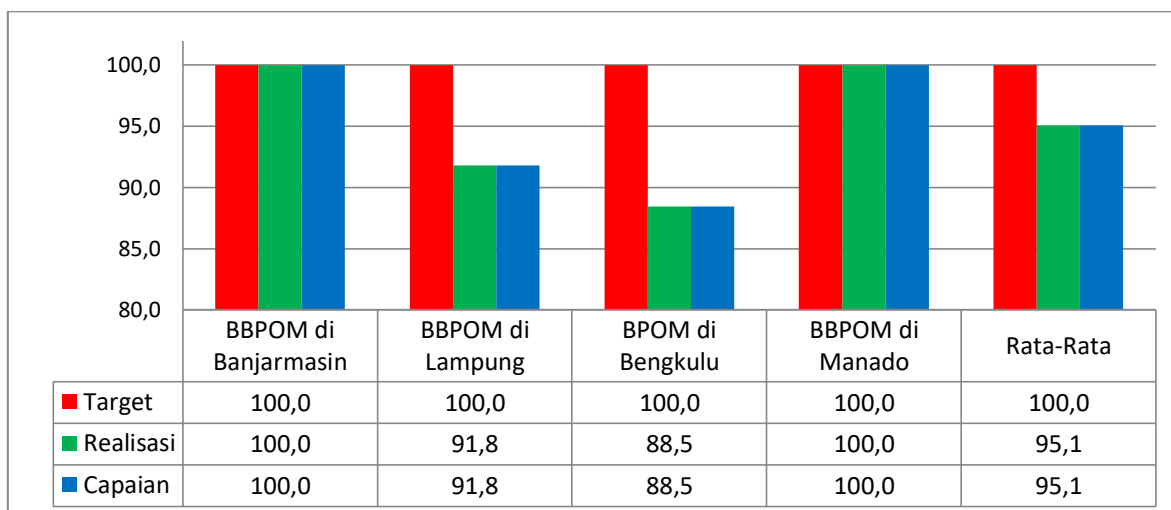
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 107,12%. Hal tersebut terjadi karena target kinerja indikator ini pada tahun 2021, yang sebesar 100%, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 90%. Namun berdasarkan jumlah sampel terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020, jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 568 sampel dari 613 sampel Makanan yang masuk laboratorium, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 853 sampel dari 853 sampel Makanan yang masuk laboratorium.

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi tertinggi bersama dengan BBPOM di Manado dibandingkan dengan dua Balai Besar/Balai POM lain yang seklaster, yaitu sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 100,00%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Makanan dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling.
- b) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.120.363.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.120.353.312,- atau 85,89%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	99,99%	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.6.2.2. Efisiensi Anggaran IK.6.2 Tahun 2021**

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium.
- b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling.
- c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### **Saran Kegiatan 7 :**

#### **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

#### **Indikator Kinerja 7.1**

#### **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
90	95,53	106,14%	<b>Baik</b>

**Tabel 3.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.7.1 Tahun 2021**

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu *meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*, BBPOM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya yaitu *Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan* dengan sasaran strategis *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin*. Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2021 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebanyak 10 (sepuluh) perkara pidana, terdiri dari 8 perkara yang ditangani oleh BBPOM di Banjarmasin, 1 perkara ditangani oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan 1 perkara ditangani oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Selain itu pada tahun 2021 BBPOM di Banjarmasin juga menyelesaikan perkara *carry over* tahun 2020 sebanyak 2 perkara, yang terdiri dari 1 perkara dari BBPOM di Banjarmasin, dan 1 perkara dari Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara.

Sebagaimana dalam Dokumen Renstra 2020-2024 BBPOM di Banjarmasin, telah ditetapkan target indikator kinerja BBPOM di Banjarmasin. Pada tahun 2021 wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan relatif bisa dikendalikan, sehingga dilakukan reviu target indikator kinerja BBPOM di Banjarmasin. Target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin **dinaikkan** dari semula 83% menjadi **90%**. Target tersebut mencakup kinerja BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	81	83	85	88	90
<b>Menjadi</b>	89,69 (Realisasi)	90	92	94	96

**Tabel 3.2.7.1.2. Perubahan Target IK 7.1.**

**Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Setelah dilakukan kegiatan di tahun 2021 sesuai dengan reviu target kinerja tersebut, didapatkan hasil realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah

sebesar **95,53%** yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagaimana tabel berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
<b>Target</b>	<b>10</b>	<b>2</b>				
SPDP	0	0	1,00		0,15	15,00%
Tahap I	3	0	1,00	0,15	0,4	40%
P21	1	0	0,70	0,15	0,3	22,91%
Tahap II	7	2	0,60	0,15	0,15	10,27%
<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>11</b>	<b>-</b>				<b>88,18%</b>
<b>Realisasi Carry Over</b>	<b>-</b>	<b>2</b>				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	11	2	13	12	108,33%	95,53%
Target Perkara	10	2				

**Tabel 3.2.7.1.3. Perhitungan Realisasi Kinerja IK 7.1.**

Realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2021 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan (90%), sehingga capaian realisasi terhadap target tahun 2021 adalah sebesar **106,14%**.

Terdapat perbedaan definisi operasional indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2020 dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, definisi operasional indikator kinerja adalah penyelesaian perkara hingga dilaksanakannya Tahap II, sedangkan

untuk tahun 2020 dan tahun 2021, definisi operasional indikator kinerja adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan yang dihitung dengan pembobotan setiap tahapan penyidikan. Perbandingan kinerja penindakan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

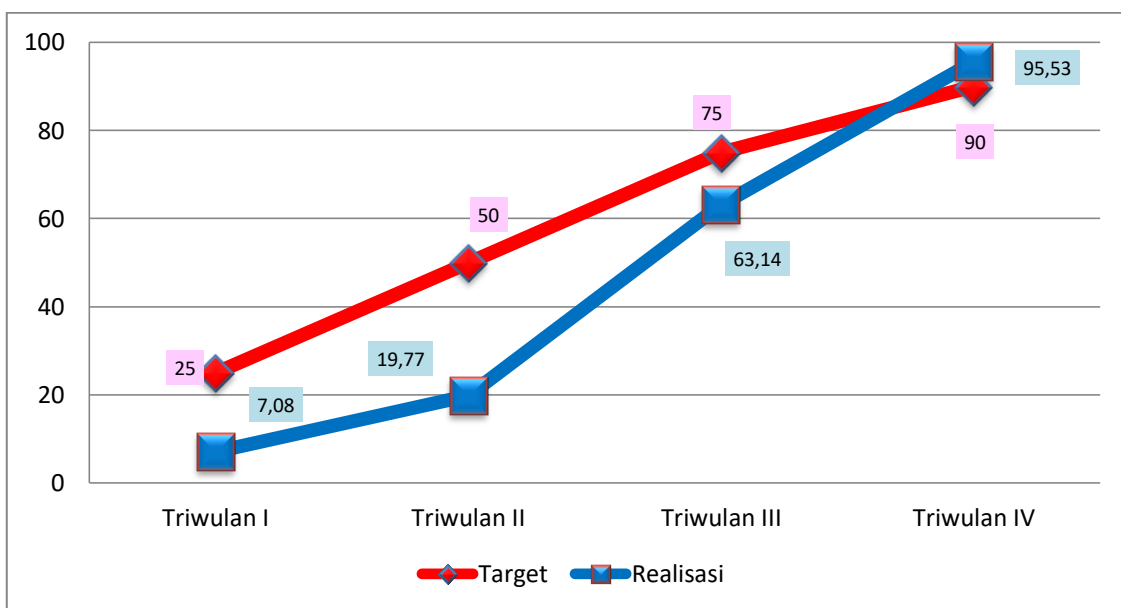
<b>Tahun</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
2019	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	90%	68,75%	76,39%
2020	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	81%	89,69%	110,73%
2021	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	90%	95,53%	106,14%

**Tabel 3.2.7.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 7.1. Tahun 2019-2021**

Capaian kinerja tahun 2021 yaitu 106,14 % lebih rendah daripada capaian kinerja tahun 2020 sebesar 110,73 % dan lebih tinggi daripada capaian kinerja tahun

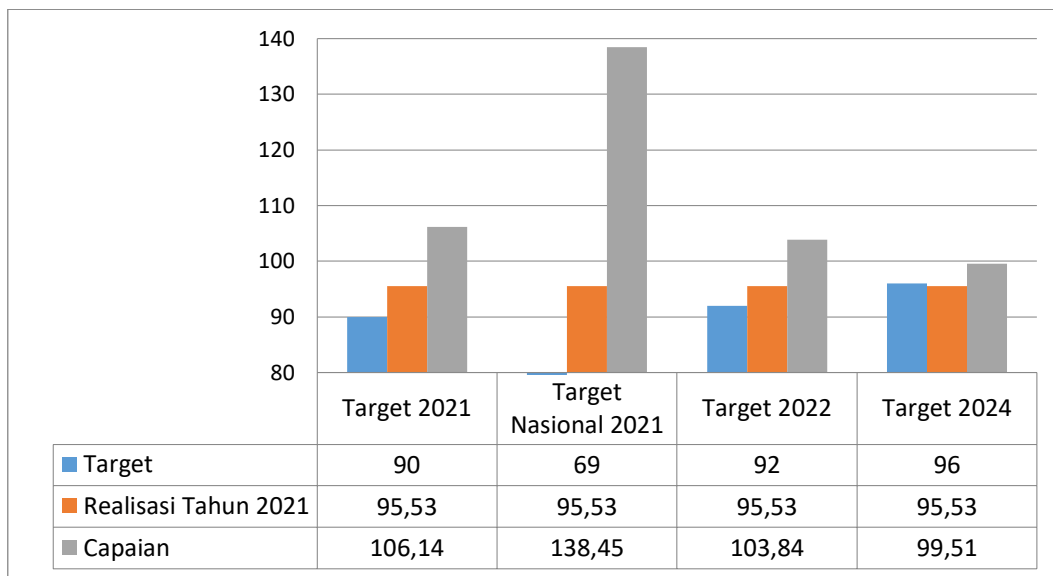
2019 sebesar 76,39%. Namun target kinerja tahun 2021 sebesar 90% lebih tinggi daripada target kinerja tahun 2020 sebesar 81% dan sama dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 90%. Sedangkan realisasi kinerja menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, yaitu dari 68,75% di tahun 2019, naik menjadi 89,69% di tahun 2020 dan menjadi 95,53% di tahun 2021.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



**Grafik 3.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.7.1 Pertriwulan Tahun 2021**

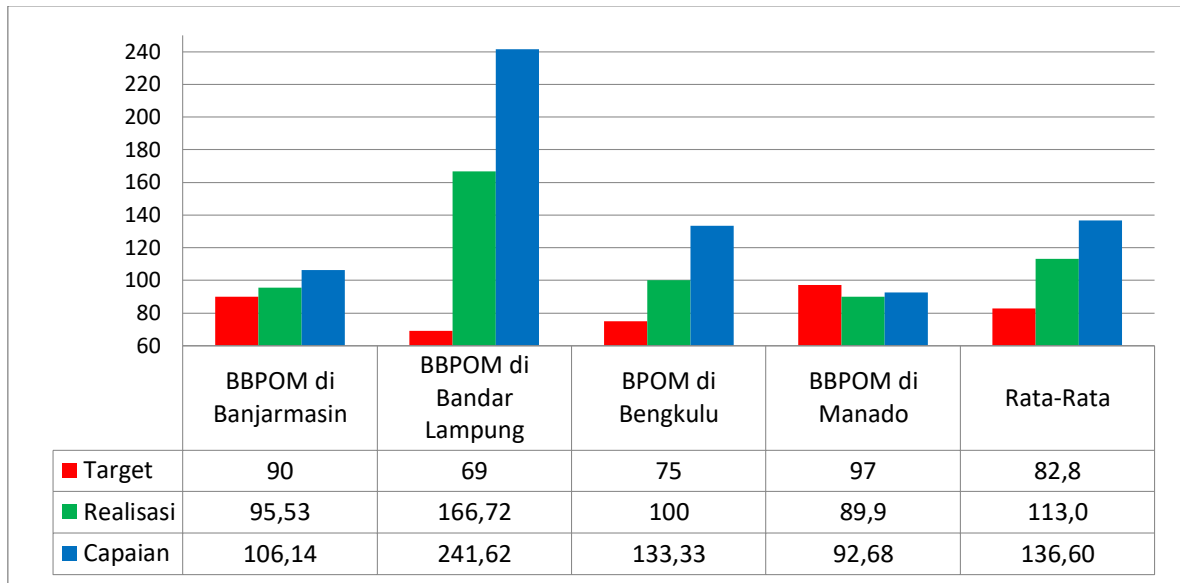
Selanjutnya realisasi kinerja tahun tersebut apabila dibandingkan dengan target BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, target nasional tahun 2021, target BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Grafik 3.2.7.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.7.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Dari grafik di atas tergambar bahwa capaian kinerja tahun 2021 lebih tinggi daripada target kinerja balai tahun 2021 dan tahun 2022 namun sedikit lebih rendah daripada target kinerja balai tahun 2024. Sehingga diharapkan BBPOM di Banjarmasin akan mampu mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024. Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 tersebut sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan target nasional tahun 2021 karena terdapat perbedaan definisi operasional indikator kinerja balai dengan pusat, yaitu pusat menggunakan definisi operasional indikator kinerja berupa persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.

Perbandingan realisasi kinerja penindakan BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 dengan capaian kinerja penindakan Balai Besar / Balai POM dalam klaster 4 tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.7.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.7.1  
Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa realisasi kinerja penindakan BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi daripada BBPOM di Manado namun lebih rendah daripada BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Bengkulu. Realisasi kinerja tersebut berbeda antar UPT dikarenakan karakteristik tiap daerah berbeda-beda, baik modus operandi kejahatannya, penyebaran perkara, tingkat kesulitan perkara, hingga sistem koordinasi lintas sector *Criminal Justice System* (CJS) dalam penanganan perkara.

Realisasi capaian kinerja penindakan BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi daripada BBPOM di Manado, sedangkan capaian kinerja BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Bengkulu tidak dapat disimpulkan karena melebihi rentang  $100\% \leq x \leq 125\%$ . Sehingga capaian kinerja penindakan BBPOM di Banjarmasin adalah yang tertinggi daripada Balai Besar/ Balai POM lain di kluster 4.

Capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021. Hal ini dicapai dengan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber dan operasi intelijen sehingga diperoleh target operasi penindakan

yang valid dan dapat terpenuhi unsur-unsur pasal disangkakan ketika dilakukan tahap penyidikan. Selain itu, karena tahapan kegiatan penyidikan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh internal dan sangat berhubungan dengan pihak eksternal khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, maka peningkatan perkuatan koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS sangat berpengaruh terhadap keberhasilan BBPOM di Banjarmasin dalam meraih realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 ini..

Dalam meraih capaian kinerja ini, diperlukan sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan sumber daya anggaran sebagai input untuk meraih output yang akan dicapai berupa capaian kinerja. Dalam meraih capaian kinerja tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp.926.329.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.921.314.648,- atau 99,45%. Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,07 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,07 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
106,14%	99,46%	1,07	0,07	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.7.1.5. Efisiensi Anggaran IK 7.1 Tahun 2021**

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 106,14% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### **Sasaran Kegiatan 8 :**

**Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal.**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**Indikator Kinerja 8.1 :**  
**Indeks RB BBPOM di Banjarmasin**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
89	80,76	99,95 %	Baik

**Tabel 3.2.8.1.1. Realisasi Kinerja IK 8.1 Tahun 2021**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan dan harus dilakukan dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan baik, efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM berkomitmen untuk terus melaksanakan RB. Sejak tahun 2010, BPOM menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan RB, dan saat ini merupakan periode pembangunan jangka menengah (5 tahunan) ketiga BPOM melaksanakan RB.

Berbagai pencapaian dalam pelaksanaan RB telah diraih oleh BPOM. Meskipun demikian, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional, harapan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meneguhkan BPOM untuk terus berkomitmen dalam melakukan transformasi organisasi melalui RB. Reformasi Birokrasi BPOM dilaksanakan sesuai dengan *Grand Design* RB Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Sesuai dengan *Grand Design*, saat ini masuk dalam periode ketiga, yaitu tahun 2020-2024 dengan harapan RB akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan RB periode ketiga ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan sasaran RB pada periode ketiga ini adalah:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mendukung pelaksanaan RB BPOM yang selaras dan sinergi dengan *Grand Design* dan *Road Map* RB, maka perlu disusun dokumen perencanaan pelaksanaan RB BPOM 2020-2024. Selain itu, dokumen perencanaan tersebut juga harus sinergis dan selaras dengan Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020. Dokumen perencanaan RB BPOM juga harus dapat mengakomodasi perkembangan dunia saat ini, mulai dari perubahan komposisi pegawai BPOM dengan generasi milenial menjadi generasi terbanyak saat ini, perubahan akibat revolusi industri 4.0, dan juga perubahan *landscape* dunia akibat masifnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya dan *life style* manusia.

Dengan dasar tersebut, maka disusun dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024 yang lebih implementatif, dan tergambar jelas perubahan yang akan dilakukan di BPOM. *Road Map* RB BPOM disusun dengan analisis dan sudut pandang yang lebih holistik, melibatkan berbagai pihak dan unsur dalam internal BPOM dengan harapan *Road Map* disusun lebih komprehensif, dan antisipasif sehingga diperoleh potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan RB yang lebih utuh di BPOM. Melalui dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024, diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan RB di BPOM periode 2020-2024 sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan di BPOM.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Unit Kerja

- sesuai Keputusan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Target Indeks RB Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM sesuai Surat Inspektur Utama No B-PI.06.01.7.72.01.20.133 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian target, Definisi Operasional, dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP Badan POM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024,

No	IKU	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM (nilai rata-rata nasional tahun 2019 adalah 75,81)					
a.	≤75,81	85	89	93	94	95
b.	>75,81 – 81,81	88	90	93	94	95
c.	>81,81 – 86,81	90	91	93	94	95
d.	>86,81	91	92	93	94	95

**Tabel 3.2.8.1.1. Target Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM Tahun 2020-2024**

BBPOM di Banjarmasin sebagai salah satu UPT Badan POM, yang perolehan nilai Indeks RB tahun 2019 adalah **65,33** di bawah rata-rata nasional 75,81, maka target Indeks RB BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 85 dan pada akhir RPJM tahun 2024 targetnya adalah 95.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM noomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks RB BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	85	89	93	94	95
<b>Menjadi</b>	74,08 (Realisasi)	80.8	83.3	85.8	88.3

**Tabel 3.2.8.1.2. Perubahan Target IK 8.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM sebagai acuan setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan POM serta Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.01 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2021, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungnya dalam rangka menuju WBK dan WBBM pada BBPOM di Banjarmasin.

Tujuan evaluasi PMPZI tersebut adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada BBPOM di Banjarmasin sebesar **89,4** dengan rincian sebagai berikut :

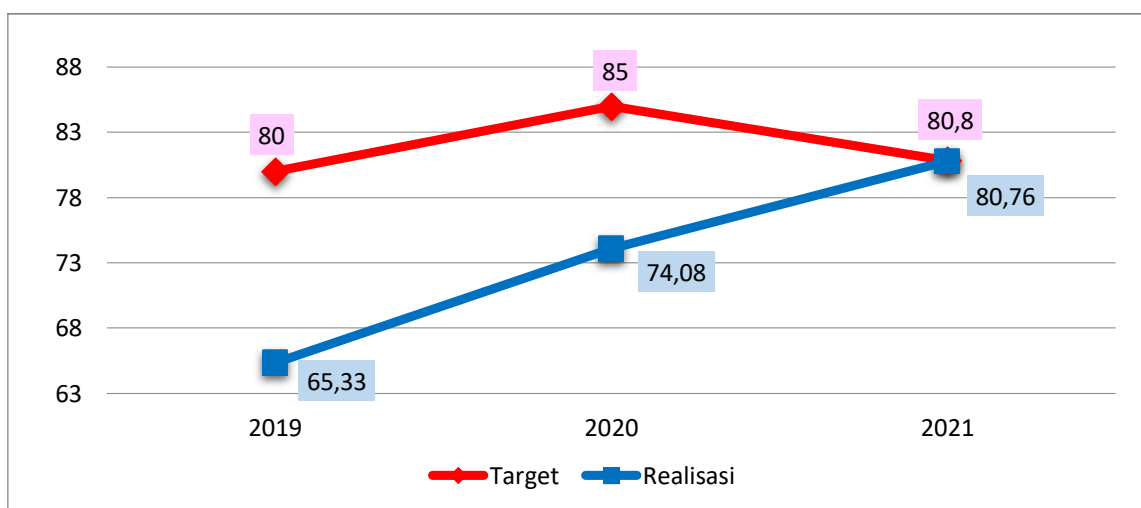
PENILAIAN (BOBOT)		Nilai	%	Keterangan	
A.	<b>PROSES (60)</b>				
	I. <b>MANAJEMEN PERUBAHAN (8)</b>	7,16	89,47%	<b>MS</b>	
	II. <b>PENATAAN TATALAKSANA (7)</b>	6,00	85,71%	<b>MS</b>	
	III. <b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)</b>	8,03	80,28%	<b>MS</b>	
	IV. <b>PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)</b>	9,69	100%	<b>MS</b>	
	V. <b>PENGUATAN PENGAWASAN (15)</b>	13,03	86,83%	<b>MS</b>	
	VI. <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)</b>	8,12	81,19%	<b>MS</b>	
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>52,02</b>		<b>MS</b>	
B.	<b>HASIL (40)</b>				
	I.	<b>PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)</b>	<b>19,03</b>	<b>95,13%</b>	<b>MS</b>
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	14,03	93,50%	<b>MS</b>
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	<b>MS</b>
	II.	<b>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)</b>	<b>18,35</b>	<b>91,75%</b>	<b>MS</b>
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)		18,35	91,75%	<b>MS</b>	
<b>TOTAL HASIL</b>		<b>37,38</b>			
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>		<b>89,4</b>			

**Tabel 3.2.8.1.3. Hasil evaluasi PMPZI BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021**

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.09.21.22 tentang Konversi Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021, dengan adanya **perbedaan** hasil penilaian TPI Badan POM dengan hasil penilaian KemenPANRB untuk penetapan WBK serta WBBM yang cukup tinggi maka **nilai komponen pengungkit PMPZI** dikonversikan dengan hasil penilaian BB/BPOM oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020.

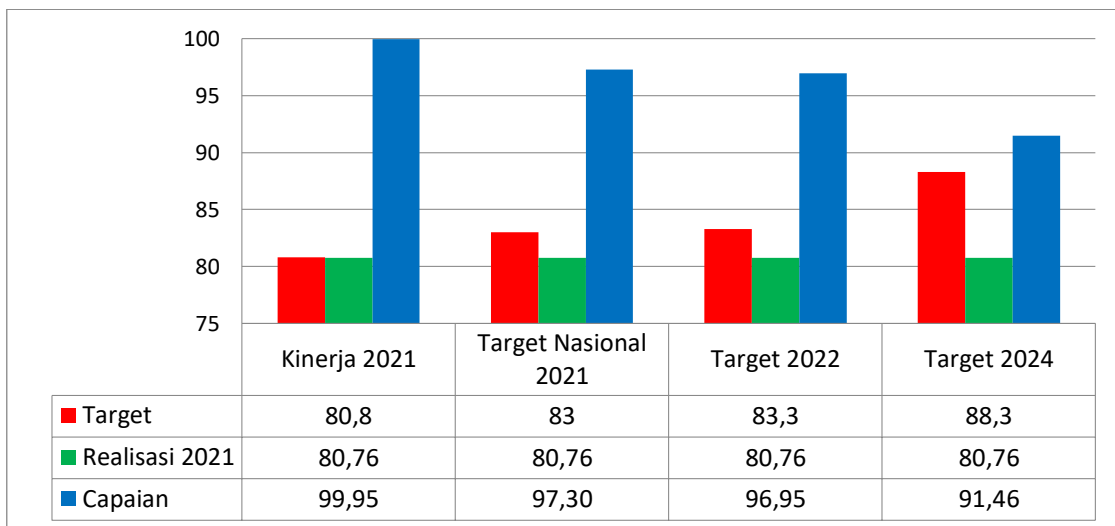
Dari perhitungan konversi tersebut diperoleh nilai koefisien konversi sebesar 0,834 sehingga menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin sebesar **80,76**.

Realisasi Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020, seperti yang tergambar dalam grafik berikut :



**Grafik 3.2.8.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 8.1 Tahun 2019-2021**

Berikut adalah gambaran perbandingan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin terhadap target Nasional tahun 2021, target Balai tahun 2022 dan 2024, :



**Grafik 3.2.8.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Faktor-faktor yang mendukung capaian nilai IK ini adalah :

1. Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja. Terhadap pelaksanaan rencana kerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan termasuk terhadap capaian target prioritas;
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change* (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai *role model* perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
3. Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan, hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan tindak lanjut;
4. Pimpinan telah terlibat dalam perencanaan kinerja dan melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
5. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, antara lain :
  - a. KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling),
  - b. BAP TWO (Percepatan Penyelesaian Berkas Perkara menjadi 2 Bulan),
  - c. FAST SERVICE 24 (Pelayanan Cepat Selesai Hasil Uji 24 Jam),

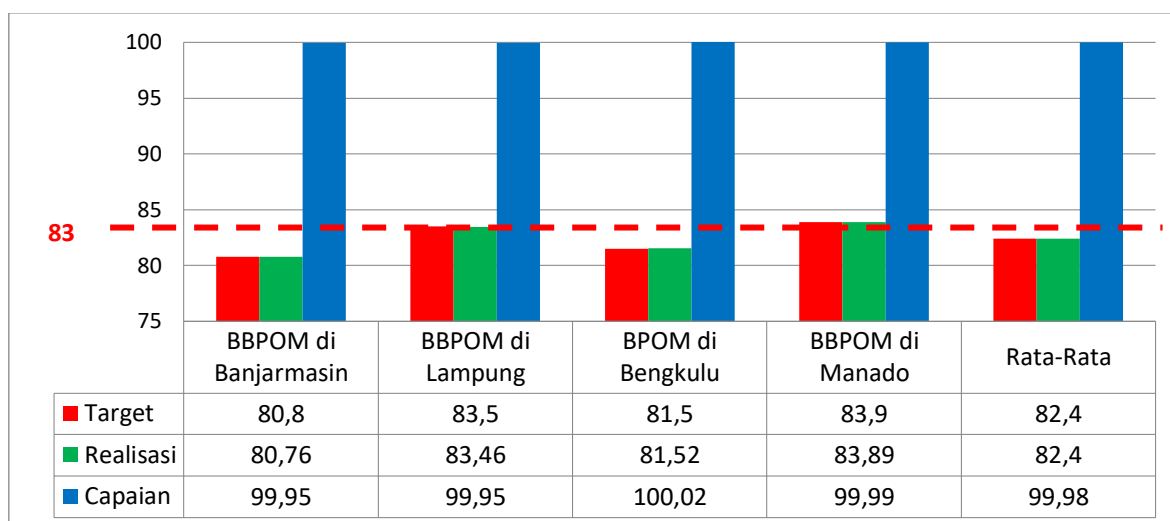
- d. GANII UMKM (Pendampingan jemput bola secara bagi UMKM),
  - e. JANGAN LALAI (Jaga Ruang agar Masyarakat tidak Laporkan Kabalai),
  - f. Ini SOP (Digitalisasi Dokumen SOP),
  - g. AMDK (Aplikasi Manajemen Data Kepegawaian),
  - h. SOLID (Sosialisasi Digital),
  - i. SIAP GRAK (Aksi Nyata Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan),
  - j. Mal Pelayanan Publik Barokah,
  - k. Si ANANG GALUH BANJAR (Sistem Informasi Analisa Anggaran dan Gampang Laporkan Akuntabilitas Hasil Kerja BBPOM di Banjarmasin),
  - l. Rubrik Anda Bertanya BPOM Menjawab,
  - m. LOBSTER (Lomba Poster dan Video),
  - n. ECO (English Comic),
  - o. Sambut Ulun,
  - p. SUARA EMAS (Sounding Suara Embak dan Mas),
  - q. SOBAT (Sosialisasi Kegiatan Balai melalui TV),
  - r. SEGAR (Senam Gaya PIKKIR),
  - s. KALEM (Kata Role Model),
  - t. TIKAR (Sticker WA PIKKIR),
  - u. KRIPIK BANJAR (Kreativitas Ber-PIKKIR BBPOM Banjarmasin),
  - v. MIE TALAS (Silaturahmi Elektronik setiap Tanggal Tujuh Belas),
  - w. NAGA RAPID (Nanang Galuh Rajin Rapi Disiplin),
  - x. Si AMAT (Inovasi Akibat Mucil dan Terlambat);
6. Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja dan melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
  7. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,67 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,74 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Dukungan Manajemen Satker, khususnya penyusunan dokumen, evaluasi dan laporan, dan konsultasi/koordinasi serta peningkatan kompetensi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 251.607.000,- dengan realisasi anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 251.456.036,- atau 99,94%, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 99,95% maka Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
99,95	99,94%	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.8.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 8.1 Tahun 2021**

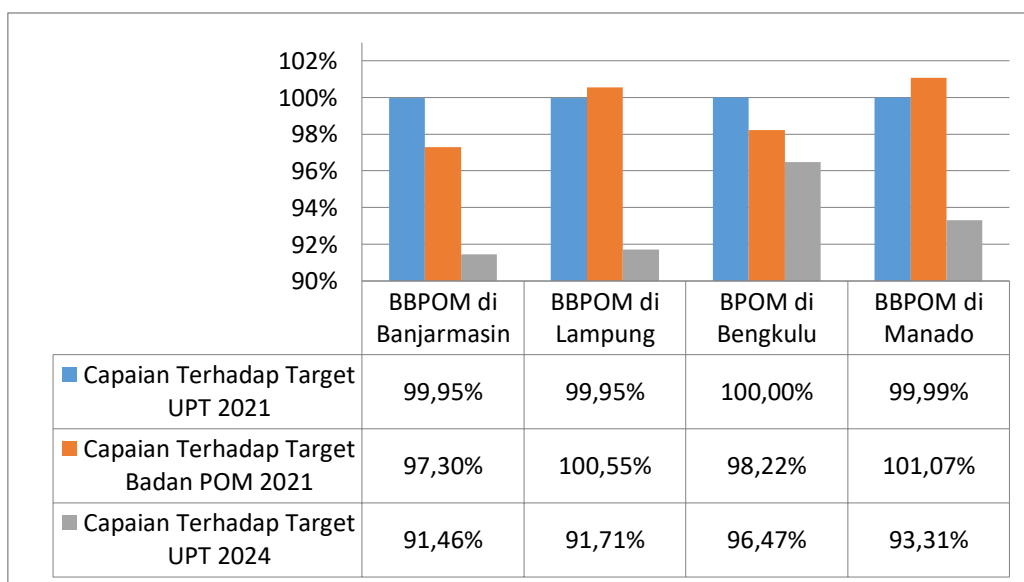
Perbandingan nilai indeks RB BBPOM di Banjarmasin terhadap Balai Besar/Balai POM dalam Kluster 4 dapat dilihat pada grafik berikut :



--- Target Nasional Tahun 2021 = 83

**Grafik 3.2.8.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Perolehan nilai tersebut menempatkan BBPOM di Banjarmasin berada di urutan ke empat, dimana nilai tertinggi diperoleh BBPOM di Manado, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Bengkulu. Namun apabila yang dibandingkan capaiannya maka BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Bandar Lampung berada di posisi yang sama, di bawah BPOM di Bengkulu dan BBPOM di Manado, serta di bawah rata-rata capaian Klaster 4.



**Grafik 3.2.8.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks BB/BPOM dalam Klaster 4 Tahun 2021 dengan Target UPT dan Target Nasional 2021 dan Target UPT 2024**

Meskipun realisasi Indeks RB BBPOM di Banjarmasin lebih rendah dibandingkan dengan ke 3 BB/BPOM lain dalam klaster 4, namun BBPOM di Banjarmasin termasuk ke dalam kelompok UPT yang diusulkan untuk Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN RB, dan berhasil meraih predikat WBK.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI oleh BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI namun demikian belum seluruh kegiatan pembangunan ZI terlaksana sesuai rencana kerja dan belum terdapat justifikasi atas kegiatan yang belum terlaksana;

2. Belum terdapat analisa dampak atas inovasi yang telah dibangun BBPOM di Banjarmasin terhadap masyarakat/stakeholder;
3. Belum terdapat perhitungan dan analisis penentuan gap kompetensi manajerial pegawai;
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi, namun data hasil monitoring belum disahkan oleh pimpinan Unit Kerja;
5. Telah dilakukan cascading hingga level individu, namun belum sampai pada level indikator dan belum sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
6. Telah menyusun laporan kinerja namun masih sebagian besar pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja
7. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, namun belum diikuti oleh seluruh petugas;
8. Belum terdapat replikasi inovasi pelayanan publik secara formal.

Yang harus dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI adalah sebagai berikut :

1. Menyusun justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
2. Melakukan analisa dampak atas inovasi yang telah dibangun BBPOM di Banjarmasin terhadap masyarakat/stakeholder;
3. Melakukan perhitungan dan analisis penentuan gap kompetensi manajerial pegawai sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai;
4. Melakukan pengesahan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi secara berkala;
5. Menyusun cascading hingga indikator level individu sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
6. Menyusun laporan kinerja yang memberikan seluruh informasi atas kinerja

7. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan;
8. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM.

Berdasarkan realisasi, capaian kinerja dan tingkat efisiensi yang diperoleh pada tahun 2021, meskipun belum mencapai target 100% namun dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin telah dicapai baik. Keberhasilan ini juga dapat dilihat dari diraihnya predikat WBK oleh BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021. Sedangkan target tahun 2024 sebagai akhir renstra 2020-2024 secara optimis akan tercapai juga.

**Indikator Kinerja 8.2 :**

**Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
78,1	76,14	97,49 %	Baik

**Tabel 3.2.8.2.1. Realisasi Kinerja IK 8.2. Tahun 2021**

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021, khususnya pada BBPOM di Banjarmasin oleh Inspektorat Utama Badan POM adalah :

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada BBPOM di Banjarmasin
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;

5. Memberikan informasi kinerja pada BBPOM di Banjarmasin, dan
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada BBPOM di Banjarmasin

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	80	84	89	91	92
<b>Menjadi</b>	74,16 (Realisasi)	78.1	80.1	82.1	84.1

**Tabel 3.2.8.2.2. Perubahan Target IK 8.2.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 telah dilakukan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

### **1) Perencanaan**

- Mempublikasikan Renstra 2020-2024 pada website BPOM dan subsite BBPOM di Banjarmasin.
- Melengkapi kertas kerja penetapan target dengan justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan mengenai tren kenaikan/penurunan.
- Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan

## **2) Pengukuran**

- Melakukan pemetaan dan mendokumentasikan *cascading* target kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu secara memadai.

## **3) Pelaporan**

- Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu dan memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja
- Melakukan monitoring sub kegiatan dan target per triwulan serta analisisnya yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut)
- Mengkaji ulang ketentuan terkait pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pegawai untuk diterapkan ke semua pegawai dan tingkat unit kerja
- Membuat kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra

## **4) Evaluasi Internal**

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja atas target kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.

## **5) Capaian Kinerja**

- Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

Tindak Lanjut Perbaikan yang telah dilaksanakan :

- ✓ Renstra 2020-2024 telah dipublikasikan pada website BPOM dan subsite BBPOM di Banjarmasin.
- ✓ Membuat kertas kerja pada saat pengusulan/ penetapan target dilengkapi justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan mengenai tren kenaikan/penurunan.
- ✓ Sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan telah dicantumkan dalam rencana aksi
- ✓ Pemetaan dan dokumentasikan *cascading* target kinerja sampai ke tingkat individu telah dilaksanakan namun terkendala belum ditentukannya Indikator Kinerja Individu, sehingga masih menggunakan butir kegiatan SKP sebagai indikator kinerja.
- ✓ Penyampaian laporan kinerja dengan baik dan tepat waktu
- ✓ Melakukan monitoring sub kegiatan dan target per triwulan melalui rapat monev bulanan dan laporan triwulanan, namun belum dilengkapi hambatan dan rencana tindak lanjut
- ✓ Memperbaiki mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pegawai untuk diterapkan ke semua pegawai dan tingkat unit kerja, namun terkendala pengumpulan data kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja pimpinan
- ✓ Dilaksanakan rapat setiap bulan, namun masih sebatas menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan monitoring dan evaluasi masih belum maksimal.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada BBPOM di Banjarmasin telah dilaksanakan oleh Inspektorat I Badan POM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor : PI.04.7.72.07.21.189 tanggal 10 Oktober 2021.

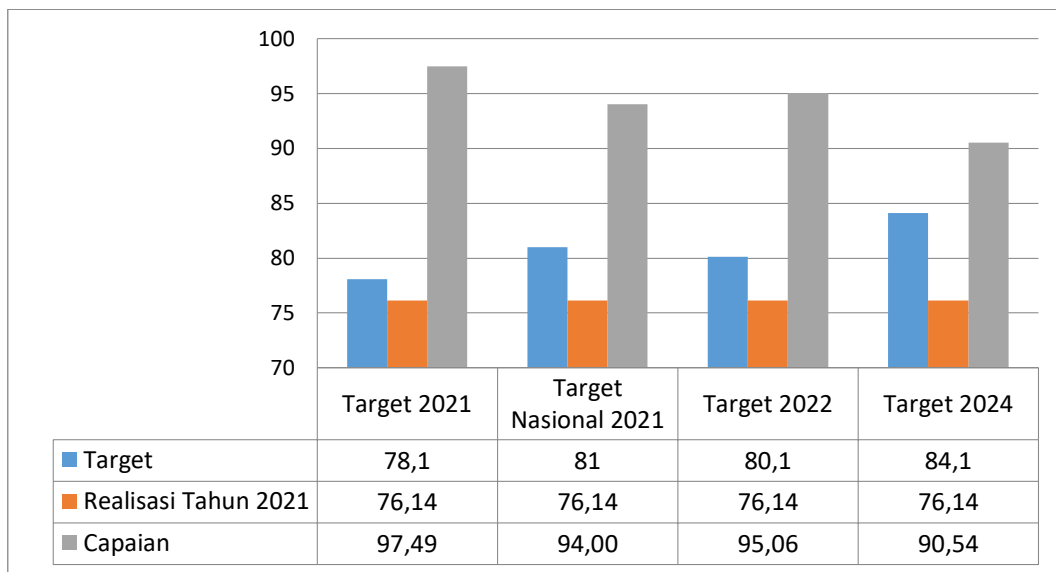
Dengan fokus evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BBPOM di Banjarmasin meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), diperoleh penilaian dengan rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	<b>Komponen yang dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
a	Perencanaan Kinerja	30	25,93
b	Pengukuran Kinerja	25	18,44
c	Pelaporan Kinerja	15	12,09
d	Evaluasi Internal	10	7,20
e	Capaian Kinerja	20	12,49
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>76,14</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

**Tabel 3.2.8.2.4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

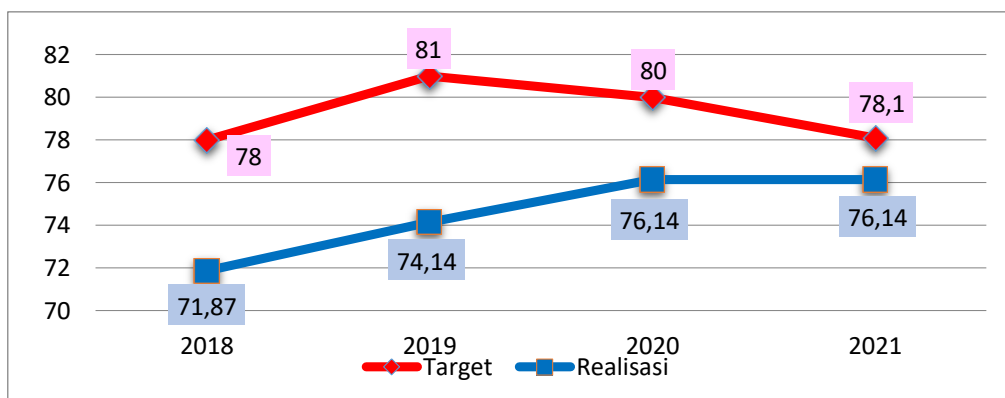
Dari hasil penilaian tersebut diatas dapat terlihat bahwa implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2021 pada BBPOM di Banjarmasin dapat dikategorikan **BB** atau **Sangat Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan.

Untuk Indikator Kinerja ini, BBPOM di Banjarmasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, baik target tahun 2021 yaitu 78,1 maupun terhadap target akhir RPJM tahun 2024 yaitu 84,1. Capaian terhadap target 2020 adalah 90,54%, sedangkan capaian terhadap target tahun 2024 adalah 82,76%.



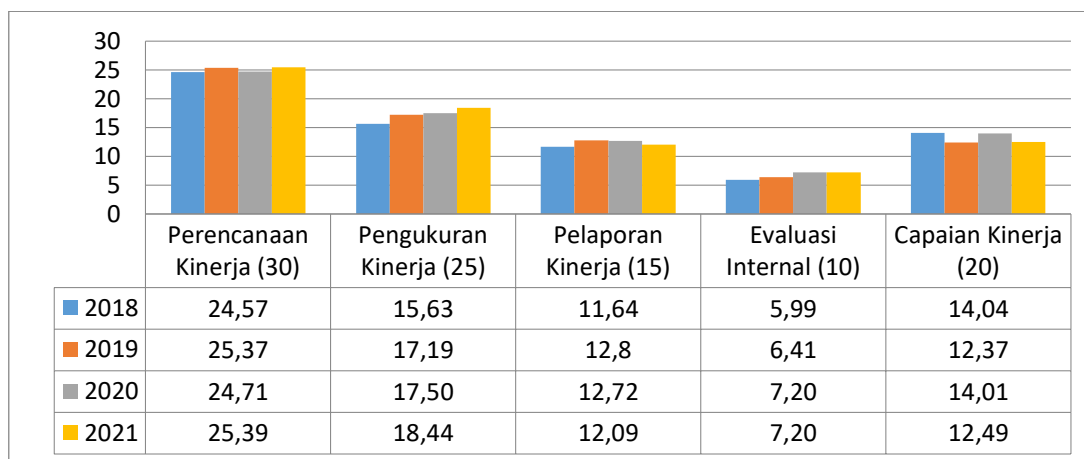
**Grafik 3.2.8.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Apabila dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP 2018 dan 2019 telah mengalami peningkatan namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 nilai yang diperoleh tetap, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.8.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.2 Tahun 2018-2021**

Dari 5 komponen penilaiannya, 2 komponen mengalami peningkatan, 1 komponen tetap dan 2 komponen mengalami penurunan dari tahun 2020, sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini :



**Grafik 3.2.8.2.3. Perbandingan Nilai Komponen Penilaian AKIP Tahun 2018-2021**

Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin yang meningkat adalah pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, yang tetap adalah komponen Evaluasi Internal, sedangkan yang menurun adalah komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

### 1) Perencanaan

- a. Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 sudah disahkan oleh Kepala BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2020 dan telah memuat tujuan, sasaran, IKU yang telah disertai target keberhasilan yang relevan. Renstra juga telah dipublikasikan pada website Badan POM.
- b. BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan target kinerja yang telah dilengkapi dengan kertas kerja yang mencantumkan tren kenaikan dan penurunan target kinerja, namun belum terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan baseline penetapan target kinerja yang berupa notulen/justifikasi peningkatan target setiap tahun;
- c. Terdapat perbedaan target kinerja pada beberapa indikator dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2021.
- d. RAPK telah menyajikan target per triwulan beserta anggaran dan dibreakdown sampai subkegiatan;

## **2) Pengukuran**

- a. BBPOM di Banjarmasin telah memiliki Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan dengan melibatkan seluruh substansi yang diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan, serta telah ditetapkan jadwal rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan.
- b. Telah memiliki SOP Mikro nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01.109/IK.02 tentang Pengumpulan Pengukuran Data Kinerja dan Penyusunan Laporan yang memuat tahapan verifikasi data kinerja oleh Subkoordinator Program dan Evaluasi. Namun SOP belum secara eksplisit menyebutkan langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi kesalahan data.
- c. Pengukuran kinerja belum didukung cascading kinerja yang memadai sampai ke level individu
- d. Telah disusun SK pemberian reward dan punishment tahun 2021 yang diberikan pada level substansi/bagian, berdasarkan capaian perjanjian kinerja dengan sumber data e-performance Badan POM atau nilai rata-rata dari capaian indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Namun demikian, belum terdapat bukti implementasi. Belum terdapat mekanisme reward and punishment yang diberikan pada level unit kerja dan individu.

## **3) Pelaporan**

- a. Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin telah menyajikan informasi capaian kinerja dan evaluasi/analisis capaian kinerja di setiap capaian per indikator, serta pembahasan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dan juga telah dimonitoring dalam bentuk laporan interim per triwulan. Namun untuk beberapa indikator baru dengan sumber data yang sama belum dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya, seperti "Persentase Obat yang memenuhi syarat" dan "Persentase Makanan yang memenuhi syarat".
- b. Belum memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan

memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

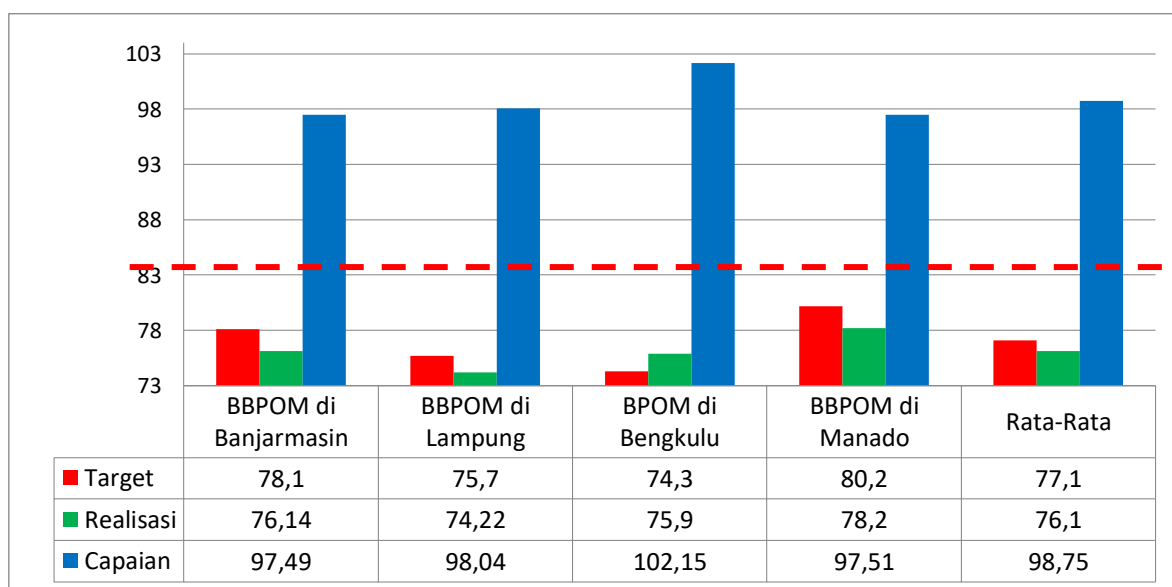
#### 4) Evaluasi Internal

BBPOM di Banjarmasin telah melakukan evaluasi kinerja secara periodik melalui Laporan Interim setiap triwulan tetapi belum dilakukan monitoring terhadap progres rencana aksi yang sudah ditetapkan di triwulan sebelumnya serta tidak terdapat kesimpulan analisis keberhasilan/kegagalan terhadap rencana aksi yang nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

#### 5) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja BBPOM di Banjarmasin secara umum sudah sesuai dengantarget, namun masih terdapat indikator yang capaiannya masuk dalam kategori cukup yaitu Indeks RB dan Nilai AKIP.

Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 dengan nilai AKIP Balai Besar / Balai POM dalam kluster 4 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

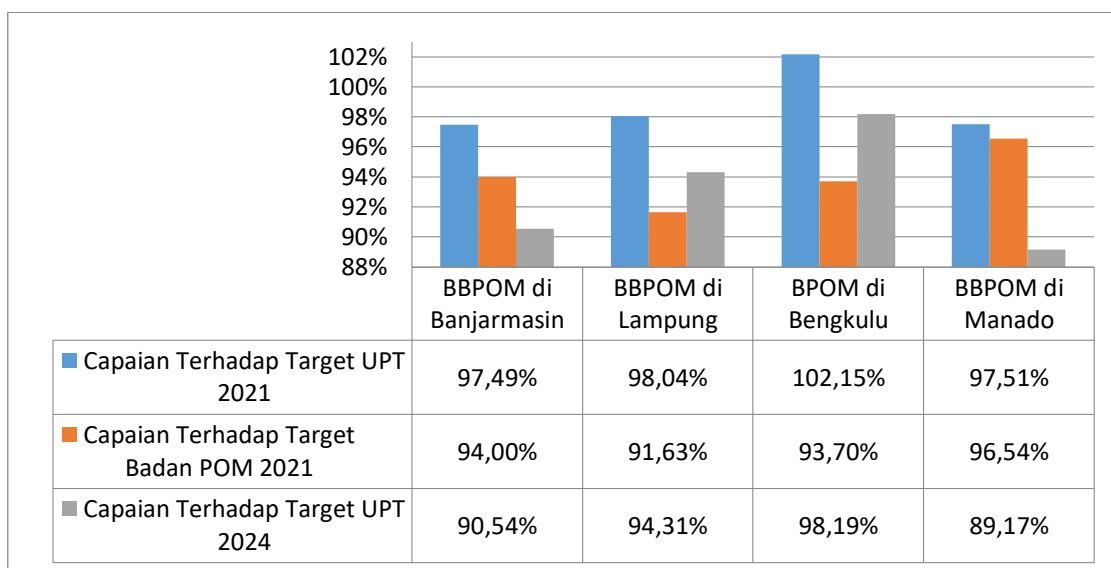


--- Target Nasional 2021 = 83

**Grafik 3.2.8.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.2 Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa nilai AKIP Balai Besar/ Balai POM klaster 4 belum mencapai target masing-masing maupun target Badan POM tahun 2021, dimana nilai AKIP Balai Besar BPOM di Banjarmasin menempati posisi ke dua setelah BBPOM di Manado, diikuti oleh BPOM di Bengkulu , sedangkan yang terendah diperoleh BBPOM di Bandar Lampung.

Capaian terhadap masing-masing target tahun 2021 dipengaruhi oleh penetapan target masing-masing Balai Besar/ Balai POM yang berbeda baik target tahun 2021 maupun target 2024, sedangkan target Badan POM adalah 81, maka diperoleh data sebagai berikut :



**Grafik 3.2.8.2.5. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP BB/BPOM dalam Klaster 4 Tahun 2021 dengan Target UPT dan Target Nasional 2021 dan Target UPT 2024**

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2021 adalah pemantauan, evaluasi dan koordinasi antara lain berupa :

- Peningkatan kompetensi dan diseminasi terkait SAKIP, antara lain Workshop/Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
- Rapat Monitoring Evaluasi Bulanan, yang dilaksanakan di awal bulan berikutnya;

- Konsultasi/ Koordinasi baik dengan unit pusat di Badan POM yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, ULP, maupun instansi terkait lainnya seperti Kanwil DJPB Prov Kalsel.
- Supervisi Pelaksanaan Kegiatan, Monev Anggaran dan Kinerja ke Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
- Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, baik BBPOM di Banjarmasin maupun Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu,

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 128.733.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp. 125.488.928,- atau 97,48%, dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 97,49% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,00 , dan Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
97,49	97,48	1,00	0,00	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.8.2.5. Efisiensi Anggaran IK.8.2 Tahun 2021**

Meskipun Indikator Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin telah dicapai dengan kriteria baik (97,49%) dan penggunaan anggaran yang Efisien, namun dapat disimpulkan bahwa Indikator Nilai AKIP Birokrasi BBPOM di Banjarmasin belum berhasil, dapat dilihat dari realisasi Nilai AKIP yang sama dengan tahun 2020, dengan beberapa nilai komponen mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Masih dibutuhkan kerja keras untuk melakukan perbaikan agar dapat mencapai target tahun berikutnya yang semakin meningkat, dengan target tertinggi di akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2024.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka meningkatkan Nilai AKIP adalah sebagai berikut :

### **1) Perencanaan**

- a. Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.
- b. Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK. Pada saat pelaksanaan assesment, Renstra 2020-2024 yang sudah disahkan belum dipublikasikan pada website BPOM maupun Subsite BBPOM di Banjarmasin.

### **2) Pengukuran**

- a. Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu.
- b. Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja.
- c. Melakukan monitoring dan memanfaatkan/mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester).

### **3) Pelaporan**

- a. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra. *Reward* dan *punishment* belum mencakup untuk semua pegawai,
- b. Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut;

### **4) Evaluasi Internal**

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin belum dilakukan monitoring sampai dengan sub kegiatan serta analisisnya

### **5) Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja BBPOM di Banjarmasin masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan dan informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap rekomendasi tersebut di atas adalah :

- ✓ Telah menyusun Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024
- ✓ Melaksanakan rapat penetapan target kinerja bersama pimpinan organisasi.
- ✓ Melaksanakan pemetaan dan dokumentasikan *cascading* target kinerja sampai ke tingkat individu namun terkendala belum ditentukannya Indikator Kinerja Individu dan perubahan struktur organisasi.
- ✓ Memperbaiki SOP mekanisme pengumpulan data kinerja.
- ✓ Mengimplementasikan pemberian *reward dan punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja
- ✓ Melengkapi laporan kinerja dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Meningkatkan kompetensi petugas monitoring evaluasi dan pelaporan.
- ✓ Melanjutkan pelaksanaan rapat monev setiap bulan, dan akan dilengkapi dengan pelaporan sesuai ketentuan.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar substansi agar pelaksanaan monev dapat dilaksanakan dengan baik.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja.
- ✓ Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, kendala : keterbatasan sumberdaya dan duplikasi dengan aplikasi pusat.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 belum berhasil mencapai target, hanya memperoleh capaian 97,49%, namun pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

**Sasaran Kegiatan 9 :**

**Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal.**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**Indikator Kinerja 9.1 :**

**Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin.**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
81	83,09	102,58 %	Baik

**Tabel 3.2.9.1.1. Realisasi Kinerja IK.9.1 Tahun 2021**

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Adapun dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin ini berdasarkan 4 (empat) Dimensi yaitu :

- 1) Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formans PNS dari jenjang paling tinggi hingga paling rendah, dengan bobot nilai sebesar 25%. Semakin tinggi Pendidikan, maka semakin besar nilainya.
- 2) Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi yang

dimaksud meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai. Penilaian kompetensi ini mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.

- 3) Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Penilaian kinerja ini mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
- 4) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, dengan bobot nilai sebesar 5%.

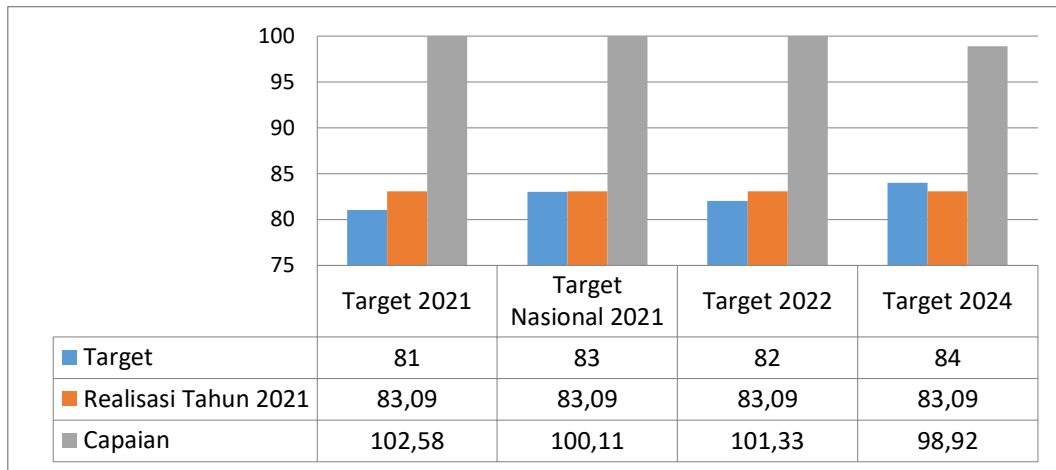
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	75	77	80	82	85
<b>Menjadi</b>	80,16 (Realisasi)	81	82	83	84

**Tabel 3.2.9.1.2. Perubahan Target IK 9.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Untuk Indikator Kinerja ini, BBPOM di Banjarmasin telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, baik target tahun 2021 yaitu 81, target tahun 2022 yaitu 82, dan target 2023 yang sama dengan target Nasional 2021 yaitu 83.



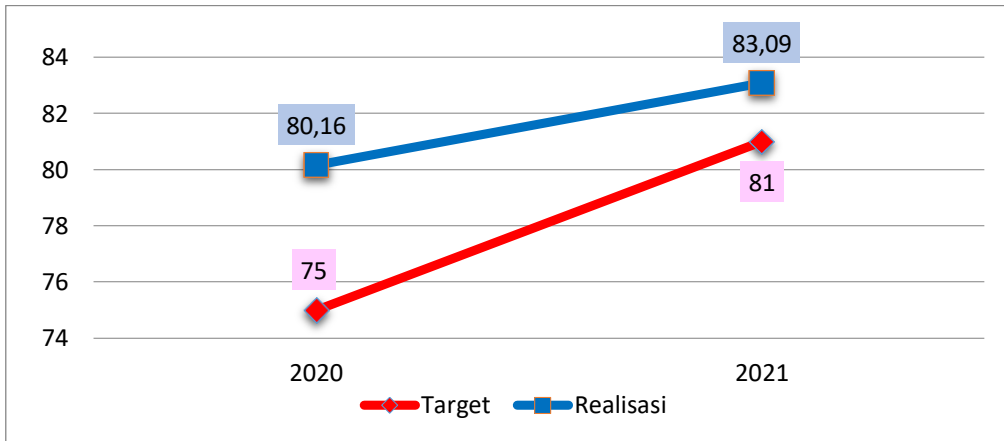
**Grafik 3.2.9.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.9.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Penetapan target balai lebih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional, karena mengacu pada realisasi di tahun sebelumnya di mana realisasi tahun 2020 adalah 81.06%. Realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target nasional, maka capaiannya sebesar 107,9 %

Pada tahun 2021 ini persentase indeks profesionalitas ASN merupakan indikator kinerja tahun kedua sehingga hanya bisa disandingkan dengan data 1 tahun terakhir. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 salah satunya karena pemenuhan pengembangan kompetensi dan tidak ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin.

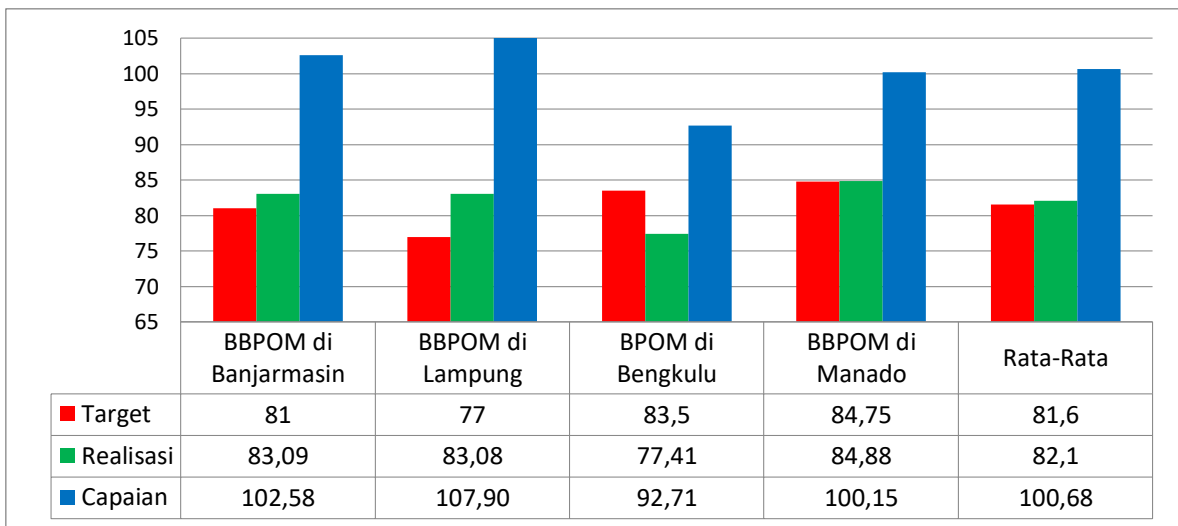
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu pada tahun 2024, target 84% masih belum tercapai sehingga diharapkan pada tahun 2024 dapat tercapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 salah satunya dengan adanya peningkatan kualifikasi Pendidikan di mana saat ini ada 8 (delapan) pegawai sedang melaksanakan tugas belajar.

Apabila dibandingkan dengan perolehan 2020 telah mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.9.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.9.1 Tahun 2020-2021**

Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan kinerja unit kerja lain yang seklaster dapat dilihat dari grafik berikut :



**Grafik 3.2.9.1. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.9.1  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Setiap Balai Besar/Balai mempunyai pegawai yang berbeda-beda baik dari sisi latar belakang Pendidikan, kesempatan dalam pengembangan kompetensi, kinerja

maupun penegakan disiplin. Jika dilihat pada grafik diatas BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado , BPOM di Bengkulu dan BBPOM di Banjarmasin mempunyai target yang berbeda akan tetapi % capaiannya mendapatkan kriteria yang sama yaitu baik.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja, khususnya Pengelolaan Kepegawaian. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai berupa seminar, diklat fungsional bagi fungsional yang baru diangkat, penegakan disiplin pegawai dengan membuat inovasi Si Amat dan Naga Rapid yaitu inovasi dari pokja SDM terkait disiplin pegawai, dengan pagu anggaran sebesar Rp 627.683.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp. 625.674.414,- atau 99,68%.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 102,58% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,03 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,03, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,58%	99,68%	1,03	0,03	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.9.1.3. Efisiensi Anggaran IK.9.1 Tahun 2021**

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 102,58% dari target yang ditetapkan, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### **Sasaran Kegiatan 10 :**

## **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

### **Indikator Kinerja 10.1 :**

#### **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
73	73,4	100,55	<b>Baik</b>

**Tabel 3.2.10.1.1. Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2021**

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium BPOM yang berlaku untuk tahun 2020-2024, yang merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di BPOM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM. Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL),
2. Standar Kompetensi dan
3. Standar Peralatan.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium BPOM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/ Lembar Catatan Pengujian (CP/ LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2) Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%).
- b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3) Penilaian Standar Peralatan

- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase

seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator. Pada tahun 2021 penilaian terhadap pemenuhan standar SKL dilaksanakan oleh PPPOMN secara daring.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang diantaranya dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

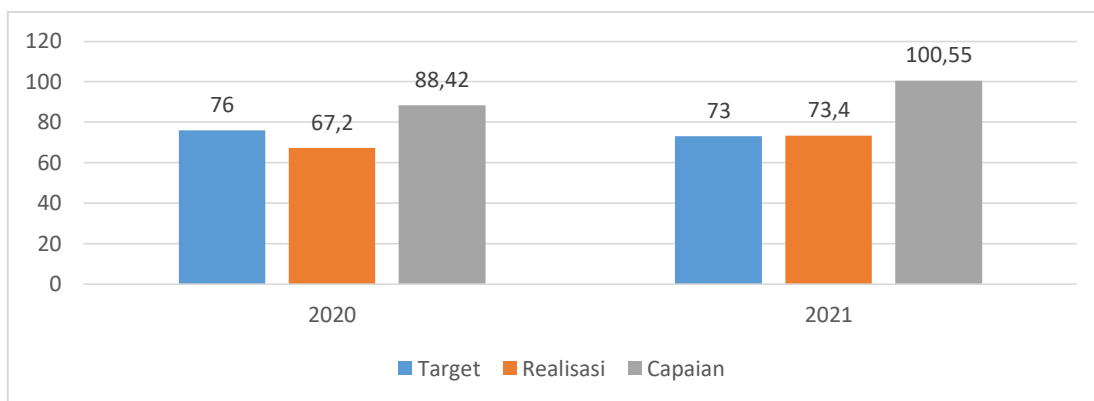
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	76	77	78	79	80
<b>Menjadi</b>	67,2 (Realisasi)	73	78	83	88

**Tabel 3.2.10.1.2. Perubahan Target IK 10.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Target indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*) yang untuk tahun 2021 adalah 73, lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 76. Perubahan target menjadi lebih rendah karena untuk pemenuhan peralatan (capaian

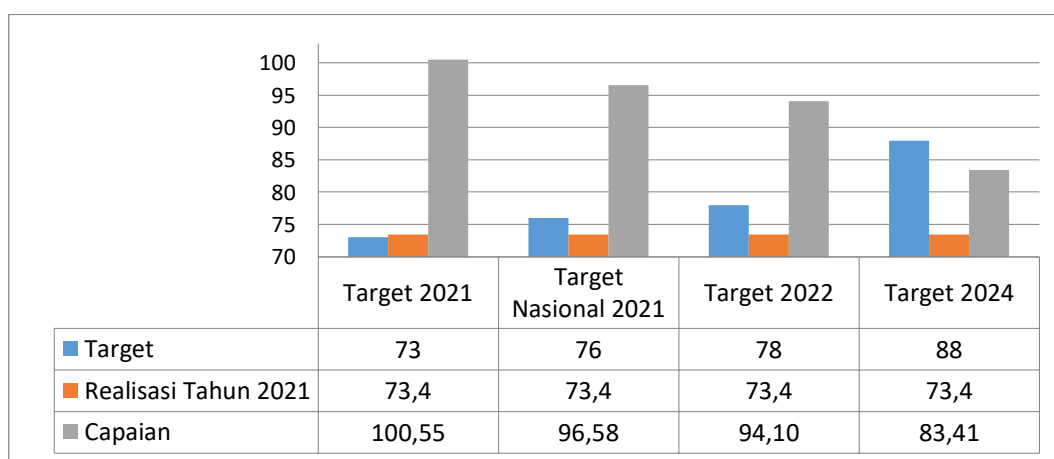
2021 masih 68,2 %) bergantung pada pemenuhan sarana dan prasarana Lab yang masih terus diadakan secara bertahap sampai 2022 yaitu gedung laboratorium yang baru di Banjarbaru.

Apabila dibandingkan dengan perolehan 2020 telah mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



**Grafik 3.2.10.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2020-2021**

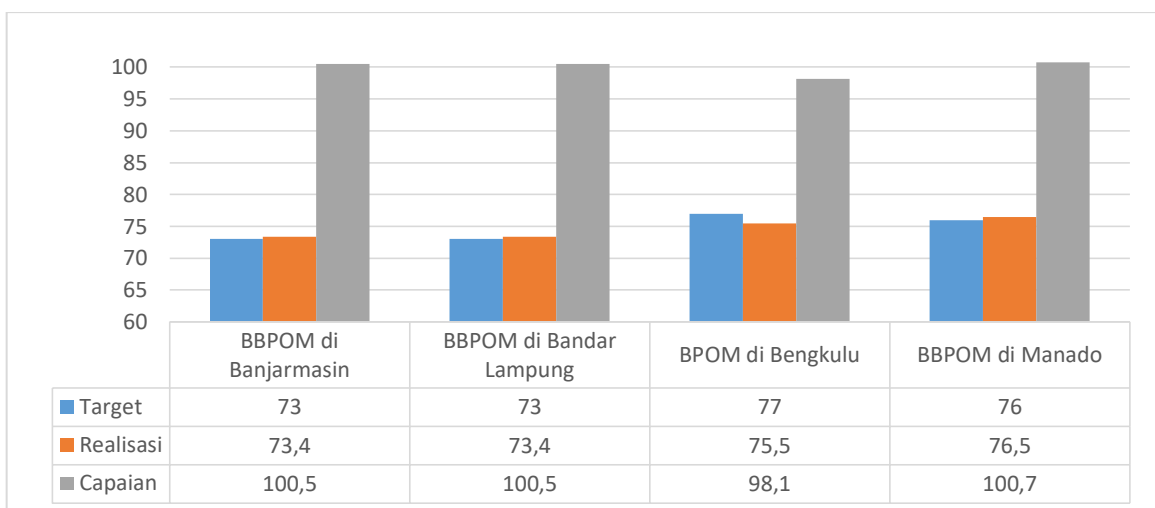
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja tahun 2021 dibanding tahun 2020.



**Grafik 3.2.10.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 88% (Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024). Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 83,41% dengan kriteria "cukup", sehingga masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja dalam kriteria "baik" atau bahkan "sangat baik".

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut:



**Grafik 3.2.10.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 100,55 %. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Menambah kemampuan ruang lingkup dengan mengikuti uji kolaborasi dan melakukan verifikasi MA yang belum terlaksana tahun sebelumnya
2. Menambah kompetensi penguji dengan memanfaatkan pelatihan secara daring selama masa pandemi Covid 19

3. Menambah peralatan Lab PCR dan alat pendukungnya dengan adanya tambahan anggaran khusus penanganan Covid 19

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target SKL adalah sebagai berikut :

1. Beberapa pemenuhan ruang lingkup Balai POM belum dapat dipenuhi karena tidak tersedianya sampel yang beredar di wilayah kerja serta tidak tersedianya beberapa baku pembanding.
2. Standar peralatan di Balai POM belum terpenuhi dikarenakan sedang mempersiapkan sarana dan prasarana Lab baru yang dilaksanakan bertahap serta refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19.

Alternatif solusi:

1. Dengan adanya regionalisasi Lab, beberapa SRL akan mengikuti mekanisme pembagian di regional masing-masing, sehingga pemenuhan SRL menjadi berkurang.
2. Mengadakan pelatihan internal untuk menambah kompetensi penguji
3. Mengajukan kembali pengadaan peralatan yang tertunda karena belum siapnya sarana dan prasana Lab.

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, BBPOM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 22.878.339.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.267.920.500 atau 88,59%. Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,13 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,13 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100,55%	88,59%	1,13	0,13	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.10.1.3. Efisiensi Anggaran IK.10.1 Tahun 2021**

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan capaian 100,55%, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### Indikator Kinerja 10.2 :

#### Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2	2,025	101,25 %	Baik

**Tabel 3.2.10.1.1. Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2021**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
    - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)

➤ Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

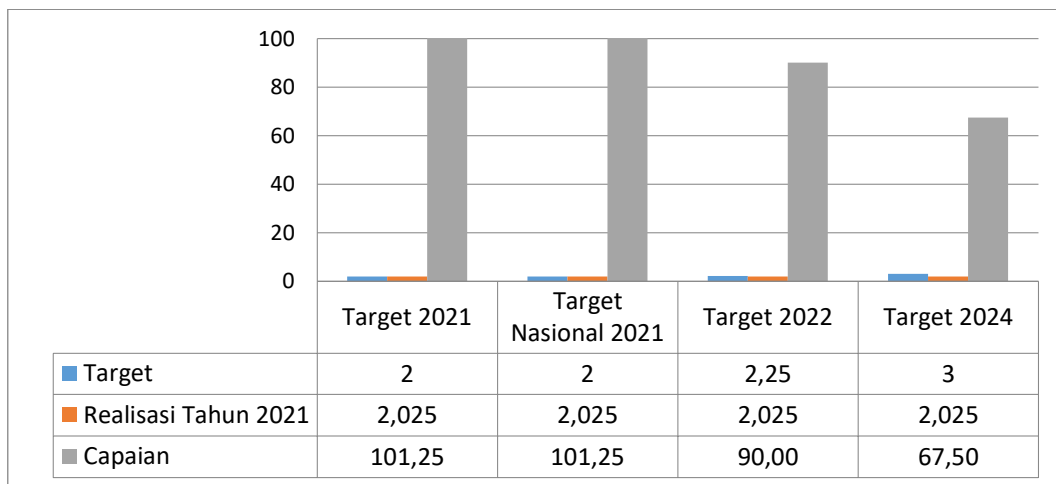
b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3	: Optimal	0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup	0 – 0,75	: Sangat Kurang

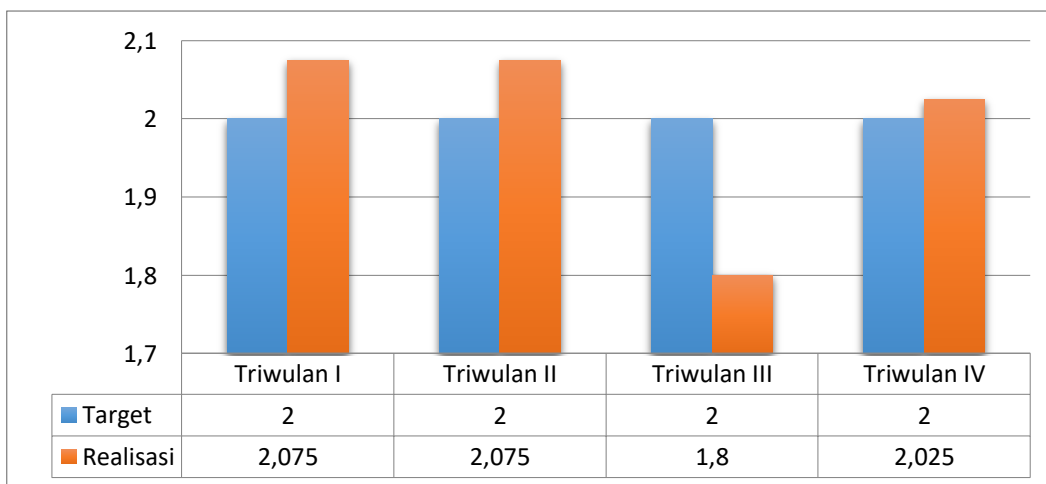
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, namun untuk indikator ini tidak ada perubahan.

Pada akhir tahun 2021, informasi BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks pengelolaan data dan yang optimal sebesar 2,02 dari target 2 yang juga merupakan target nasional, dengan capaian sebesar 101,25%, sedangkan terhadap target akhir RPJM tahun 2024 sebesar 3 , capaiannya adalah 60,67%.



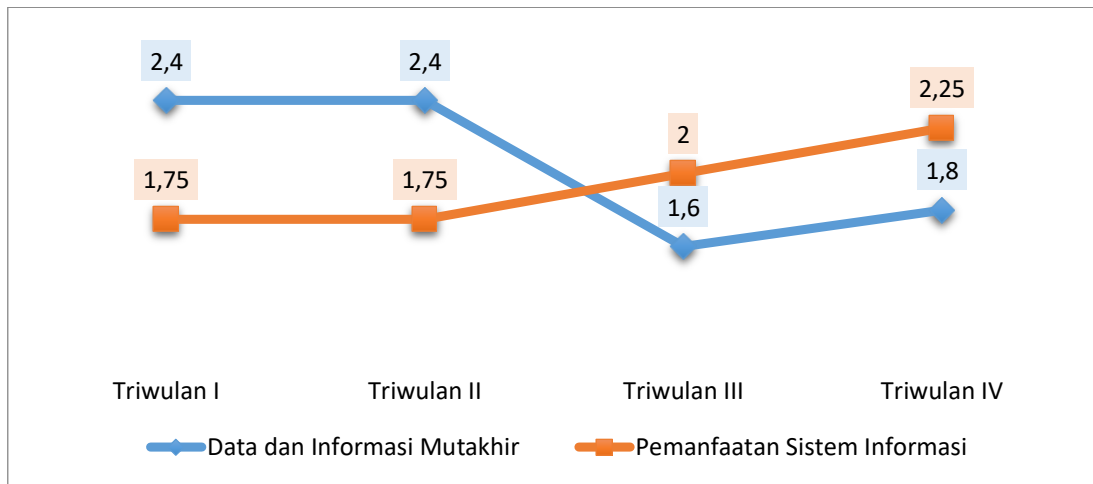
**Grafik 3.2.10.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Perolehan Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal tahun 2020 per triwulan adalah sebagai berikut :



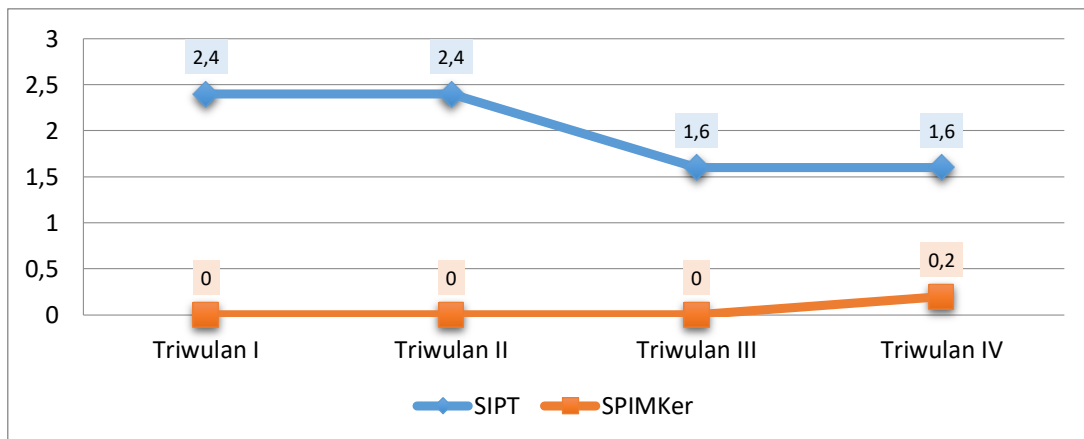
**Grafik 3.2.10.2.2. Realisasi Kinerja IK.10.2 Pertriwulan Tahun 2021**

Nilai indeks tersebut di atas, diperoleh dari komponen-komponen pengelolaan data dan informasi, dengan perhitungan rata-rata dari Nilai Data dan Informasi Mutakhir ditambah Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi, gambaran sebagai berikut :



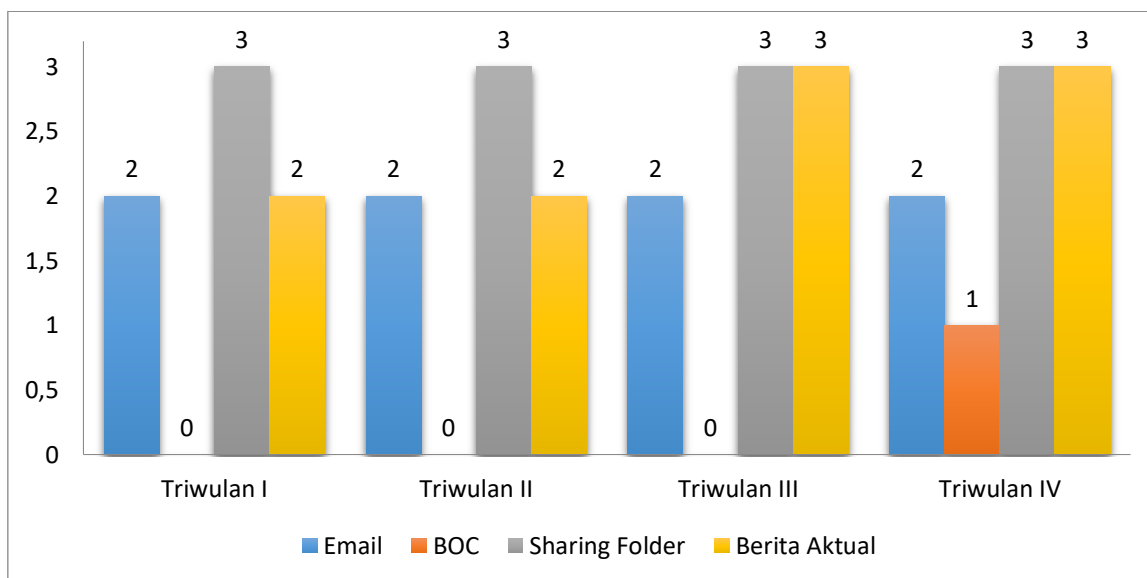
**Grafik 3.2.10.2.3. Nilai Komponen Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2021**

Komponen Data dan Informasi Mutakhir, merupakan jumlah nilai SIPT dan SPIMKer, dengan nilai pertriwulannya sebagai berikut :



**Grafik 3.2.10.2.4. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC Tahun 2021**

Sedangkan komponen Pemanfaatan Sistem Informasi, merupakan rata-rata dari nilai pemanfaatan Email Corporate, Sharing Folder, Dashboard BCC dan Berita Aktual, dengan nilai pertriwulannya sebagai berikut :



**Grafik 3.2.10.2.5. Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi Tahun 2021**

Dari data kedua komponen di atas dapat terlihat bahwa untuk komponen Data dan Informasi Mutakhir selama tahun 2021, untuk SIPT pada triwulan I hanya dilakukan penilaian terhadap data hasil pemeriksaan sarana, pada triwulan II penilaian terhadap data hasil pemeriksaan sarana dan sampling, selanjutnya pada triwulan III dan IV, dilakukan penilaian kepada ketiga subkomponennya yaitu data hasil pemeriksaan sarana, sampling dan hasil pengujian. Untuk aplikasi SPIMKer tidak ada pemutakhiran data karena adanya kendala koordinasi dengan petugas Rumah Sakit yang biasanya melakukan pelaporan. Kendala ini terkait dengan merebaknya Pandemi Covid-19, yang membatasi aktifitas dan pengurangan anggaran yang terkait koordinasi SPIMKer pada saat APBNP tahun 2021.

Untuk komponen Pemanfaatan Sistem Informasi, yang paling baik pemanfaatannya adalah Sharing Folder, dengan memperoleh nilai maksimal 3 setiap triwulannya. Diikuti Berita Aktual yang pada triwulan I dan II memperoleh nilai 2, dan mampu ditingkatkan pada triwulan III dan IV menjadi 3.

Selanjutnya email corporate juga dimanfaatkan dengan cukup baik dimana pada tahun 2021 memperoleh nilai indeks 2 setiap triwulannya dengan nilai subkomponennya semakin meningkat hingga akhir tahun. Peningkatan ini disebabkan

oleh gencarnya sosialisasi pemanfaatan Email Corporate. Pemanfaatan email corporate ini belum maksimal karena adanya kendala yang terjadi yaitu lambatnya tindak lanjut atas laporan akun Email Corporate yang terblokir karena lupa password, serta adanya akun yang tidak dapat digunakan pemiliknya karena akun tersebut menggunakan nama yang sama dengan pegawai UPT lain, namun tetap terhitung sebagai akun tidak aktif sampai akhir tahun.

Sedangkan Dashboard BOC, belum dimanfaatkan dengan baik dan hanya mampu memperoleh nilai indeks 1 pada triwulan IV.

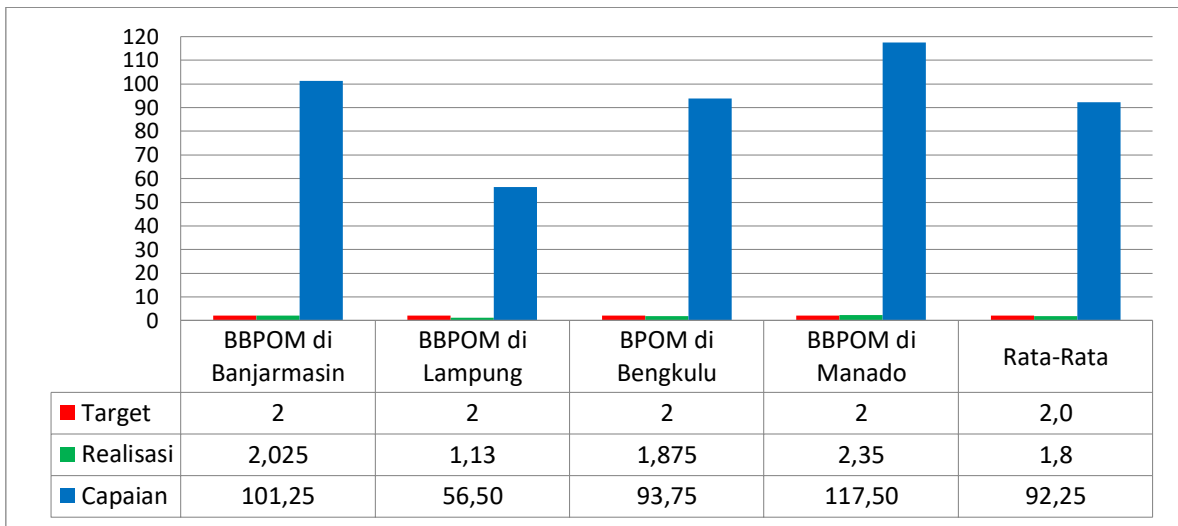
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.247.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.197.075,- atau 99,99%. Pagu anggaran tersebut merupakan total dari Pagu anggaran pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 101,5% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,02 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,02, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,58%	99,68%	1,03	0,03	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

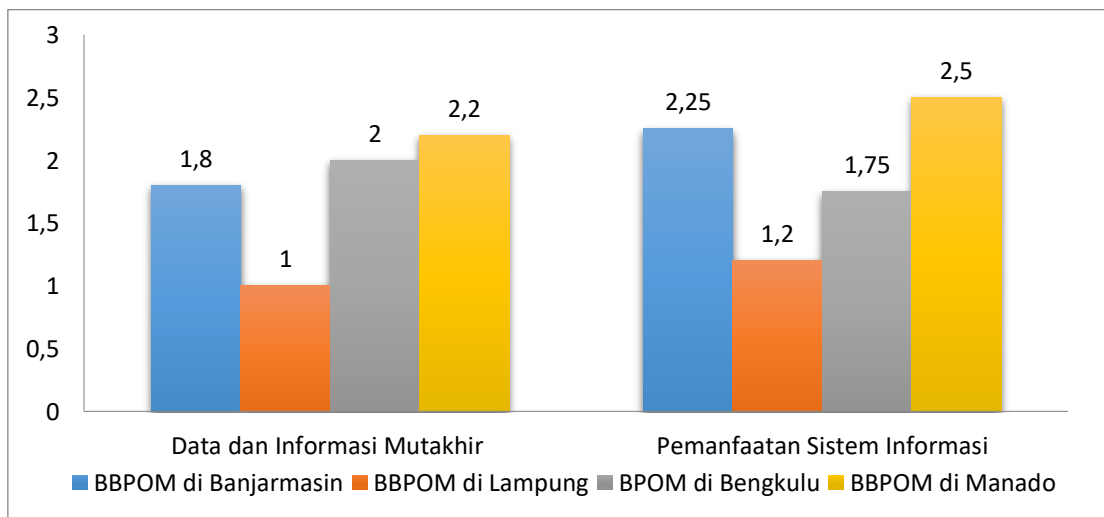
**Tabel 3.2.10.2.2. Efisiensi Anggaran IK.10.2 Tahun 2021**

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke tiga dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, adalah sebagai berikut :



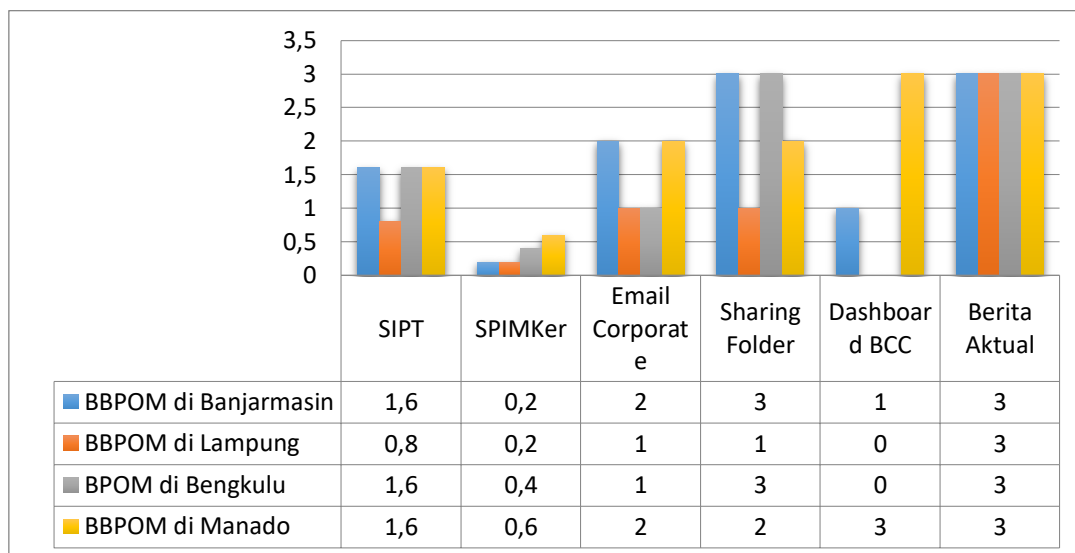
**Grafik 3.2.10.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.2  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Berdasarkan Nilai komponennya maka posisi BBPOM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.10.2.7. Perbandingan Nilai Komponen IK.10.2  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dan apabila dilihat dari Nilai subkomponen masing-masing maka posisi BBPOM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.10.2.7. Perbandingan Nilai Sub Komponen IK.10.2 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dari keempat Balai Besar/Balai POM seklaster, semua sudah memanfaatkan Berita Aktual dengan baik sehingga memperoleh nilai 3. Kemudian untuk update SIPT dan SPIMKer juga sudah dilaksanakan, namun belum optimal bahkan khusus untuk SPIMKer masih sangat rendah.

Pemanfaatan email corporate yang paling baik adalah BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Manado. Sedangkan pemanfaatan Dashboard BCC yang paling baik adalah BBPOM di Manado.

Untuk lebih mengoptimalkan nilai kinerja ini, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin adalah :

- Melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline
- Melakukan koordinasi kepada Petugas RS agar dapat melaksanakan pelaporan SPIMKer.

- Terus melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk dapat memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.
- Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin

Sekaitan dengan pemanfaatan SPIMKer yang diluar kendali, karena sangat tergantung dari kasus keracunan dan keaktifan operator SPIMKer yang merupakan petugas Rumah Sakit, diusulkan untuk mengeluarkannya atau mengganti subkomponen penilaian ini dengan pemanfaatan aplikasi lain yang kendalinya berada di UPT.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal tahun 2021 dapat dinyatakan telah berhasil dengan capaian 101,25%, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

**Sasaran Kegiatan 11 :**

**Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal.**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kerjanya sebagai berikut :

**Indikator Kinerja 11.1 :**

**Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin**

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
92,5	89,87	97,16 %	Baik

**Tabel 3.2.11.1.1. Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2021**

Pada Renstra BPOM tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran menjadi salah satu indikator untuk penilaian kinerja Badan POM dan UPT di lingkungannya. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), dengan komposisi 60% Nilai IKPA ditambah 40% Nilai EKA.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

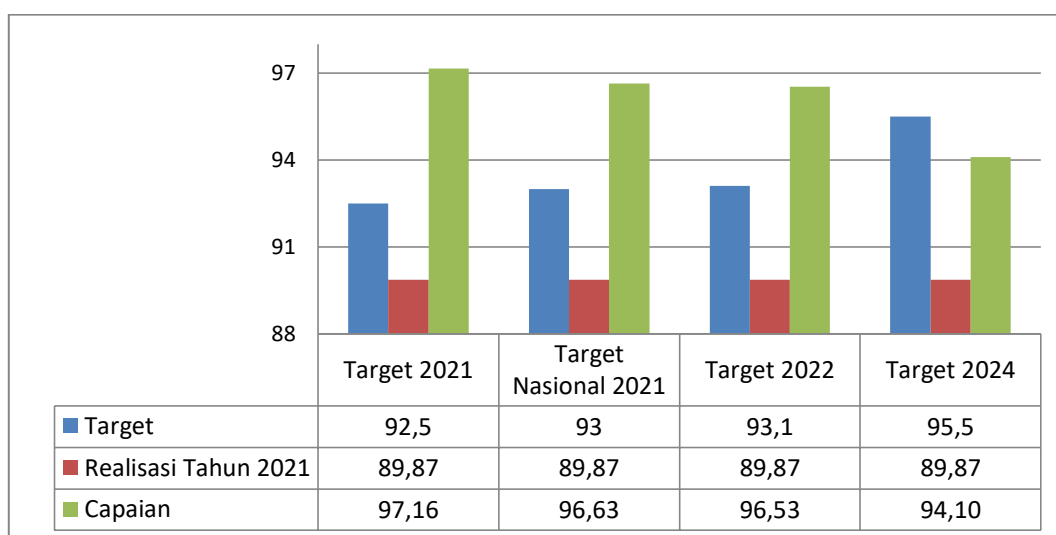
Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target	Tahun
--------	-------

Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	93	94	95	96	97
<b>Menjadi</b>	90,96 (Realisasi)	92.5	93.1	94.3	95.5

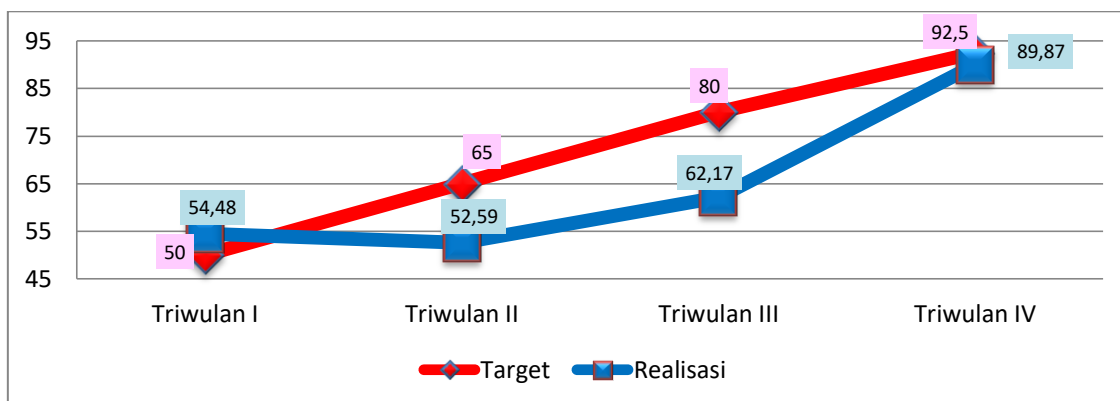
**Tabel 3.2.11.1.2. Perubahan Target IK 11.1.  
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024**

Pada akhir tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 91,29 dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 88,92, sehingga Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 adalah 89,87 dari target 92,5 yang juga merupakan target nasional, dengan capaian sebesar 97,16%.



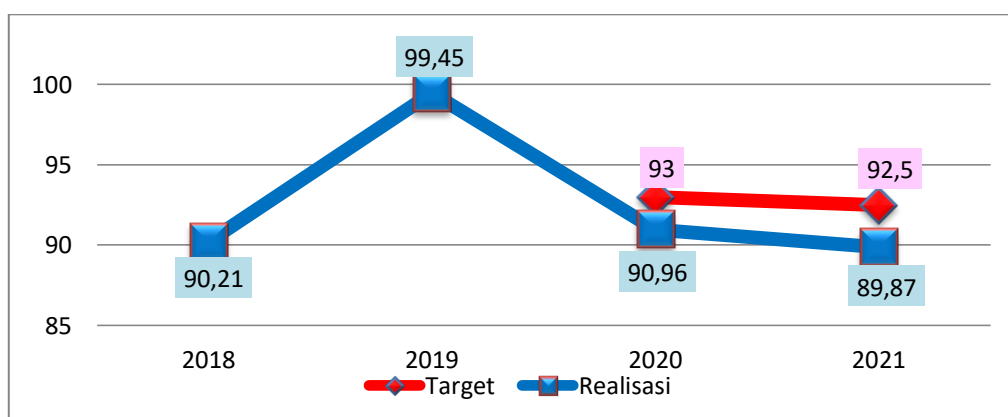
**Grafik 3.2.11.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2021  
dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Perolehan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 per triwulan adalah sebagai berikut :



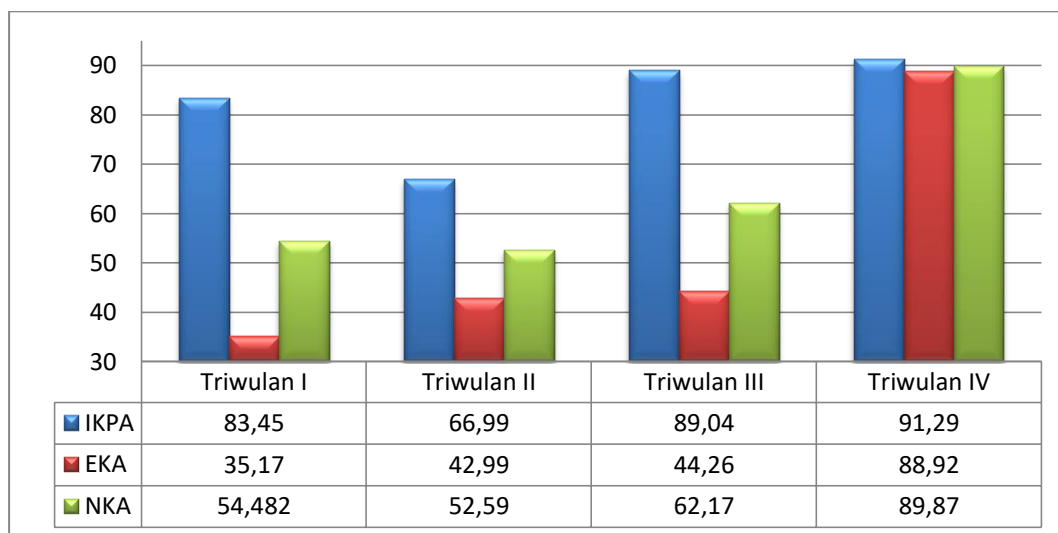
**Grafik 3.2.11.1.2. Realisasi Kinerja IK 11.1 Pertriwulan Tahun 2021**

Meskipun Nilai Kinerja Anggaran menjadi indikator penilaian kinerja baru mulai digunakan sebagai penilaian kinerja pada Renstra 2020-2014, namun Nilai Kinerja Anggaran sudah diperhitungkan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran UPT Badan POM oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM sejak periode sebelumnya, dimana berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2018-2021.



**Grafik 3.2. 11.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2020-2021**

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa NKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, harus ditelaah dari ke dua sumber penilaian, yaitu Nilai IKPA dan Nilai EKA, dimana untuk tahun 2021 perolehan nilai tiap triwulannya adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2. 11.1.4. Realisasi Kinerja IK. 11.1 Pertriwulan Tahun 2021**

#### **A. Nilai IKPA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan hasil pengukuran yang disebut Nilai IKPA.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020.

Pada PER-4/PB/2021, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

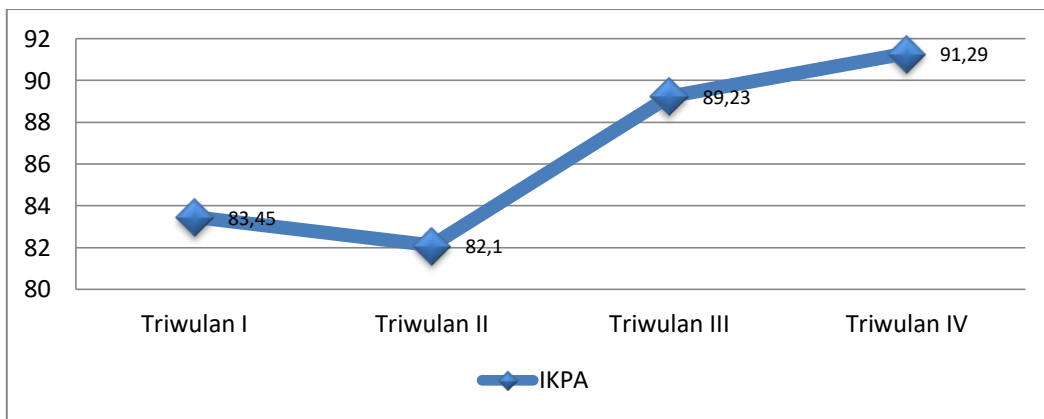
Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
<b>1</b>	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
<b>2</b>	Data Kontrak	15%	15%	10%
<b>3</b>	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
<b>4</b>	Konfirmasi Capaian Output	-	10%	17%
<b>5</b>	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
<b>6</b>	Revisi DIPA	5%	5%	5%
<b>7</b>	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
<b>8</b>	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
<b>9</b>	Renkas	5%	5%	5%
<b>10</b>	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
<b>11</b>	Retur SP2D	6%	5%	5%
<b>12</b>	PaguMinus	4%	5%	5%
<b>13</b>	Dispensasi	4%	5%	5%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.2.11.1.3. Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2019-2021**

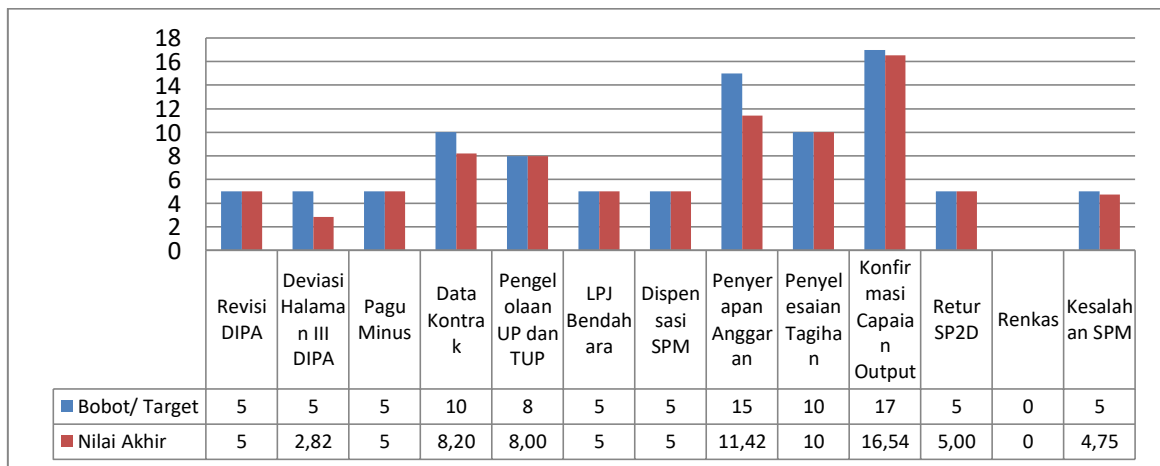
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output dimulai pada periode triwulan II tahun 2021.

Kedua kebijakan tersebut diatas cukup berpengaruh terhadap perolehan Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut :



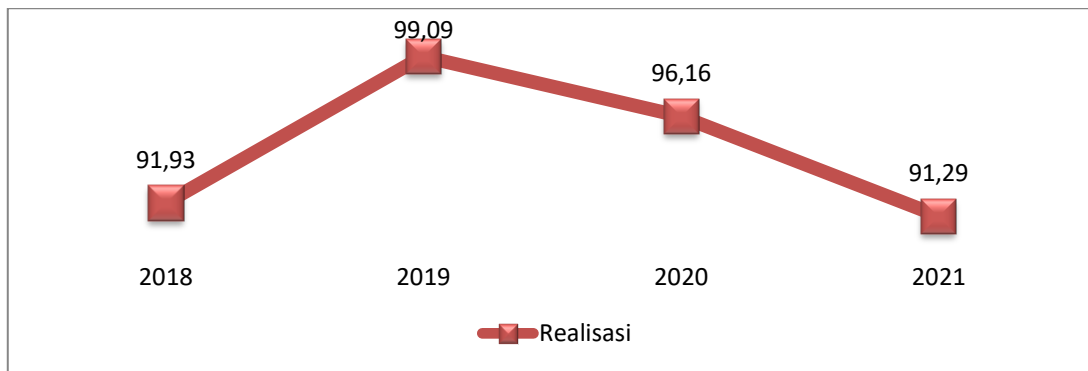
**Grafik 3.2. 11.1.4. Nilai IKPA Pertriwulan Tahun 2021**

Berdasarkan komponennya Nilai IKPA Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :



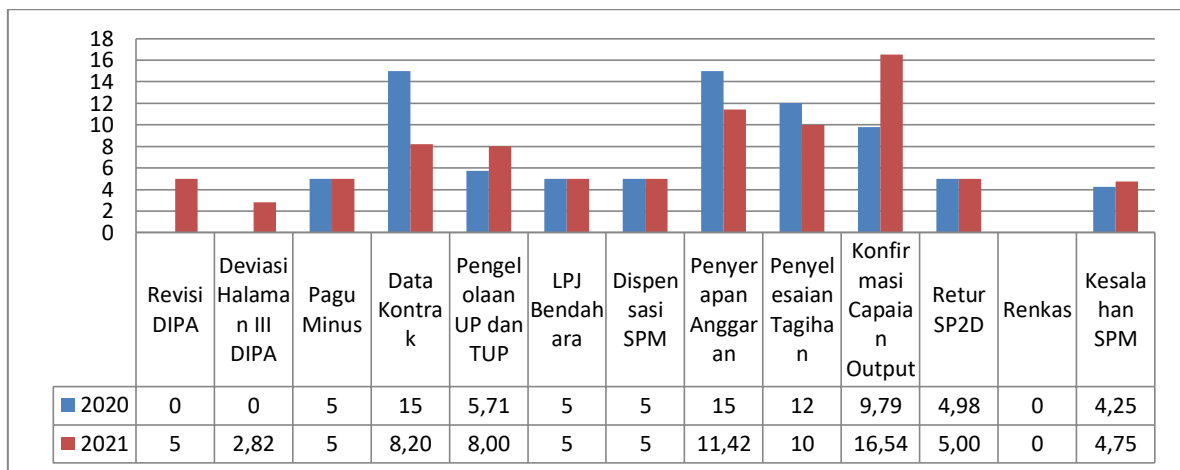
**Grafik 3.2.11.1.5. Nilai IKPA berdasarkan Komponen Tahun 2021 Tahun 2021**

Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018-2020, sebagaimana grafik berikut :



**Grafik 3.2.11.1.6. Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2018-2021**

Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa komponen, sebagaimana grafik berikut :



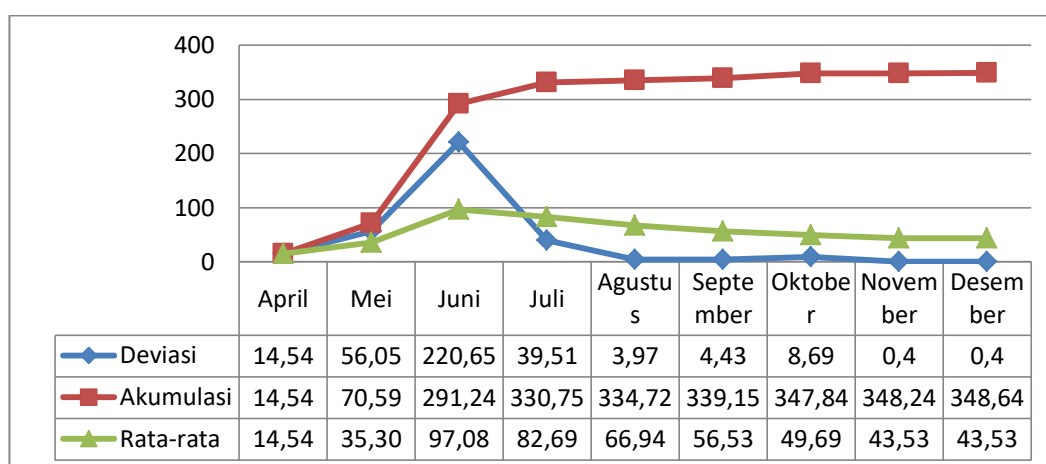
**Grafik 3.2.11.1.7. Nilai IKPA Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2021**

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, indikator yang belum maksimal capaian nilainya adalah Deviasi Halaman III DIPA, Data Kontrakt, Penyerapan Anggaran, Capaian Output, dan Kesalahan SPM, dengan faktor penyebab sebagai berikut :

## 1. Deviasi Halaman III DIPA

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Halaman III DIPA mulai diperhitungkan pada periode triwulan II tahun 2021.

Adanya keterlambatan realisasi belanja modal di triwulan II dan awal triwulan III sangat mempengaruhi nilai indikator ini, dimana pada kurun waktu tersebut akumulasi deviasi yang terjadi sebesar 330,75% dengan rata-rata 82,69%, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



**Grafik 3.2.11.1.8. Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2021**

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa Deviasi terbesar terjadi pada bulan Juni yaitu 220,65% , hal ini disebabkan adanya pergeseran pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi sebesar lebih kurang 2,6 milyar, yang awalnya direncanakan dibayar pada bulan Mei, namun baru terlaksana di bulan Juni. Kemudian pergeseran juga terjadi pada bulan Juli, namun deviasi yang dihasilkan lebih kecil dari bulan Juni.

## 2. Data Kontrak

Pada tahun 2021 terdapat 33 Data Kontrak, dan yang mengalami keterlambatan sebanyak 6 Data Kontrak, dengan perincian :

- Januari 4 (empat) Data Kontrak, masing-masing terlambat 16 hari kerja, berupa kontrak sewa kantor dan mobil operasional perkantoran untuk Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.
- Februari 1 (satu) Data Kontrak, terlambat 29 hari kerja, berupa kontrak pengadaan Reagensia Prekursor,
- Mei 1 (satu) Data Kontrak, terlambat 2 hari kerja, berupa kontrak Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik tahap III.

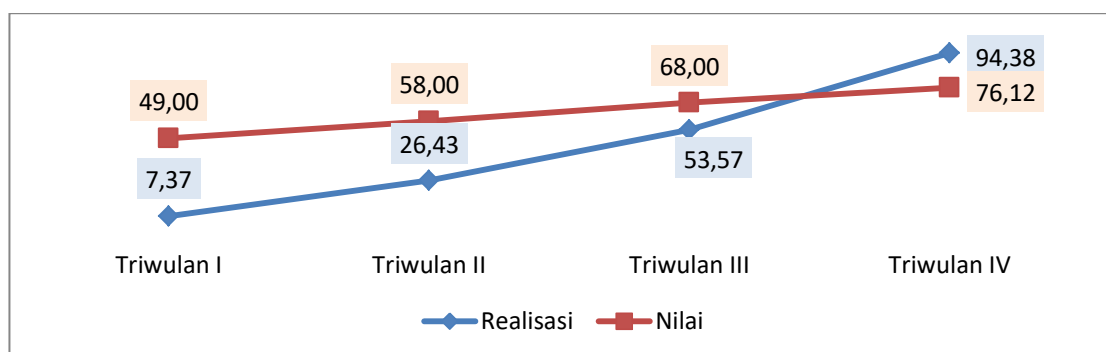
### 3. Penyerapan Anggaran (Realisasi)

Target minimal penyerapan anggaran tiap adalah :

- triwulan I = 15% ;
- triwulan II = 40% ;
- triwulan III = 70% ; dan
- triwulan IV = 90% ,

dimana untuk penilaiannya dihitung rata-rata dari persentase capaian triwulan yang dinilai dengan persentase capaian triwulan sebelumnya.

Dengan komposisi pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, yang didominasi belanja modal sebesar 45%, sangat sulit untuk dapat mencapai target realisasi tersebut, sehingga pada akhir tahun anggaran, meskipun pada akhir tahun 2021 penyerapan anggaran telah melebihi 90% yaitu 94,38%, namun hanya memperoleh nilai 76,12.



**Grafik 3.2.11.1.9. Realisasi Anggaran Pertriwulan Tahun 2021**

#### **4. Capaian Output**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terjadi perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output, yang dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

Capaian output yang terkonfirmasi pada akhir tahun 2021 sebanyak 37 RO, dengan 36 RO mencapai 100% dan 1 RO hanya mencapai 93,36% , yaitu 3165.CAB.003. Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, yang terdiri dari pembagunan gedung laboratorium dan pelayanan publik tahap III realisasi 80,074% ; pengadaan jaringan listrik realisasi 100% ; dan sertifikasi tanah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan realisasi 100%.

#### **5. Kesalahan SPM**

Pada tahun 2021 telah dibuat 1.056 SPM, yang 8 diantaranya terjadi kesalahan dan harus diperbaiki. Kesalahan SPM yang terjadi pada bulan Januari (2), April (3), Juni (1), Oktober (1) dan Desember (1), sehingga nilai yang diperoleh 95% dari bobot indikatornya sebesar 5 yaitu 4,75.

Selain ke 5 indikator tersebut di atas ada 1 indikator yang pelaksanaannya belum sempurna, yaitu Retur SP2D. Selama tahun 2021 telah diterima 1.048 SP2D, pada bulan Agustus terdapat 1 retur SP2D akibat adanya kesalahan rekening penyedia, sehingga nilai yang diperoleh 99,9% , namun ketika diperhitungkan dengan bobot indikatornya sebesar 5 masih menghasilkan nilai akhir 5.

## **B. Nilai EKA**

EKA merupakan instrumen money kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama yaitu 0%-100%, dari keempat variabel pengukuran tersebut hanya variabel efisiensi yang tidak memiliki skala 05\_100%.

Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 adalah sebesar 88,92, dengan rincian nilai 4 indikator sebagai berikut :

### **1. Penyerapan 94,38%**

- Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin pada awal tahun 2021 sebesar Rp.55.781.064.000,- dan mengalami pemotongan anggaran melalui 3 kali Revisi APBNP sebesar Rp.8.424.122.000,- atau 15,10% sehingga pagu akhirnya adalah Rp.47.356.942.000,-
- Berdasarkan data realisasi anggaran per jenis belanja, serapan anggaran paling tinggi adalah belanja pegawai (51) dengan rata-rata 99,86%, dimana dari total anggaran Rp.11.896.159.000,- hanya tersisa Rp.17.241.327,- atau 0,14%. Kemudian diikuti oleh belanja barang (52) yang penyerapannya 99,76%.
- Sedangkan belanja modal (53) penyerapannya hanya 87,77% yaitu Rp.18.274.899.395,- dari pagu Rp.21.335.122.000,-. Anggaran belanja modal yang tidak terserap Rp.2.610.222.605,- (12,23%) merupakan sisa pembayaran termin terakhir untuk Pembangunan Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan Publik Tahap III yang gagal diselesaikan pekerjaannya oleh penyedia sehingga terjadi putus kontrak.

## 2. Konsistensi Penyerapan Anggaran 95,53%

Merupakan rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif.

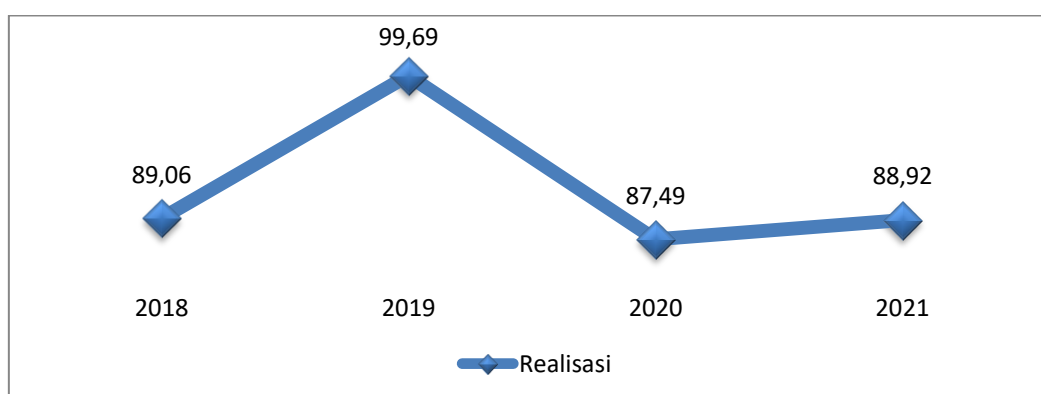
## 3. Capaian Keluaran (output) 100%

Merupakan rata-rata dari capaian keluaran 37 output yang dimiliki, dimana seluruh output berhasil mencapai 100 %, bahkan 12 output diantaranya memperoleh capaian lebih dari 100%,

## 4. Nilai Efisiensi 66,02%

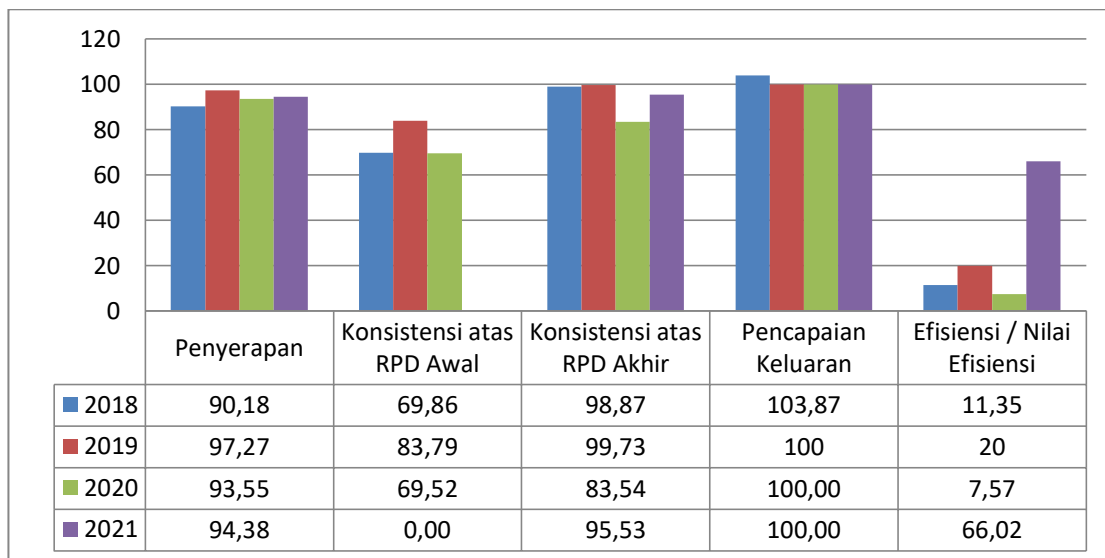
Nilai Efisiensi merupakan hasil pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan paling tinggi sebesar 20%.

Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana grafik berikut :



**Grafik 3.2.11.1.10. Perbandingan Nilai EKA Tahun 2018-2021**

Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa komponen, sebagaimana grafik berikut :



**Grafik 3.2.11.1.11. Nilai EKA berdasarkan Komponen Tahun 2018-2021**

Berdasarkan nilai komponen tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Penyerapan Anggaran

- Faktor penghambat penyerapan anggaran tahun 2021 ini adalah adanya kegagalan pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik Tahap III, dimana penyedia hanya mampu mencapai 80,074% sehingga tidak bisa direalisasikan anggaran pembayaran termin V (lima) sebesar kurang lebih 2,6 milyar.
- Untuk menghindari hal tersebut terjadi kembali di tahun anggaran berikutnya, dalam rangka melanjutkan pembangunan di tahap IV, BBPOM di Banjarmasin harus meningkatkan koordinasi, baik dengan UKPBJ Badan POM pada proses pemilihan pelaksana melalui tender untuk memperoleh penyedia yang mampu melaksanakan dengan baik, dan juga dengan pelaksana agar proses pekerjaan pembangunan gedung dapat terlaksana sesuai jadwal perencanaan serta dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang sama, maupun dengan pihak lain yang berwenang, apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

## **2. Konsistensi Penyerapan Anggaran.**

- Penyusunan RPD melalui aplikasi SAKTI setiap awal triwulan tahun Anggaran berjalan. Dinamisnya pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi mengakibatkan sulitnya menentukan RPD yang sesuai dengan Realisasi.
- Komitmen para pengelola kegiatan yang cukup baik, dan telah dilakukan upaya perbaikan RPD melalui mekanisme Revisi Halaman III DIPA secara berkala, sehingga meminimalkan deviasi yang terjadi.

## **3. Capaian Keluaran**

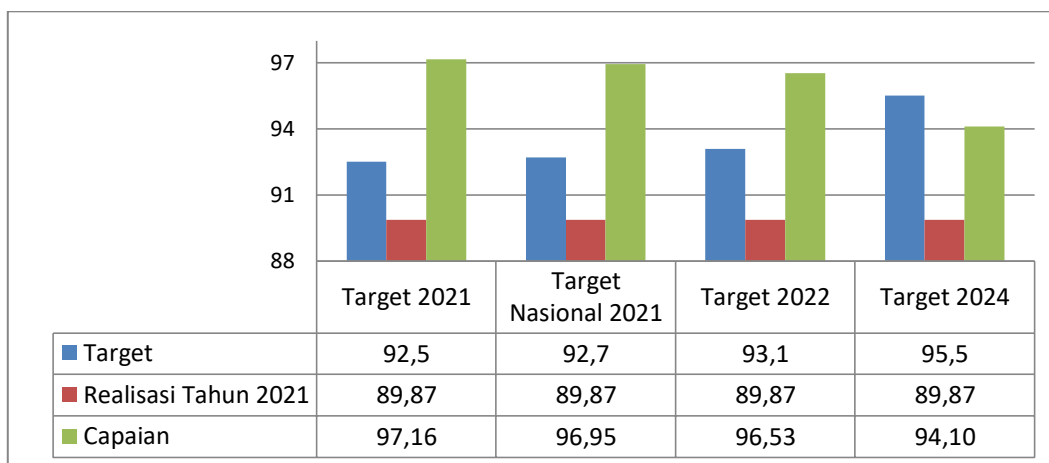
- Faktor yang menghambat pencapaian keluaran kegiatan adalah adanya keluaran yang pencapaiannya dapat dinilai pada akhir tahun anggaran, seperti RO QDB.001. Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); QDB.002. Desa Pangan Aman; dan QDB.003. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
- Target keluaran pada dasarnya sudah sesuai dengan kemampuan balai, sehingga dapat dipenuhi dengan baik

## **4. Efisiensi**

- Faktor penghambat efisiensi diantaranya adalah adanya kegagalan pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga tidak mencapai tingkat efisiensi yang baik. Disamping itu adanya RO dengan target volume RO generik yang membatasi kemungkinan pencapaian tidak dapat melebihi 100%.
- Faktor pendukung efisiensi adalah, pencapaian keluaran dari beberapa RO yang melebihi target, seperti :
  - 1) BDC.001.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 120,67%;
  - 2) BDC.002.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM I, capaian keluarannya 125%;
  - 3) BDC.003.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II, capaian keluarannya 125%;
  - 4) BMB.001. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 123,08%;

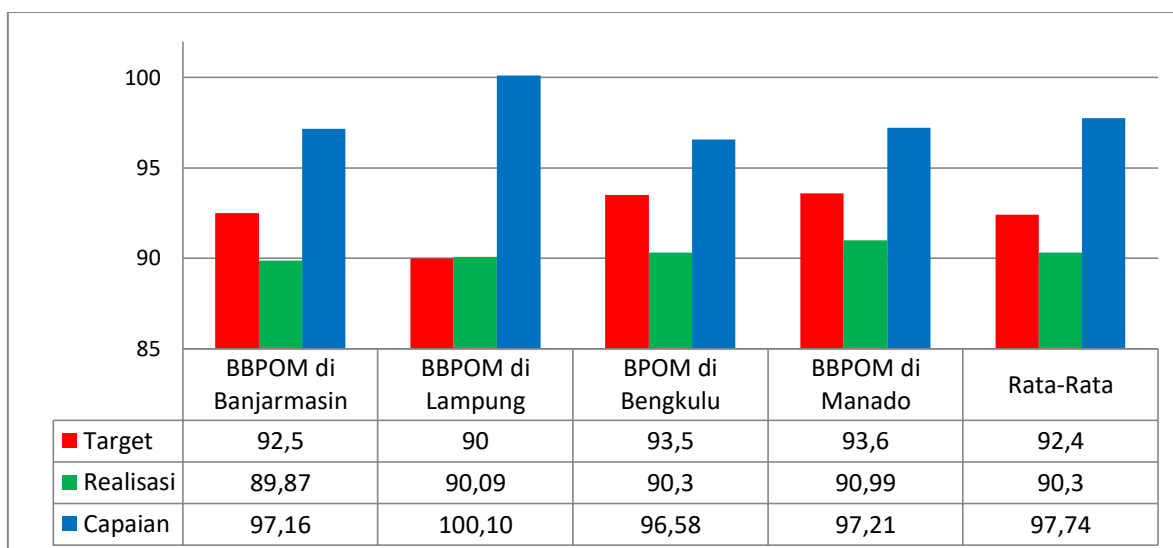
- 5) BMB.002. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I, capaian keluarannya 116%;
  - 6) BMB.003. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II, capaian keluarannya 120%;
  - 7) QCD.U35. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan capaian 200%.
  - 8) QIC.001.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 110,87%;
  - 9) QIC.002.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I, capaian keluarannya 110%;
  - 10) QIC.003.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II, capaian keluarannya 125%;
  - 11) QIC.004.Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 111,94%;
  - 12) QIC.005.Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I, capaian keluarannya 101,42%;
  - 13) QIC.006.Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II, capaian keluarannya 120,79%;
- Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antara kedua capaian tersebut harus dipertahankan, di satu sisi penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, realisasi anggaran minimal 90 %, di sisi lain realisasi volume keluaran harus maksimal dengan tetap memperhatikan batas anomali, tidak lebih dari 200%.

Realisasi Indikator Kinerja ini apabila dibandingkan target tahun 2024 sebagai akhir RPJM memiliki capaian yang Baik, yang artinya BBPOM di Banjarmasin optimis akan mencapai target tahun 2024 tersebut, berikut gambaran lengkapnya :



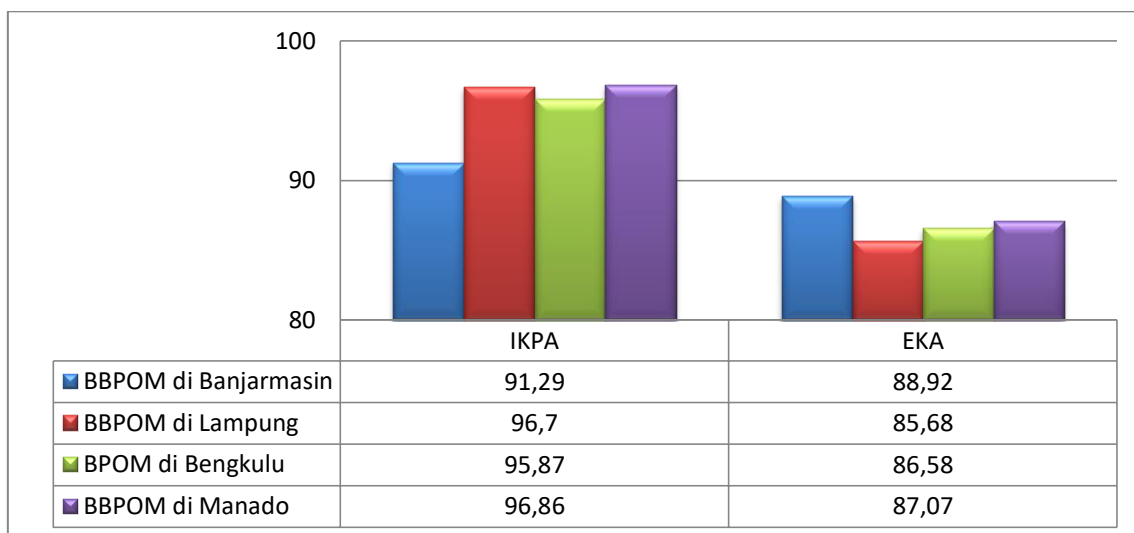
**Grafik 3.2.11.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke 4 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, sebagai berikut :



**Grafik 3.2.11.1.13. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Nilai IKPA tertinggi diperoleh BBPOM di Manado (96,86), sedangkan Nilai EKA tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin (88,92), sebagai berikut :



**Grafik 3.2.11.1.14. Nilai IKPA dan Eka BB/BPOM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Dukungan Manajemen, menggunakan anggaran sebesar Rp. 152.341.000,- dengan realisasi anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 133.054.629,- atau 87,34%

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 97,16% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,11 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,11, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
97,16	87,34	1,11	0,11	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.5.11.1.4. Efisiensi Anggaran IK.11.1 Tahun 2021**

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 hanya memperoleh capaian 97,16% dari target yang ditetapkan, namun kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dinyatakan berhasil, dan BBPOM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

### Indikator Kinerja 11.2 :

#### Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Efisien 92%	Efisien 100%	108,70%	Baik

Tabel 3.2.11.2.1. Realisasi Kinerja IK 11.2 Tahun 2021

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan, dibutuhkan pengukuran dan penetapan beberapa hal sebagai berikut :

a. Indeks efisiensi (IE)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input. Persentase Capaian Output yang dimaksud adalah Persentase Capaian Indeks Kinerja atau Rata-rata Persentase Capaian Indeks Kinerja, sedangkan Persentase Capaian Input adalah Persentase Penyerapan Anggaran per Indeks Kinerja atau Persentase Penyerapan Anggaran seluruhnya.

b. Standar efisiensi (SE) ditetapkan dengan nilai 1

c. Tingkat Efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih besar atau sama dengan Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Efisien**,

- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih kecil dari Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Tidak Efisien**.
- Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :
  - ✓ **0 - 0,2** : **100%** → **Efisien**
  - ✓ **0,21 - 0,4** : **95%** → **Efisien**
  - ✓ **0,41 - 0,6** : **92%** → **Efisien**
  - ✓ **0,61 - 0,8** : **90%** → **Efisien**
  - ✓ **0,81 - 1,0** : **88%** → **Efisien**
  - ✓ **1,01 - 1,2** : **86%** → **Tidak Efisien**
  - ✓ **1,21 - 1,4** : **84%** → **Tidak Efisien**
  - ✓ **1,41 - 1,6** : **80%** → **Tidak Efisien**
  - ✓ **1,61 - 1,8** : **78%** → **Tidak Efisien**
  - ✓ **> 1,81** : **75%** → **Tidak Efisien**
- Dengan kata lain penentuan kriteria Efisien sebagai berikut :
  - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
  - Tidak Efisien apabila TE<0 atau TE>1

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Semula</b>	Efisien 90%	Efisien 92%	Efisien 93%	Efisien 94%	Efisien 95%
<b>Menjadi</b>	Efisien 100% (Realisasi)	Efisien 92%	-	-	-

**Tabel 3.2.11.2.2. Perubahan Target IK 11.2  
berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024**

Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT mulai tahun 2022 tidak akan dipergunakan lagi, karena Efisiensi Anggaran telah terdapat dalam perhitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang merupakan komponen penilaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT.

Pada tahun 2021 berdasarkan perhitungan dan kriteria di atas, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin adalah Efisien dengan nilai 100%, dengan kata lain BBPOM di Banjarmasin telah mampu menghasilkan capaian output yang lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi penggunaan anggaran sebagai inputnya. Capaian output rata-rata yang diperoleh adalah 102,62% sedangkan capaian realisasi anggaran seluruhnya adalah 94,38%.

Adapun Capaian Tingkat Efisiensi dari masing-masing IK adalah sebagai berikut :

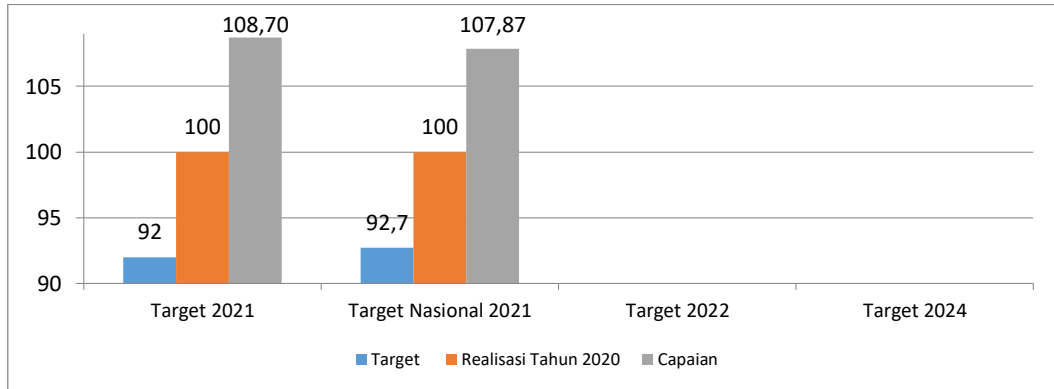
No.	Indikator Kinerja	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,49	99,99	<b>0,95</b>	<b>-0,05</b>	75%	<b>Tidak Efisien</b>
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	106,08	99,99	<b>1,06</b>	<b>0,06</b>	100%	<b>Efisien</b>
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	108,66	99,99	<b>1,09</b>	<b>0,09</b>	100%	<b>Efisien</b>
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104,23	99,99	<b>1,04</b>	<b>0,04</b>	100%	<b>Efisien</b>
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,18	99,91	<b>0,99</b>	<b>-0,01</b>	75%	<b>Tidak Efisien</b>
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	97,63	99,85	<b>0,98</b>	<b>-0,02</b>	75%	<b>Tidak Efisien</b>
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	101,32	100,00	<b>1,01</b>	<b>0,01</b>	100%	<b>Efisien</b>
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan	93,23	99,76	<b>0,93</b>	<b>-0,07</b>	75%	<b>Tidak Efisien</b>

No.	Indikator Kinerja	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
	Makanan						
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	102,03	100,00	<b>1,02</b>	<b>0,02</b>	100%	<b>Efisien</b>
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	112,68	99,95	<b>1,13</b>	<b>0,13</b>	100%	<b>Efisien</b>
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	119,65	99,95	<b>1,20</b>	<b>0,20</b>	100%	<b>Efisien</b>
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	112,59	100,00	<b>1,12</b>	<b>0,12</b>	100%	<b>Efisien</b>
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109,16	99,96	<b>1,09</b>	<b>0,09</b>	100%	<b>Efisien</b>
15	Indeks Pelayanan Publik	101,79	99,96	<b>1,02</b>	<b>0,02</b>	100%	<b>Efisien</b>
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	102,79	99,63	<b>1,03</b>	<b>0,03</b>	100%	<b>Efisien</b>
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	100,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
18	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,99	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,99	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	106,14	99,46	<b>1,07</b>	<b>0,07</b>	100%	<b>Efisien</b>
23	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	99,95	99,94	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
24	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	97,49	97,48	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100%	<b>Efisien</b>
25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	102,58	99,68	<b>1,03</b>	<b>0,03</b>	100%	<b>Efisien</b>
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100,55	88,59	<b>1,13</b>	<b>0,13</b>	100%	<b>Efisien</b>
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin	101,50	99,99	<b>1,02</b>	<b>0,02</b>	100%	<b>Efisien</b>

No.	Indikator Kinerja	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
	yang optimal						
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	97,37	87,34	1,11	0,11	100%	Efisien
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	108,70	99,93	1,09	0,09	100%	Efisien
	<b>TOTAL</b>	<b>102,62</b>	<b>94,38</b>	<b>1,09</b>	<b>0,09</b>	<b>100 %</b>	<b>Efisien</b>

**Tabel 3.2.11.2.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2021**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 29 indikator kinerja BBPOM di Banjarmasin, 25 indikator kinerja berhasil memperoleh capaian tingkat efisiensi anggaran Efisien dengan nilai antara 95% sampai dengan 100%, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya hanya mampu memperoleh nilai 75% atau Tidak Efisien.



**Grafik 3.2.11.2.11. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024**

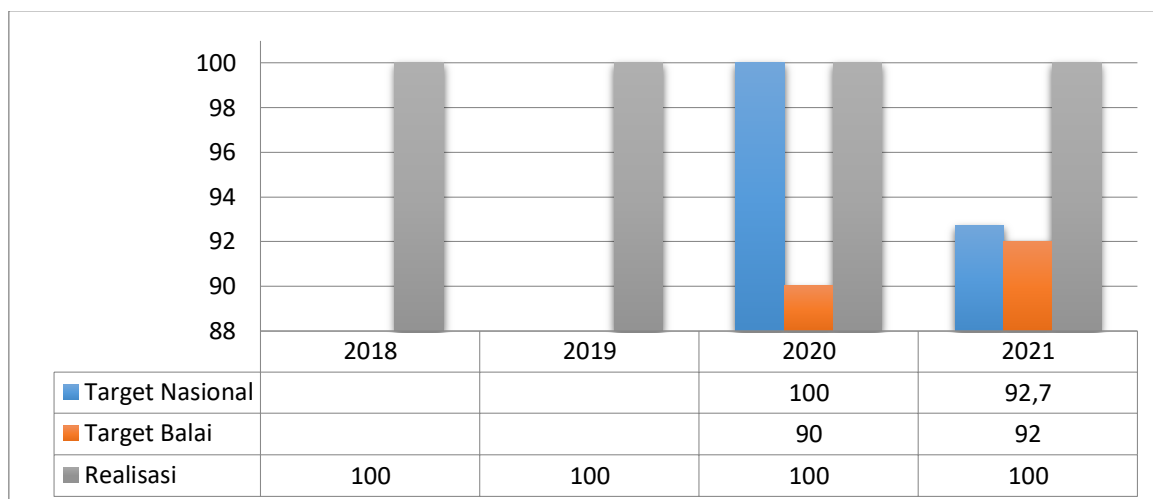
Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Efisien dengan nilai 92% dengan capaian 108,70%, dan dengan target nasional yaitu Efisien dengan nilai 92,7% capaiannya 107,87%.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Perkantoran, khususnya operasional dan pemeliharaan

kantor, baik yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin, maupun oleh Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk kegiatan tersebut tersedia pagu anggaran sebesar Rp17.440.132.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp.17.427.313.376,- atau 99,93%.

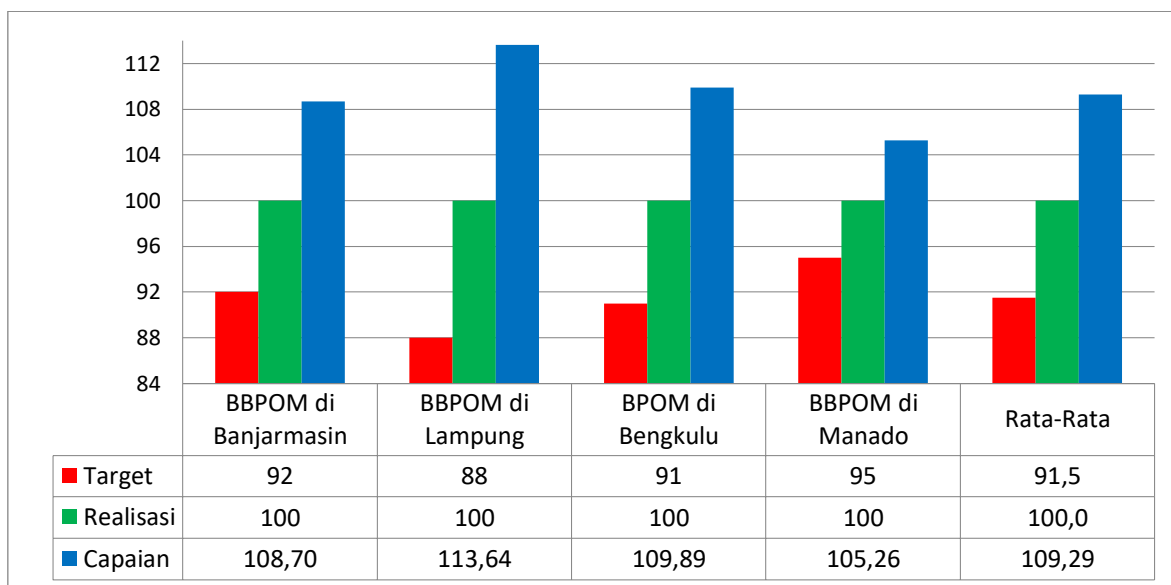
Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 108,70% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,09 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,09, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Meskipun pada Renstra BPOM tahun 2015-2019 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak menjadi indikator penilaian kinerja, namun Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sudah diperhitungkan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran UPT Badan POM oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, dimana berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat perbandingan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2018-2021.



**Grafik 3.2.11.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 11.2 Tahun 2018-2021**

Berdasarkan data dari 3 Balai Besar/ Balai POM lain dalam klaster 4, seluruhnya dapat memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran yang Efisien dengan nilai 100%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan oleh masing-masing UPT dengan perbandingan sebagai berikut :



**Grafik 3.2.11.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.2  
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Tingkat Efisiensi anggaran per Indikator Kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tingkat Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja tahun 2020, dimana pada tahun 2020, dari 28 Indikator Kinerja yang dimiliki, hanya 20 indikator kinerja yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien, selebihnya 8 indikator kinerja masih Tidak Efisien, sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	2020		2021	
		Capaian TE	Kriteria	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	75%	Tidak Efisien	75%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100%	Efisien	100%	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	75%	Tidak Efisien

No.	Indikator Kinerja	2020		2021	
		Capaian TE	Kriteria	Capaian TE	Kriteria
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	75%	Tidak Efisien
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	100%	Efisien	100%	Efisien
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	100%	Efisien	75%	Tidak Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	100%	Efisien	100%	Efisien
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	Efisien	100%	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88%	Efisien	95%	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100%	Efisien	100%	Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	100%	Efisien	100%	Efisien
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100%	Efisien	100%	Efisien
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100%	Efisien	100%	Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	100%	Efisien	100%	Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100%	Efisien	100%	Efisien
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	Efisien	100%	Efisien
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	Efisien	100%	Efisien
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100%	Efisien	100%	Efisien
23	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
24	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien

No.	Indikator Kinerja	2020		2021	
		Capaian TE	Kriteria	Capaian TE	Kriteria
25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	100%	Efisien
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	88%	Efisien	100%	Efisien
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	100%	Efisien
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	100%	Efisien

**Tabel 3.2.11.2.3. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2020-2021**

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya 4 indikator kinerja yang capaian outputnya masih belum mencapai target, sementara penyerapan anggarannya sudah cukup maksimal dan melebihi capaian outputnya.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 dapat dinyatakan berhasil, dengan capaian terhadap target sebesar 108,70% . Untuk tahun selanjutnya hingga akhir RPJM 2020-2024 indikator kinerja ini tidak lagi dimunculkan, karena sudah diperhitungkan sebagai salah satu komponen indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT. Sebagaimana optimisme BBPOM di Banjarmasin untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan akhir tahun RPJM 2020-2024, maka BBPOM di Banjarmasin pun optimis dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan DIPA No. SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2020, BBPOM di Banjarmasin mendapat anggaran sebesar Rp.55.781.064.000,-, yang kemudian seiring berjalannya tahun 2021 mengalami 3 (tiga) kali refocusing anggaran melalui APBNP Tahap I, III dan IV, dengan jumlah pengurangan sebesar 15,10% sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp.47.356.942.000,- , dengan rincian Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 11.896.159.000,- , Belanja Barang (52) sebesar Rp. 21.335.122.000,- dan Belanja Modal (53) sebesar Rp. 14.125.661.000,-.

Berikut Capaian Anggaran BBPOM di Banjarmasin berdasarkan beberapa teknis perhitungan.

1. Capaian anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan.

Setelah dilakukan pengelompokan anggaran baik pagu dan realisasinya berdasarkan Indikator Kinerja, dilakukan pengelompokan lagi ke tingkat Sasaran Kegiatan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.334.737.600	1.334.638.668	99,99
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	365.172.000	394.579.242	99,85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	127.500.000	127.362.264	99,89

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	680.210.500	679.961.478	99,96
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.557.291.000	1.556.733.499	99,96
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	333.684.400	333.659.667	99,99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	926.329.000	921.314.648	99,46
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	380.340.000	376.994.964	99,11
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	627.683.000	625.674.414	99,68
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	23.420.541.500	20.803.310.221	88,83
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	17.573.453.000	17.541.971.851	99,82
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.356.942.000</b>	<b>44.696.149.310</b>	<b>94,38</b>

*Data berdasarkan OMSPAN*

Rata-rata capaian realisasi anggaran tiap sasaran kegiatan adalah 98,77%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran BBPOM di Banjarmasin berbanding lurus dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yang secara fisik mencapai 100% (data terlampir).

2. Capaian anggaran berdasarkan Kelompok Rincian Output (KRO).

No	Kode KRO	KRO	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	3165ADD	Standarisasi Lembaga	2.187.494.000	2.184.265.742	99,85
2	3165AEA	Koordinasi	53.857.000	53.857.000	100,00
3	3165BAH	Pelayanan Publik Lainnya	116.166.000	116.166.000	100,00
4	3165BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	292.184.000	292.184.000	100,00
5	3165BKB	Pemantauan produk	1.503.393.000	1.501.369.889	99,87
6	3165BMB	Komunikasi Publik	247.000.000	247.000.000	100,00
7	3165CAB	Sarana Bidang Kesehatan	21.335.122.000	18.724.899.395	87,77
8	3165QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	872.472.000	872.472.000	100,00
9	3165QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.411.199.000	1.411.199.000	100,00
10	3165QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.668.422.000	1.668.422.000	100,00
11	3165QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	709.340.000	709.340.000	100,00
	6384EAA	Program Dukungan Manajemen	16.960.293.000	16.914.974.284	99,73
		<b>JUMLAH</b>	<b>47.356.942.000</b>	<b>44.696.149.310</b>	<b>94,38</b>

*Data berdasarkan OMSPAN*

Realisasi anggaran BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021 sebesar 94,38%; realisasi tertinggi adalah pada belanja pegawai (51) sebesar 99,86% ; selanjutnya diikuti oleh belanja barang (52) sebesar 99,76% ; dan yang paling rendah realisasinya adalah belanja modal (53) 87,77%.

Rendahnya realisasi belanja modal, disebabkan adanya kegagalan pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium dan Layanan Publik tahap III, dimana mereka hanya mampu mencapai 80,074%, sehingga tidak bisa direalisasikan anggaran berupa pembayaran termin terakhir / termin ke 5 (lima) sebesar ebih kurang Rp. 2,6 Milyar.

BBPOM di Banjarmasin telah melaksanakan seluruh program/ kegiatan sesuai perjanjian kinerja dengan baik walaupun masih ada sisa anggaran yang tidak terserap. Agar capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat optimal, dilakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara baik dan tepat.

Upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dalam 3 (tiga) perpektif. Pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Nilai Pencapaian Strategis NPS total 97,95 dengan kriteria Baik. Nilai tersebut diperoleh dari 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang sudah dapat dinilai, dari 11 Sasaran Kegiatan yang dimiliki.

Sasaran Kegiatan dengan NPS paling tinggi adalah SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel dengan NPS sebesar 147,48% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, sedangkan Sasaran Kinerja dengan NPS paling rendah adalah SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan NPS sebesar 35,85%.

Dari 29 (duapuluh sembilan) Indikator Kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, pada triwulan I tahun 2022 ini baru dapat diukur sebanyak 20 (duapuluh) Indikator Kinerja dengan capaian antara 0% sampai dengan 147,48%.

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 62.212.840.000,-. Sebelum memasuki masa pelaksanaan anggaran, pada bulan Desember 2021 mengalami self adjustment anggaran, dimana terhadap pagu anggaran tersebut diblokir sebesar Rp 3.154.828.000,- (5%) sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp.59.058.012.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada triwulan I tahun 2022 adalah Rp 3.774.562.930,- atau 6,07% terhadap pagu awal.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, pada triwulan I tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 15,75 dan Tingkat Efisiensi (TE) 14,75 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Tidak Efisien dengan nilai 75%. Nilai tersebut berasal dari 29 Indikator Kinerja Utama, dimana seluruhnya masih memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Tidak Efisien.

Berdasarkan capaian-capaian di atas, meskipun secara NPS Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh nilai yang Baik, namun kegiatan yang dilaksanakannya selama triwulan I tahun 2022 belum berhasil dengan baik, dan tentunya harus ditingkatkan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **4.2. Saran**

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di triwulan berikutnya antara lain:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan riil agar mengurangi sisa anggaran yang tidak terserap. Selain itu, juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas.
3. Menyusun langkah-langkah strategis pencapaian Indikator Kinerja yang capaiannya masih sangat kurang yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (35,85%) dan Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (0%)



**BADAN POM**

# **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

**Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No.40 Banjarmasin**

**e-mail :**

**[bpom\\_banjarmasin@pom.go.id](mailto:bpom_banjarmasin@pom.go.id)**

